



JAMSOSTEK

PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero)



Organisasi
Perburuhan
Internasional



Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja di Sektor
Perekonomian Informal di Indonesia

Mencari program fleksibel yang ditargetkan



Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja di Sektor
Perekonomian Informal di Indonesia:

**Mencari program fleksibel
yang ditargetkan**

Hak Cipta © Organisasi Perburuhan Internasional 2010

Edisi Bahasa Indonesia, cetakan pertama, 2010

Publikasi-publikasi International Labour Office memperoleh hak cipta yang dilindung oleh Protokol 2 Konvensi Hak Cipta Universal. Meskipun demikian, kutipan-kutipan singkat dari publikasi tersebut dapat diproduksi ulang tanpa izin, selama terdapat keterangan mengenai sumbernya. Permohonan mengenai hak reproduksi atau penerjemahan dapat diajukan ke ILO Publications (Rights and Permissions), International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland, or by email: pubdroit@ilo.org. International Labour Office menyambut baik permohonan-permohonan seperti itu.

Perpustakaan, lembaga dan pengguna lain yang terdaftar di Inggris Raya dengan Copyright Licensing Agency, 90 Tottenham Court Road, London W1T 4LP [Fax: (+44) (0)20 7631 5500; email: cla@cla.co.uk], di Amerika Serikat dengan Copyright Clearance Center, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923 [Fax: (+1) (978) 750 4470; email: info@copyright.com] atau di negara-negara lain dengan Reproduction Rights Organizations terkait, dapat membuat fotokopi sejalan dengan lisensi yang diberikan kepada mereka untuk tujuan ini.

Organisasi Perburuhan Internasional

Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja di Sektor Perekonomian Informal di Indonesia: Mencari program fleksibel yang ditargetkan/Kantor Perburuhan Internasional, Jakarta, 2010

ISBN 978-92-2-823422-0 (print);
979-92-2-823423-7 (web pdf)

Juga tersedia dalam bahasa Inggris: *"Social security for informal economy workers in Indonesia; Looking for flexible and highly targeted programmes"* ISBN: 979-92-2-123422-7 (print); 978-92-2-123423-4 (web pdf)/International Labour Office, Jakarta, 2010

Katalog Data Publikasi ILO

Penggambaran-penggambaran yang terdapat dalam publikasi-publikasi ILO, yang sesuai dengan praktik-praktik Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan presentasi materi yang ada di dalamnya tidak mewakili pengekspresian opini apapun dari sisi International Labour Office mengenai status hukum negara, wilayah atau teritori manapun atau otoritasnya, atau mengenai batas-batas negara tersebut.

Tanggungjawab atas opini-opini yang diekspresikan dalam artikel, studi, dan kontribusi lain yang ditandatangani merupakan tanggungjawab penulis, dan publikasi tidak mengandung suatu dukungan dari International Labour Office atas opini-opini yang terdapat di dalamnya.

Rujukan ke nama perusahaan dan produk komersil dan proses tidak menunjukkan dukungan dari International Labour Office, dan kegagalan untuk menyebutkan suatu perusahaan, produk komersil atau proses tertentu bukan merupakan tanda ketidaksetujuan.

Publikasi ILO dapat diperoleh melalui penjual buku besar atau kantor lokal ILO di berbagai negara, atau secara langsung dari ILO Publications, International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland; atau Kantor ILO Jakarta, Menara Thamrin, Lantai 22, Jl. M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250, Indonesia. Katalog atau daftar publikasi tersedia secara cuma-cuma dari alamat di atas, atau melalui email: pubvente@ilo.org

Kunjungi halaman web kami: www.ilo.org/publns; www.ilo.org/jakarta

Dicetak di Indonesia

Saat ini, Indonesia menghadapi tantangan besar yang mana sebagian besar penduduk Indonesia berada di luar perlindungan sosial. Mereka merupakan bagian dari ekonomi informal, dan berada di luar jangkauan skema asuransi sosial formal berbasis kontribusi yang ada atau manfaat sosial yang dibiayai pajak.

Karakteristik yang unik dari negara Indonesia memberi tantangan yang berbeda-beda dalam pengembangan sistem perlindungan sosialnya dibandingkan dengan sistem yang telah dikembangkan di negara-negara industri. Kita tidak dapat hanya mengandalkan Pemerintah untuk memberi perlindungan sosial terhadap penduduk miskin dan pekerja ekonomi informal, mengingat keterbatasan sumber dana yang dimiliki Pemerintah serta dominasi pekerja ekonomi informal di pasar tenaga kerja.

Kondisi-kondisi inilah yang melatarbelakangi mengapa PT Jamsostek (Persero) setuju untuk berkolaborasi dengan Kantor ILO-Jakarta untuk melakukan penelitian untuk melihat kemungkinan pengembangan suatu sistem perlindungan sosial yang menyeluruh dan berkesinambungan bagi pekerja ekonomi informal.

Inisiatif ini bermula di tahun 2005 dengan suatu proyek percontohan. Proyek percontohan ini merupakan kelanjutan dari studi yang dibuat oleh ILO mengenai Ekonomi Informal di tahun 2004, yang dilakukan oleh John Angelini dan Kenichi Hirose. Rekomendasi dari studi ini digunakan sebagai masukan untuk menyusun Peraturan Menteri Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 24/2006, PT Jamsostek (Persero) sejak saat itu mulai memperluas cakupan perlindungan sosialnya kepada pekerja ekonomi informal sebagaimana dimandatkan dalam Peraturan Menteri ini.

Tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana kita memperluas cakupan perlindungan sosial bagi pekerja informal dikemudian hari. Merujuk pada tujuan ini, sangatlah penting untuk menjajagi konsep pemikiran kreatif, inovatif dan menyeluruh. Sangatlah diharapkan bahwa penelitian ini akan dapat memetakan karakteristik setiap sektor ekonomi informal sebagai basis untuk menyusun program yang fleksibel dan ditujukan bagi pekerja informal.

Saya percaya bahwa publikasi dari penelitian ini akan bermanfaat dan merupakan suatu masukan yang sangat besar bagi seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan perlindungan sosial bagi pekerja informal untuk mencapai cakupan universal di bawah sistem jaminan sosial nasional yang baru sebagai mandat dari UU RI nomor 40/2004.

H. Hotbonar Sinaga

Presiden Direktur

PT. Jamsostek (Persero)

Kata Pengantar



Perlindungan jaminan sosial ditetapkan secara jelas dalam konvensi-konvensi ILO maupun instrumen PBB sebagai hak asasi manusia yang mendasar.

Hanya 20% dari penduduk dunia yang sudah menikmati jaminan sosial yang memadai namun lebih dari separohnya belum memperolehnya sama sekali. Untuk itu, ILO secara aktif mempromosikan kebijakan serta memberi bantuan ke berbagai negara untuk memperluas perlindungan sosial mereka secara memadai hingga mencakup semua lapisan masyarakat. Kampanye “Global Campaign on Social Security and Coverage for All” yang diluncurkan tahun 2003 menjadi dasar dari upaya yang tengah dilakukan di lebih dari 30 negara. Upaya ini mencakup beberapa proyek yang dimaksudkan untuk membantu negara-negara tersebut dalam memperluas perlindungan jaminan sosial di tingkat nasional serta memperkuat organisasi jaminan sosial berbasis masyarakat

Persoalan jaminan sosial merupakan bagian penting dari agenda ILO. Baru-baru ini, konstituen tripartit ILO telah menetapkan bahwa periode 2006-2015 sebagai Dekade Pekerjaan yang Layak Asia agar melakukan upaya bersama yang berkelanjutan guna mewujudkan Pekerjaan yang Layak di Asia. Memperluas perlindungan jaminan sosial hingga mencakup kelompok masyarakat yang rentan merupakan salah satu prioritas utama dari aksi nasional ini.

Di Indonesia, reformasi jaminan sosial didorong oleh pemberlakuan UU no. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pelaksanaannya ditunda atas beberapa alasan, termasuk kompleksitas tugas mendatang, namun hal ini diharapkan dapat diselesaikan tahun 2009.

Selama bertahun-tahun, ILO telah berupaya mendukung pengembangan jaminan sosial di Indonesia melalui proyek-proyek kerjasama teknis. Berdasarkan pengalaman ini, laporan penelitian saat ini membahas tentang jaminan sosial untuk tenaga kerja di sektor perekonomian informal di Indonesia, dan mencari program-program yang fleksibel dan sangat ditargetkan untuk memperluas perlindungan jaminan sosial.

Kami yakin laporan yang didukung oleh kerjasama erat antara ILO dengan PT JAMSOSTEK dan disusun oleh Theo van der Loop dan Roos Kities Andadari ini dapat memberi kontribusi penting dalam membahas langkah-langkah realistis yang perlu diambil agar dapat memperbaiki skema jaminan sosial yang ada serta rencana aksi yang efektif untuk melaksanakan sistem jaminan sosial nasional di Indonesia.

Melalui kerangka kerja Program Nasional untuk Pekerjaan yang Layak di Indonesia dan kerjasama dengan berbagai organisasi internasional lain, ILO akan terus berkomitmen untuk membantu Pemerintah dan mitra sosial dalam mengembangkan sistem jaminan sosial yang lebih baik sekarang dan di masa mendatang.

Jakarta, September 2009

Alan Boulton

Direktur ILO Jakarta Office

Penghargaan

Laporan ini diprakarsai melalui kerjasama antara ILO dengan PT JAMSOSTEK tentang pentingnya upaya memperluas perlindungan jaminan sosial khususnya di sektor perekonomian informal. Laporan ini dimungkinkan dengan adanya kontribusi finansial dari kedua organisasi tersebut.

Proyek ini dikoordinasikan oleh Tauvik Muhamad dari ILO, dengan dukungan penuh dari Alan Boulton, Direktur ILO, dan Peter van Rooij, Wakil Direktur ILO. Namun secara umum, kami sangat menghargai kontribusi yang telah diberikan semua staf ILO, misalnya dalam mengadakan seminar yang berjalan dengan baik.

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan berbagai pihak di PT JAMSOSTEK khususnya: H. Hotbonar Sinaga, Presiden Direktur, Ahmad Ansyori, Direktur Pengoperasian, Abdul Latif Algaff, Kepala Hubungan Kelembagaan dan Isnavodiar Jatmiko dari Biro Perencanaan & Pembangunan.

Di samping itu, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi mereka dalam menyusun laporan akhir ini, baik sebagai informan ataupun tenaga pengkaji, khususnya kepada Tianggur Sinaga – Peneliti Senior di Puslitbang Tenaga Kerja, Depnakertrans, Dinna Wisnu PhD, Direktur PGSD di Universitas Paramadina, serta Dr. M.W. Manicki, Team Leader GTZ/GVG Social Health Insurance Project.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa koordinator lokal dan untuk itu, tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada Bayu Wijayanto, Kepala *Centre for Micro and Small Enterprise Dynamics* (CEMSED), UKSW Salatiga (Jawa Tengah) yang telah mengkoordinasikan pemasukan data untuk semua sampel; serta kepada Timboel Siregar, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Jakarta; Paula Hartyastuti, Kepala Unit Pembangunan Masyarakat Bethesda, Yogyakarta; dan Budi Salean, Peneliti di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Arta Wacana (UKAW), Kupang, Indonesia Timur.

Yang terakhir, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada responden yang telah meluangkan waktu mereka, dengan mengorbankan sebagian penghasilan mereka dari kegiatan informal, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan.

Theo van der Loop

Development Consultant
Dhaka, Bangladesh

Roos Kities Andadari

Peneliti Senior/Dosen
Fakultas Ekonomi, CEMSED
Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW)
Salatiga

September 2009

Daftar Isi

Kata pengantar	3
Penghargaan	4
Daftar singkatan	7
Ringkasan Eksekutif	9
1 Latar Belakang dan Tujuan	17
1.1 Konteks internasional	17
1.2 Konteks nasional	20
1.2.1 Perekonomian informal	20
1.2.2 Jaminan sosial	22
1.3 Tujuan penelitian	25
2 Metodologi	27
2.1 Wawancara dengan pemangku kepentingan yang utama	27
2.2 Survei tenaga kerja informal	27
2.3 Studi kasus tentang pekerja di sektor formal yang di-PHK	30
2.4 Solo: Kebijakan lokal yang inovatif, sebuah studi kasus	30
3 Jenis tenaga kerja informal	31
3.1 Jenis Sub sektor	31
3.2 Status pekerjaan	33
3.3 Karakteristik pilihan	34
3.4 Ringkasan	38
4 Mekanisme penyesuaian tenaga kerja informal saat ini terkait tidak adanya jaminan sosial	39
4.1 Tenaga kerja informal yang tidak memiliki jaminan sosial	39
4.2 Pengetahuan tentang jaminan sosial	40
4.3 Sikap terhadap jaminan sosial	41
4.4 Kesimpulan: Bentuk-bentuk jaminan sosial saat ini	43
5 Permintaan akan jaminan sosial di antara tenaga kerja informal	45
5.1 Jenis jaminan sosial yang diprioritaskan	45
5.2 Kemauan untuk membayar	48
5.3 Kesimpulan: Permintaan akan jaminan sosial	51

6	Dampak krisis keuangan global saat ini terhadap perekonomian informal	53
6.1	Dampak krisis terhadap Tenaga kerja informal	53
6.2	Dampak krisis terhadap Tenaga kerja formal: Studi kasus tentang pekerja di sektor formal yang di-PHK	55
6.3	Kesimpulan: Dampak krisis global	56
7	Peran pemerintah daerah	57
7.1	Kebijakan desentralisasi	57
7.2	Kebijakan pemerintah daerah yang inovatif di Solo	58
7.3	Rekomendasi	59
8	Rekomendasi: Tindak lanjut melalui pendekatan multi-disiplin	61
8.1	Prinsip	62
8.2	Proposal proyek persiapan dan transisi	63
8.3	Proposal proyek terpadu jangka panjang	65
8.4	Peta jalan (Road Map)	65

Daftar Lampiran

Lampiran 1	Kuesioner survei	67
Lampiran 2	Kuesioner studi kasus sektor formal	72
Lampiran 3	Pemilihan sub sektor berdasarkan kriteria pemilihan	76
Lampiran 4	Sektor-sektor ekonomi yang utama dan status pekerjaan yang utama di daerah sampel	77
Lampiran 5	Jumlah wawancara per sektor dan daerah sampel	79
Lampiran 6	Karakteristik pilihan 22 Sub sektor	81
Lampiran 7	Kerangka Acuan (TOR) untuk proyek persiapan	82
Lampiran 8	Daftar referensi	86

Daftar singkatan

ADB	Bank Pembangunan Asia atau <i>Asian Development Bank</i>
ASABRI PT	Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
ASKES PT	Asuransi Kesehatan Indonesia.
ASKESKIN	Asuransi Kesehatan Orang Miskin
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BPS	Biro Pusat Statistik.
CCT	<i>Conditional Cash Transfer</i> = Transfer Tunai Bersyarat
CEMSED	<i>Centre for Micro and Small Enterprise Dynamics</i> = Pusat Dinamika Usaha Mikro dan Kecil
CSR	<i>Corporate Social Responsibility</i> = Tanggung-jawab Sosial Perusahaan
DEPNAKERTRANS	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
EC	<i>European Commission</i> = Komisi Eropa
EU	<i>European Union</i> = Uni Eropa (UE)
GTZ	<i>German Technical Cooperation</i> = Kerjasama Teknis Jerman
ILO	<i>International Labour Organisation</i> = Organisasi Buruh Dunia
JAMKESMAS	Jaminan Sosial Masyarakat
JAMSOSTEK	Jaminan Sosial Tenaga Kerja
MDP	<i>Multi-Donor Support to Indonesia's Democratic Election</i> = Bantuan Berbagai Lembaga Donor untuk Pemilu Demokratis di Indonesia
MSF	<i>Multi-donor support facility</i> = Fasilitas bantuan dari berbagai lembaga donor
PNPM	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
OOP	Dana bantuan atau <i>Out-of-Pocket</i>
PRSP	<i>Poverty Reduction Strategy Paper</i> = Dokumen tentang Strategi Pengurangan Kemiskinan
SJSN	Sistem Jaminan Sosial Nasional
TASPEN PT	Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri.
UC	<i>Universal Coverage</i> = Perlindungan yang bersifat Universal
UKSW	Universitas Kristen Satya Wacana (di Salatiga)
UNDP	<i>United Nations Development Programme</i> = Program Pembangunan PBB
WB	<i>World Bank</i> = Bank Dunia

“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu.”

Sumber: UUD 1945, pasal 34, ayat 2

“Jaminan sosial tidak boleh dianggap sebagai pembiayaan, tapi investasi dalam permodalan manusia yang dimaksudkan untuk mencapai tingkat produktivitas yang lebih tinggi.”

Sumber: Hiroshi 2008

Ringkasan Eksekutif

Pendahuluan

Di Indonesia, sekitar 17% masyarakat pekerja yang sudah menikmati jaminan sosial resmi, terutama mereka yang bekerja di sektor formal. Di bidang kesehatan, perlindungan jaminan sosial baru-baru ini sudah diperluas melalui program Jamkesmas/Askeskin yang ditargetkan untuk keluarga miskin. Namun jaminan sosial untuk *tenaga kerja informal*, yang merupakan dua per tiga dari keseluruhan tenaga kerja yang ada, masih banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Dalam hal solusi, UUD 45 secara eksplisit telah menekankan peran negara dalam menyediakan jaminan sosial secara universal. Penelitian saat ini memiliki tiga tujuan utama berikut ini:

- 1) Meningkatkan permintaan akan jaminan sosial;
- 2) Menetapkan mekanisme penyesuaian bagi tenaga kerja informal;
- 3) Menilai dampak krisis keuangan global terhadap perekonomian informal.

Berdasarkan data yang dijumpai, beberapa proposal nyata yang perlu ditindaklanjuti akan disajikan untuk dibahas; sesuai prinsip berikut:

Jaminan sosial tidak boleh dianggap sebagai pembiayaan, tapi investasi di bidang permodalan manusia

Metodologi

Penelitian ini menggunakan empat jenis instrumen metodologi:

- Wawancara dengan pemangku kepentingan yang utama.
- Survei terhadap 2.068 tenaga kerja informal.
- Studi kasus terhadap 15 orang pekerja di sektor formal yang di-PHK.
- Studi kasus tentang kebijakan lokal yang inovatif di Solo yang dimaksudkan untuk memformalisasikan perekonomian informal.

Perekonomian informal

Di tahun 2008, lebih dari 61% pekerja dikategorikan sebagai informal berdasarkan survei terakhir (BPS/ SAKERNAS, 2008). Pekerjaan informal telah meningkat tajam dalam jumlah absolut sejak tahun 2003. Namun kecenderungan pangsa yang meningkat di sektor perekonomian informal yang terjadi sebelum tahun 2003 sebaliknya menurun. Ini menunjukkan bahwa pekerjaan di sektor formal sudah kembali pulih selama 5 tahun belakangan ini. Namun pertanyaan utamanya adalah apakah krisis global saat ini akan menimbulkan dampak yang sama besarnya seperti krisis Asia tahun 1997/98?

61% pekerja adalah pekerja informal ekonomi

Jaminan Sosial

Jaminan sosial merupakan hak asasi manusia yang mendasar dan telah meningkat tajam setelah diberlakukannya UU No. 40 tahun 2004 tentang SJSN tahun. Namun sejak itu, pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala besar, dan baru pada September tahun 2009 Dewan SJSN dinominasikan. Kini dibutuhkan upaya mendesak mengingat adanya pembatalan secara sah atas UU bulan September 2004 sehingga menunda pelaksanaannya (atau perpanjangan masa pelaksanaannya selama satu tahun). Di samping itu, UU ini diharapkan menjadi bagian terpadu dari Peraturan Menteri No. 24 tahun 2006 tentang Tenaga Kerja Informal, dan menjadi tindak lanjut dari UU No. 3 tahun 1992 tentang Jamsostek (yang secara khusus mengatur masalah perekonomian formal). Jaminan sosial saat ini mencakup sekitar 47% pekerja di sektor formal (Jamsostek, Taspen, Askes dan Asabri), dan sekitar 105.000 tenaga kerja informal (<0,2 %).

Di bidang asuransi kesehatan, pencapaian besar diperoleh dalam memperluas perlindungan jaminan sosial sejak tahun 2005 yaitu saat pendapatan pemerintah meningkat dikarenakan peningkatan harga BBM digunakan untuk membiayai beberapa program jaring pengaman sosial, termasuk asuransi kesehatan untuk keluarga miskin yang ditargetkan bagi 76 juta jiwa tahun 2008 (ASKESKIN / JAMKESMAS).

Survei tenaga kerja informal

Survei ini diadakan bulan Mei 2009 di empat daerah: daerah pedesaan di Jawa Tengah dan daerah perkotaan di Jakarta, Yogyakarta, dan Kupang (in Indonesian Timur). Sebanyak 2.068 tenaga kerja, baik wiraswasta maupun pengusaha di sektor perekonomian informal diwawancarai. Pemilihan sektor dan sub-sektor ekonomi yang utama di masing-masing daerah ini didasari apda kriteria berikut ini: 1) Keterwakilan; 2) Masuknya kegiatan yang paling penting di masing-masing daerah; 3) Perwakilan Pekerja Perempuan; 4) Tingkat kerentanan relatif pekerja; 5) Penyuluhan yang diperluas, visibilitas dan kapasitas untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sub-sektor tertentu; 6) Representasi sektor-sektor Representasi berbagai sektor (berdasarkan data SAKERNAS 2008); 7) Representasi status pekerjaan. Beberapa hasil temuan yang utama dari survei ini diringkas dalam bagian-bagian berikut ini.

A. Karakteristik dasar Tenaga kerja informal

Karakteristik tenaga kerja tentunya ditentukan oleh pemilihan 22 sub sektor tapi dikarenakan maksudnya untuk memastikan adanya keterwakilan maka 2.068 wawancara dapat dijadikan sebagai sampel yang paling representatif. Di antara para responden, 56% adalah buruh, 29% wiraswasta dan 15% adalah dari kalangan pengusaha. Dikarenakan pemilihan sub sektor ini, ada penyimpangan tertentu berdasarkan wilayah sampel: Jakarta dan Yogyakarta mempunyai jumlah buruh yang tinggi (60-70%), sedangkan di Kupang, sekelompok besar pengusaha dilibatkan dalam wawancara ini (26%). Daerah pedesaan di Jawa Tengah memiliki jumlah wiraswasta yang paling tinggi yaitu (42%).

2.068 tenaga kerja informal 22 sub sektor 56 % buruh 34% perempuan 58% memperoleh upah kurang dari Rp. 800.000 per bulan.

Secara signifikan, 34 % dari responden adalah perempuan. Tingkat penghasilan mereka sangat bervariasi, tapi sekitar 58% di antara adalah dari kalangan keluarga miskin dengan upah di bawah Rp. 800.000 per bulan (besar upah minimum bulanan resmi bervariasi tapi sekitar Rp 1 juta di Jakarta dan Rp. 833.000 di Jawa Tengah); 45% tenaga kerja memperoleh kurang dari Rp. 600.000 per

bulan. Pengusaha memperoleh penghasilan yang jauh lebih baik dimana dua pertiga di antaranya memperoleh penghasilan di atas Rp. 1,2 per bulan, sementara perempuan memperoleh penghasilan yang jauh lebih kecil dimana hampir dua pertiganya memperoleh kurang dari Rp. 400.000 per bulan. Dengan kata lain, penghasilan sangat variatif tergantung sub sektor, dimana tingkat penghasilan terendah diperoleh para pengrajin Batik dan buruh pasir/batu (50-60% di antaranya memperoleh upah kurang dari Rp. 400,000), sementara tingkat penghasilan tertinggi dijumpai pada para pekerja bengkel, warung/restoran, sopir bemo, buruh perikanan, perabot dan tukang parkir.

B. Bentuk-bentuk jaminan sosial yang ada saat ini

Survei ini menjumpai bahwa sekitar 80% dari 2.068 tenaga kerja informal tidak punya jaminan sosial apapun: tidak ada jaminan sosial resmi dan tidak punya jaminan sosial informal tertulis selain dari keluarga: secara signifikan, 90% menjawab keluarga saat ditanya siapa yang akan merawat mereka jika sesuatu terjadi pada mereka. Hanya sedikit yang memberi jawaban lain seperti Musyawarah Desa, asuransi pengemudi dan sumbangan majikan. Walaupun asuransi aktual ini masih kurang, namun ia tentunya tidak menunjukkan kebodohan mereka, karena hampir 60% tenaga kerja informal memang sudah mengetahui tentang program Jamsostek! Korelasi yang menarik dan positif dijumpai antara tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang Jamsostek. Berbagai tingkat pengetahuan tentang sub sektor dapat membantu mentargetkan kegiatan-kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat tentang Jamsostek; dan untuk kawasan Indonesia Timur perlu diberi informasi yang lebih jelas tentang program ini.

80% tenaga kerja informal tidak punya jaminan sosial apapun selain dari keluarga.

Walaupun 80% responden menyatakan mereka belum punya asuransi formal, namun separoh dari keseluruhan responden menyatakan bahwa mereka tidak ingin memperoleh asuransi formal di masa mendatang. Alasan utamanya adalah kurangnya pengetahuan tentang asuransi, tidak mampu, terlalu sibuk, tidak tertarik/tidak merasa perlu. Alasan utama mereka tidak ingin memperoleh asuransi di masa mendatang adalah ketidakmampuan mereka untuk membayar. Tugas perlu difokuskan pada upaya untuk memberi edukasi kepada perempuan karena mereka paling sering mengatakan bahwa mereka tidak punya pengetahuan tentang asuransi daripada laki-laki (50% : 37%). Kegiatan sosial (seperti PKK) dijumpai hanya penting di pedesaan Jawa Tengah dimana hampir 90% tenaga kerja informal adalah anggota PKK.

60% sudah tahu tentang JAMSOSTEK.

C. Permintaan akan jaminan sosial, termasuk keinginan dan kemampuan untuk memberikan kontribusi

Di antara berbagai elemen jaminan sosial, prioritas pertama tenaga kerja informal adalah asuransi kecelakaan kerja (36%). Prioritas kedua adalah asuransi kesehatan pekerja (29%). Jenis asuransi ini berbeda tergantung sub sektor dan daerah sampel; sebagai contoh, di Kupang and Yogyakarta asuransi kecelakaan adalah lebih penting (lebih dari responden), sementara di Jakarta, asuransi kesehatan relatif lebih penting. Namun, bagi tenaga kerja informal perempuan, asuransi kesehatan adalah prioritas nomor satu (31%) sedangkan asuransi kecelakaan adalah nomor dua (25%). Di sini jelas bahwa perbedaan prioritas yang disebutkan responden di 22 sub sektor dapat membantu menargetkan paket khusus untuk kegiatan tertentu. Di samping itu, hasil temuan menarik adalah bahwa asuransi kecelakaan memiliki tingkat prioritas yang lebih rendah dari asuransi-asuransi lain

Prioritas jaminan sosial tenaga kerja informal adalah:

- 1) kecelakaan kerja (36%)
- 2) kesehatan tenaga kerja (29%).

dengan tingkat penghasilan lebih rendah, dan mereka lebih menginginkan pensiun dan tunjangan kesehatan untuk anggota keluarga.

Keinginan responden untuk membayar asuransi secara teratur adalah sangat tinggi yaitu sebesar 80%. Metoda pembayaran yang lebih disukai adalah bulanan. Jumlah yang disebutkan mampu mereka bayar relatif kecil: 64% menyatakan siap membayar antara Rp. 1 sampai 20.000 per bulan. Namun, perlu diingat bahwa ini hanya penawaran awal dan 11% ingin membayar lebih dari Rp. 20.000 per bulan yaitu jumlah yang hampir mencukupi jumlah yang diharuskan program Jamsostek, bahkan di luar porsi yang harus dibayarkan pengusaha. Separoh dari 11% ini adalah pengusaha, dan sebagian besar dari mereka tinggal di Kupang (dimana 30% bersedia membayar > Rp. 20,000). Menurut gender, hanya ada sedikit perbedaan di bagian atas dimana hanya sedikit perempuan yang mau membayar lebih dari Rp. 20.000 per bulan. Secara umum, semakin tinggi penghasilan mereka, maka semakin besar premi yang mau mereka bayarkan. Informasi tentang sub sektor yang ada menunjukkan perlunya menargetkan beberapa paket untuk para pekerja.

80% ingin membayar jaminan sosial secara teratur, setiap bulan

D. Dampak krisis global

54% tenaga kerja informal merasakan dampak krisis terhadap pekerjaan mereka, dan mengetahui kehadiran pekerja sektor formal yang di-PHK dalam pekerjaan mereka. Tidak ada perbedaan signifikan dalam hal status pekerjaan (+/- 5%). Di samping itu, hanya 40% pengusaha informal menemui kesulitan yang lebih besar dalam memperoleh order sejak terjadinya krisis global. Kalangan perempuan secara konsisten memperkirakan dampak krisis yang lebih kecil dari laki-laki yaitu sekitar 10%-basis poin, kecuali dalam hal kehadiran mantan pekerja sektor formal (sekitar 55%). Walaupun diperkirakan kota Jakarta yang lebih terbuka secara global akan menerima dampak yang paling parah, namun perkiraan ini ternyata salah, kecuali dalam hal melonjaknya pekerja yang di-PHK! Tampaknya para pekerja ini mencari peluang kerja alternatif di ibukota. Jawaban yang diberikan berdasarkan sub sektor menyediakan informasi yang menarik tentang adanya 10 sub sektor dimana lebih dari 70% responden menyatakan dampak nyata dari krisis ini; dan hal ini perlu dianalisa lebih jauh.

Di 10 sub sektor, lebih dari 70% responden menyebutkan dampak tertentu dari krisis global

Studi kasus tentang pekerja sektor formal yang di-PHK

Beberapa wawancara telah diadakan terhadap 15 orang pekerja sektor formal yang di-PHK dari beberapa pabrik tekstil, garmen dan perabotan di Jawa Tengah untuk mengetahui dampak krisis global. Dari ke 15 orang pekerja ini di awal tahun 2009, empat di antaranya masih tetap menganggur, sementara lebih dari separohnya (delapan orang) sudah bekerja di sektor informal. Walaupun upah rata-rata ke-15 pekerja tidak berubah jauh, namun tidak adanya jaminan sosial sangat mempengaruhinya: 80% di antaranya kini berupaya kembali ke pabrik asal mereka, dengan harapan dapat kembali mengisi jabatan mereka sebelumnya.

Lebih dari setengah pekerja formal yang ter-PHK berakhir dengan ekonomi informal !

Studi kasus tentang kebijakan daerah yang inovatif di Solo: formalisasi perekonomian informal

Kasus di kota Solo memperlihatkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengelola dinamikanya. Kontribusi perekonomian informal yang semakin meningkat membutuhkan kebijakan pemerintah yang pro masyarakat miskin, yang mengintegrasikan pengelolaan kegiatan informal sebagai bagian dari manajemen kota, dan secara kreatif menghasilkan permintaan pasar dengan memprakarsai kegiatan-kegiatan ekonomi. Formalisasi kegiatan informal menyediakan jaminan sosial bagi tenaga kerja informal. Pemerintah daerah juga berperan strategis dalam memperluas perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja informal dengan memfasilitasi akses ke jaminan sosial Jamsostek, serta membantu pembentukan asosiasi tenaga kerja informal agar pengumpulan premi dapat dilakukan secara lebih mudah.

Rekomendasi Kebijakan: Kegiatan tindak lanjut

Untuk kegiatan tindak lanjut, kita akan menguraikan prinsip, proposal untuk kegiatan tindak lanjut serta peta jalan (*road map*) tentatif yang dijadikan dasar diskusi antar pemangku kepentingan terkait.

A. Prinsip

- *Jumlah* tenaga kerja informal semakin meningkat dan dikarenakan krisis global, jumlahnya relatif semakin meningkat.
- Secara umum, lebih *sulit menjangkau* tenaga kerja informal daripada tenaga kerja formal, yang dapat dijangkau melalui pengusaha terdaftar;
- Oleh karena itu, diperlukan adanya penelitian tentang partisipasi *lembaga perantara*: Kantor cabang Jamsostek di daerah; organisasi pemerintah daerah bekerjasama dengan pemerintah pusat; organisasi kegiatan sosial di tingkat bawah di beberapa daerah tertentu; serikat pekerja 'formal'; skema asuransi mikro; serta meneliti kemitraan inovatif, misalnya perusahaan asuransi komersil, LSM dan koperasi (seperti yang distimulasikan ILO melalui skema bantuan asuransi mikronya).
- Upaya untuk memperluas cakupan tenaga kerja informal harus dilakukan secara bertahap dan dalam *paket-paket yang ditargetkan* bagi tenaga kerja informal: misalnya pelaksanaan bertahap, dan dimulai dari asuransi kecelakaan dan kesehatan.
- *Fleksibilitas* adalah faktor yang penting (berbeda dengan UU SJSN: yang mengharuskan pengambilan semua skema jaminan sosial sekaligus).

Persoalan paralel yang perlu dipertimbangkan adalah:

- Apa yang terjadi setelah diberlakukannya UU SJSN, dan bagaimana hasilnya mempengaruhi tenaga kerja informal?
- Jamsostek akan dikonversi dari PT (untuk memperoleh laba) menjadi sebuah Dana Kepercayaan atau *Trust Fund* (nirlaba), walaupun ia sudah diarahkan untuk menjadi perusahaan nirlaba sejak diberlakukannya UU SJSN tahun 2004.

B. Proposal

Pelajaran untuk JAMSOSTEK:

- Mencari program-program yang fleksibel dan ditargetkan untuk memperluas perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja informal: misalnya beberapa paket untuk berbagai provinsi yang ada.
- Program peningkatan kesadaran masyarakat/program pendidikan (misalnya kawasan Indonesia Timur, dan kalangan perempuan);
- ♦ Menggunakan stasiun radio masyarakat, misalnya Media VHR (yang memiliki jaringan luas mencakup 350 stasiun radio masyarakat yang tersebar di seluruh penjuru negeri); yang dikombinasikan dengan musik yang dirancang secara khusus untuk mempromosikan manfaat jaminan sosial sehingga menjadi instrumen yang sangat tepat.
- Hubungan dengan Depnaker: misalnya inspektur tenaga kerja di Jamsostek dapat meningkatkan efisiensi mereka.
- Meneliti hubungan yang mungkin dengan program-program nasional seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan dua program Transfer Tunai Bersyarat (*Conditional Cash Transfer* = CCT), misalnya mencakup porsi pengusaha terhadap premi jaminan sosial bagi tenaga kerja informal (CCT di Indonesia dianggap ILO-Manila sebagai Praktek Terbaik di Asia dalam memperluas jangkauan jaminan sosial).

Pelajaran untuk ILO:

- Analisa lebih lanjut tentang data 22 sub sektor tersebut, serta penelitian mendalam tentang beberapa sub sektor pilihan.
- Penelitian mendalam tentang kebijakan baru di Solo: khususnya survei tenaga kerja informal untuk mengetahui pendapat dan respon mereka.
- Membuat proposal Proyek Kerjasama Teknis untuk proyek percontohan 2-3 tahun bekerjasama dengan Jamsostek untuk memperluas perlindungan jaminan sosial bagi beberapa sub sektor tertentu yang memiliki potensi dan kemauan untuk mengadopsi jaminan sosial secara cepat. Ini akan membantu jika sub sektor ini memiliki profil yang tinggi dan memperlihatkan dampaknya terhadap kelompok pekerja yang lebih rentan dan/atau yang terabaikan.
- Mendorong pengembangan skema asuransi mikro, misalnya, melalui skema percontohan (lihat Angelini & Hirose 2004).

Momentum yang diciptakan penelitian ini melalui presentasinya di sebuah lokakarya yang diselenggarakan tanggal 17 Juni 2009 kini harus dipertahankan dan diterapkan agar dapat menetapkan beberapa proyek percontohan skala kecil sebagai persiapan dan sebagai fase transisi ke arah proyek skala besar yang didanai lembaga donor selama bertahun-tahun. Proposal proyek-proyek persiapan dan transisional mencakup antara lain:

- 1) Penelitian tentang jenis pemerintah daerah:
 - a. Pemerintah daerah yang bekerjasama dengan pemerintah pusat di bidang jaminan sosial
 - b. Pemerintah daerah yang mengembangkan sistem jaminan sosialnya sendiri
 - c. Pemerintah daerah yang tidak dilibatkan dalam jaminan sosial.

Memilih satu kecamatan dan satu kabupaten untuk ketiga jenis ini serta melakukan penelitian terhadap 6 daerah.

- 2) Investigasi mendalam tentang beberapa sub sektor percontohan bekerjasama dengan Jamsostek guna menetapkan cara nyata untuk memperluas perlindungan jaminan sosial di lapangan serta meneliti peran berbagai jenis organisasi perantara.
- 3) Investigasi tentang kebijakan daerah yang inovatif di Solo guna memformalisasikan perekonomian informal
- 4) Investigasi kualitatif terkait pertanyaan “Siapa yang akan ditugaskan untuk mengumpulkan dana?”

Proyek yang lebih besar ini diharapkan memiliki cakupan yang lebih besar daripada jaminan sosial yang ada sekarang, ini menunjukkan betapa pentingnya persoalan ini. Jaminan sosial diperkirakan akan lebih mudah memberikan layanan apabila dimasukkan dalam sebuah proyek multi-disiplin yang memiliki empat pilar berikut ini: 1) “Melindungi masyarakat yang belum dilindungi”; 2) “Mengelola kelompok masyarakat yang belum dikelola”; 3) “Meningkatkan bisnis informal”; dan 4) “Melibatkan partisipasi pemerintah daerah”.

C. Peta Jalan

Peta Jalan perlu dirancang agar mencakup antara lain: Studi kelayakan; proyek percontohan; penyusunan secara seksama langkah-langkah yang diperlukan untuk mencakup secara universal jaminan sosial sebagaimana yang ditetapkan UUD dimana pemerintah bertanggung-jawab di dalamnya; pilihan transisi; pengembangan kapasitas lembaga pelaksana; dan peningkatan kesadaran masyarakat dan visibilitas

Pendanaan upaya memperluas cakupan jaminan sosial juga perlu dimasukkan dimana beberapa sumber pendanaan berikut ini perlu dipertimbangkan: APBN; pajak (kenaikan harga BBM); dana bantuan atau *out-of-pocket*, dana kontributor; dana tanggung-jawab sosial perusahaan (CSR) Jamsostek; dan lembaga donor. Keteraturan dan kelangsungan pendanaan juga perlu dipertimbangkan secara seksama.

1

Latar Belakang dan Tujuan

“Hanya satu dari lima orang di dunia hari ini memiliki jaminan sosial yang memadai”, Direktur Jenderal ILO Juan Somavia. “Lebih dari itu, separuh penduduk dunia tidak memiliki cakupan jaminan sosial dalam bentuk apapun. Kita memiliki keinginan, dan saatnya harus mencari jalan, untuk memberikan lebih banyak orang dengan jaminan sosial yang dibutuhkan untuk bertahan dan lebih sejahtera”.¹

1.1 Konteks internasional

Perlindungan jaminan sosial ditetapkan secara jelas dalam konvensi-konvensi ILO (lihat Boks 1). Jaminan sosial sudah ditetapkan sebagai **hak asasi manusia** yang mendasar sejak tahun 1944.² Namun, hanya sebagian kecil penduduk yang sebenarnya menikmati hak ini:³

- Hanya 20 persen penduduk dunia yang sudah memiliki jaminan sosial yang memadai;
- Lebih dari separohnya belum memiliki perlindungan jaminan sosial sama sekali.
- Di sebagian besar negara industri, jaminan ini sudah mencakup hampir 100% (walaupun peningkatan informalisasi pekerjaan mengakibatkan berkurangnya level cakupan jaminan ini, terutama di negara-negara yang sedang mengalami transisi ekonomi).
- Republik Korea telah meningkatkan perlindungan asuransi kesehatannya dari 20 persen di tahun 1977 menjadi 100% tahun 1989.

Boks 1: Definisi Jaminan sosial

Jaminan sosial adalah perlindungan yang diberikan masyarakat kepada individu dan rumah tangga untuk memastikan akses ke layanan kesehatan dan menjamin keamanan penghasilan, khususnya dalam hal hari tua, pengangguran, sakit, invaliditas, cedera akibat pekerjaan, persalinan atau hilangnya pencari nafkah (ILO 2001).

1 http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Press_releases/lang--en/WCMS_005285/index.htm).

2 Deklarasi Philadelphia ILO (1944) dan Rekomendasi Jaminan Penghasilannya, 1944 (No. 67).

3 Lihat situs web ILO: *Facts on Social Security*.

Berbagai standar minimum yang ditetapkan ILO tampaknya relatif tinggi dan sulit dicapai sekaligus (lihat Boks 2).

Setelah pemerintahan dilibatkan secara langsung dalam jaminan sosial, maka hal ini akan menjadi bagian dari diskusi tentang jaring pengaman sosial. Publikasi Bank Dunia baru-baru ini tentang persoalan ini (Grosh et al. 2008) membedakan beberapa jenis jarring pengaman: 1) transfer tunai (bersyarat dan tanpa syarat), 2) transfer dalam bentuk barang, 3) subsidi harga, 4) pembebasan bea, dan 5) tugas publik.

Boks 2:

Konvensi ILO No. 102 tahun 1952 tentang (Standar Minimum) Jaminan Sosial

Konvensi ILO No. 102 tahun 1952 tentang (Standar Minimum) Jaminan Sosial merupakan pelopor dari semua Konvensi ILO tentang jaminan Sosial, karena Konvensi ini merupakan instrumen internasional satu-satunya, berdasarkan prinsip jaminan sosial mendasar, yang mengatur tentang standard upah minimum yang disepakati di seluruh dunia untuk keseluruhan sembilan bagian jaminan sosial. Bagian-bagian ini adalah:

- 1) layanan kesehatan; 2) tunjangan sakit; 3) tunjangan pengangguran;
- 4) tunjangan hari tua; 5) tunjangan cedera kerja; 6) tunjangan keluarga;
- 7) tunjangan persalinan; 8) tunjangan invaliditas; dan 9) tunjangan untuk ahli waris.

Walaupun Konvensi ILO No. 102 mencakup semua bagian, namun ia mengharuskan hanya tiga bagian yang perlu diratifikasi Negara anggota, yang memungkinkan adanya perluasan secara bertahap atas perlindungan jaminan sosial oleh Negara-negara yang meratifikasinya).

Mengatur porsi pengusaha dalam jaminan sosial sebenarnya juga merupakan upaya pembebasan biaya. Publikasi lain dari Bank Dunia yang cukup berpengaruh (Fiszbein et al. 2009) menyatakan bahwa ada dua tujuan nyata dari program-program CCT yaitu:

- 1) Menyediakan basis konsumsi minimal untuk masyarakat miskin.
- 2) Dalam menetapkan transfer bersyarat, ia berupaya mendorong adanya akumulasi permodalan manusia, dan memecahkan siklus kemiskinan yang berlangsung dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Publikasi ini menegaskan kutipan Hiroshi (2008) yang menyatakan bahwa jaminan sosial tidak boleh dianggap sebagai pembiayaan, tapi sebagai sebuah investasi di bidang permodalan manusia yang mengarah pada produktivitas yang lebih besar.

Dalam kerangka '*Global Campaign on Social Security and Coverage for All*' ILO, sebuah penelitian komprehensif menunjukkan bahwa negara-negara berpenghasilan rendah mampu membiayai "jaminan sosial mendasar" (ILO 2008a). Jaminan ini adalah cara yang efektif untuk mengurangi kemiskinan, mendorong adanya kesetaraan serta membantu stabilitas ekonomi dan sosial. 'Basis Jaminan Sosial yang Mendasar' merupakan bagian dari konsep *Global Social Floor* yang dipromosikan secara inter alia oleh *World Commission on the Social Dimension of Globalization* tahun 2004. Konsep ini terdiri dari serangkaian jaminan sosial yang mendasar dan sederhana – yang dilaksanakan melalui transfer sosial dalam bentuk uang tunai maupun barang – untuk semua masyarakat guna memastikan bahwa pada akhirnya nanti:

- Semua warga negara memiliki akses ke tunjangan kesehatan yang mendasar dan penting melalui mekanisme pelaksanaan yang bersifat pluralistik dimana Negara menerima tanggung jawab secara umum untuk memastikan kelayakan sistem pelaksanaan dan pendanaannya;

- Semua anak menikmati jaminan penghasilan minimal di tingkat kemiskinan melalui berbagai tunjangan keluarga/anak yang dimaksudkan untuk memfasilitasi akses ke nutrisi, pendidikan dan perawatan;
- Sebagian bantuan penghasilan yang ditargetkan diberikan bagi masyarakat miskin dan pengangguran dalam kelompok usia aktif;
- Semua warganegara yang berusia lanjut atau yang menyandang cacat dapat menikmati jaminan penghasilan minimal di tingkat kemiskinan melalui pensiun untuk hari tua, disabilitas dan keselamatan (survivor).

Oleh karena itu, Basis Jaminan Sosial yang Mendasar terdiri dari serangkaian transfer sosial mendasar yang penting dalam bentuk uang tunai maupun barang bagi semua masyarakat. Basis ini dirumuskan sebagai serangkaian jaminan dan bukan tunjangan yang telah ditetapkan. Hal ini memungkinkan adanya opsi yang terbuka bagi masing-masing negara untuk mewujudkan jaminan ini melalui sarana transfer yang sudah diuji, bersyarat atau universal. Fakta pentingnya adalah bahwa setiap orang dalam masyarakat dapat mengakses transfer penting ini. Walaupun secara konseptual, ia merupakan bagian dari struktur jaminan sosial di negara tersebut, namun di sebagian besar negara, tunjangan yang diberikan kemungkinan besar memiliki karakteristik bantuan sosial dan bukan tunjangan jaminan sosial. Dapat diasumsikan disini bahwa kemungkinan besar tunjangan mendasar/rendah ini didanai dari pajak masyarakat. Transfer basis sosial dijamin bagi semua warganegara sebagai hak, sehingga pendanaan mereka secara umum merupakan tanggungjawab masyarakat secara keseluruhan. Di sisi lain, tunjangan jaminan sosial biasanya merupakan hasil dari hak-hak yang diperoleh dari pembayaran kontribusi atau pajak dan biasanya sebagai pengganti penghasilan

Semua negara punya beberapa bentuk jaminan sosial tapi hanya sedikit saja, di luar anggota Uni Eropa (EU) atau anggota *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) berpenghasilan tinggi, yang menyediakan basis jaminan sosial mendasar untuk semua orang. Alasan umum dari kurangnya perlindungan sosial ini adalah kurangnya pemahaman tentang manfaat permodalan manusia, kapasitas teknis yang terbatas, kurangnya sumber daya serta kurangnya kemauan politik. Hal ini perlu segera diatasi. Pandangan tentang Basis Jaminan Sosial yang mendasar perlu diterjemahkan secara bertahap menjadi standar yang disepakati secara internasional lalu dimasukkan dalam ketentuan perundang-undangan nasional. Secara khusus, hasil-hasil penelitian dan pengalaman ILO serta pengalaman lembaga-lembaga pembangunan yang lain menunjukkan bahwa prasyarat penting untuk melaksanakan Basis Jaminan Sosial yang Mendasar di negara-negara berkembang adalah memastikan bahwa pemerintah dan para pemangku kepentingan lain memahami bahwa mereka mampu melaksanakan ini secara fiskal dan tidak tidak memiliki beban biaya ekonomi yang substansial.

Strategi dan Sarana untuk Mengatasi Eksklusi Sosial dan Kemiskinan (STEP)

STEP merupakan program global dari Departemen Jaminan Sosial ILO yang difokuskan untuk masyarakat miskin dan penduduk yang tidak dilibatkan di sektor perekonomian informal dan di pedesaan. STEP menangani dua bidang yang saling terkait satu sama lain:

- Perluasan perlindungan jaminan sosial di bidang kesehatan, dan
- Pendekatan terpadu untuk mengatasi eksklusi sosial di tingkat lokal.

Dari berbagai upaya pendekatan yang diprakarsai STEP, skema perlindungan sosial berbasis pengembangan masyarakat (seperti asuransi mikro, lembaga kesehatan bersama, dan lain-lain) telah dianggap sebagai perspektif yang menjanjikan bagi masyarakat miskin yang tidak dilibatkan dalam sistem-sistem formal khususnya di negara-negara yang paling kurang berkembang. STEP juga telah menciptakan satu platform elektronik yang inovatif (CIARIS), yang menghubungkan masyarakat, ahli dan sumber daya agar lebih mampu mengatasi eksklusi sosial dan kemiskinan. Situs web program ILO/STEP mencakup berbagai publikasi yang dapat di-download secara gratis, penjelasan tentang kegiatan-kegiatan di lapangan, serangkaian sarana yang terkait dengan penyusunan dan pelaksanaan skema-skema asuransi mikro serta akses langsung ke *Learning and Resources Centre on Social Inclusion* (CIARIS).

1.2 Konteks Nasional

“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu.”

(UUD 1945, pasal 34, ayat 2)

Selama bertahun-tahun ILO mendukung pengembangan jaminan sosial di Indonesia. Secara khusus, mulai tanggal 1 April 2001 sampai dengan 31 Desember 2002, ILO melaksanakan proyek bantuan teknis “Restrukturisasi Sistem Jaminan Sosial” (INS/00/M04/NET) yang didanai Pemerintah Belanda. Hasil temuan utama dan rekomendasi dari proyek sudah disajikan melalui sebuah publikasi yang komprehensif (ILO 2003). Sebagai tindak lanjut atas proyek ini, ILO mengadakan sebuah penelitian tentang perekonomian informal di perkotaan dan pedesaan sebagaimana disampaikan dalam Kertas Kerja yang disusun Angelini dan Hirose (2004). Penelitian saat ini telah memberikan manfaat yang sangat besar. Namun perlu disimpulkan bahwa tidak banyak hal yang dilakukan sejak tahun 2004. Tahun 2004 adalah tahun dimana UU SJSN diproklamkan; dan ILO banyak dilibatkan dalam penyusunan UU tersebut namun sejak saat itu, tidak banyak yang dapat dilakukan. Hanya di akhir tahun 2008/awal tahun 2009, Presiden akhirnya mengangkat Dewan JSN, yang kini perlu melaksanakan beberapa langkah mendesak karena UU ini akan berakhir bulan September 2009.

1.2.1 Perekonomian informal

Terdapat berbagai definisi tentang perekonomian informal (ILO 2007). Badan Pusat Statistik (BPS) telah menyusun definisi pekerjaan berdasarkan kombinasi status jabatan dan pekerjaan yang utama (lihat Tabel 1.1). Tabel ini adalah dasar beberapa data yang disediakan di bawah ini. Akan tetapi, sebagai mana diindikasikan oleh Angelini & Hirose (2004), definisi ini tidak memungkinkan kita melakukan perbandingan dalam waktu yang bersamaan dan oleh karenanya definisi lain berdasarkan status pekerjaan juga digunakan khususnya untuk keperluan ini.

Tabel 1.1: Definisi Pekerjaan Informal BPS

Status Pekerjaan Utama	Pekerjaan Utama									
	Pekerja Teknis Profesional & yg terkait	Pekerja Administratif & Manajerial	Klerk & Pekerja Terkait	Pekerja Pemasaran	Pekerja Jasa	Pekerja bidang Agrikultur	Pekerja Produksi	Operator	Buruh	Lain-lain
Bekerja sendiri	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Bekerja sendiri dibantu oleh keluarga atau pekerja tidak tetap	F	F	F	F	F	INF	F	F	F	INF
Pengusaha	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Pekerja	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Pekerja Lepas di bidang Agrikultur	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Pekerja lepas non Agrikultur	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Pekerja tdk dibayar	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF

Definisi BPS

Survei (BPS/SAKERNAS 2008) terakhir menunjukkan bahwa hampir 70% tenaga kerja bekerja di sektor perekonomian informal. Dengan definisi BPS ini, ada 61.3% pekerja yang diklasifikasikan sebagai informal pada tahun 2008. Tabel 1.2. mengindikasikan bahwa persentasi pekerja informal turun dari angka 2006 atau 62.8%, meskipun jumlah angka absolut pekerja informal telah meningkat hampir 3 juta pekerja. Pada waktu yang bersamaan, pekerja formal meningkat baik dalam persentasi dan angka (lebih dari 4.2 juta)

Tabel 1.2: Pekerja Informal tahun 2006 s.d. 2008 (Definisi BPS)

	2006		2007		2008	
	Pekerja	%	Pekerja	%	Pekerja	%
Pekerja Formal	35,511,090	37.20	37,839,250.00	37.90	39,729,948.00	38.70
Pekerja Informal	59,945,845	62.80	62,090,967.00	62.10	62,822,802.00	61.30
Total	95,456,935	100.00	99,930,217.00	100.00	102,552,750.00	100.00

Sumber: BPS, Sakernas (2008)

Status pekerjaan

Angelini dan Hirose (2004: 9-10) telah melakukan kompilasi definisi yang berbeda atas "informal" berdasarkan "status pekerjaan", data yang tersedia pula dalam Sakernas 2008. Kami menggunakan definisi disini hanya untuk dapat melakukan perbandingan dengan data tahun 2001 dan 2003. Tabel 1.3 di bawah berikut ini mengindikasikan bahwa jumlah pekerja meningkat tajam antara tahun 2003 dan 2008 hampir lebih 12 juta pekerja, atau meningkat sekitar 13%. Sebagian besar peningkatan ini diserap oleh ekonomi informal (7.1 juta atau 60.4%). Di samping itu, kamu perlu menyimpulkan bahwa pekerja formal juga telah meningkat jumlahnya secara substansial antara tahun 2001 sampai 2008 (4.4 juta atau naik 37%), sedangkan antara tahun 2001 dan 2003, terjadi penurunan. Krisis moneter yang terjadi di Asia menimbulkan peningkatan pangsa pekerja informal, namun dari tahun 2003 sampai kini, jumlah ini berkurang menjadi 69.6%. Krisis global mungkin juga berdampak pada pangsa pekerja informal ini.

Tabel 1.3: Jumlah pekerja di sektor perekonomian formal dan informal di Indonesia (x 1.000)

Status pekerjaan	2001	%	2003	%	2008	%
Pengusaha di sektor perekonomian formal	2.788	3,1	2.707	3,0	3.015	2,9
Pekerja di sektor perekonomian formal	26.578	29,3	23.828	26,2	28.184	27,5
Perekonomian Informal	61.435	67,7	64.243	70,8	71.352	69,6
Jumlah	90.801	100,0	90.778	100,0	102.551	100,0

Sumber: Data tahun 2001 & 2003: Angelini & Hirose (2004); 2008 Data: BPS, SAKERNAS (2008).

Angelini dan Hirose (2004) secara meyakinkan telah memperlihatkan bahwa koordinasi adalah faktor yang penting karena 11 kementerian terlibat dalam kegiatan dan proyek terkait perekonomian informal di samping pemerintah daerah provinsi dan kabupaten.

Kami akan memberi perhatian khusus pada dimensi gender karena partisipasi perempuan yang sangat minim dalam pasar tenaga kerja, pengangguran dan terutama setengah pengangguran (lihat Tabel 1.4).

Tabel 1.4: Karakteristik tenaga kerja tertentu menurut gender

2007	Perempuan	Laki-laki
Tingkat partisipasi angkatan kerja	50 %	> 80%
Tingkat pengangguran	11.8%	8.5%
Tingkat setengah pengangguran	41.3%	25.1%

(Sumber: ILO/Jamsostek, Juli 2008).

1.2.2 Jaminan Sosial

UUD 45 menegaskan bahwa setiap warganegara berhak atas jaminan sosial dan menekankan peran negara dalam menyediakan jaminan sosial yang bersifat universal. Seperti yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, sekitar 70% pekerja di Indonesia tahun 2008 bekerja di sektor perekonomian informal. Sebagian besar tenaga kerja informal ini bekerja di pedesaan (sekitar dua per tiga bekerja di sektor pertanian), tapi hal ini semakin menjadi fenomena di perkotaan (ILO 2008). Ini menunjukkan pentingnya jaminan sosial bagi tenaga kerja informal, dan ILO serta Jamsostek telah memberikan perhatian khusus pada persoalan ini (ILO/Jamsostek 2008).

Perlu diakui bahwa ada serangkaian metoda dan pendekatan untuk memperluas perlindungan jaminan sosial, berdasarkan tiga dimensi, yaitu manusia, segala kemungkinannya (sakit, persalinan, kecelakaan kerja menganggur, invaliditas, hari tua dan kematian pencari nafkah), serta tingkat manfaatnya (lihat Van Ginneken 2008). Variasi ini biasanya merupakan hasil dari kondisi ekonomi dan politik yang berbeda dan sejarah yang telah dialami suatu negara tertentu. Untuk memperluas jaminan sosial, prioritasnya diberikan pada upaya untuk memperluas cakupan jaminan pribadi dan kontinjensi yang paling relevan dengan kelompok-kelompok yang tidak dicakup sistem yang ada.

Perusahaan Negara PT JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) didirikan tahun 1992, berdasarkan UU No. 3, di bawah naungan Depnakertrans (lihat Gambar 1.1). Skema ini menyediakan

perlindungan dasar di sektor formal untuk para pekerja yang dicakup oleh skema ini, yaitu mereka yang membayar premi yang ditetapkan Depnakertrans. Skema ini menyediakan tunjangan kesehatan, simpanan hari tua, tunjangan kematian, tunjangan kecelakaan kerja dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan.

Pada tahun 2006, skema Jamsostek juga disediakan bagi tenaga kerja informal melalui UU No. 24 tahun 2006. UU ini menetapkan secara rinci berapa besar premi yang perlu dibayar pekerja pada tingkat upah tertentu untuk setiap tunjangan yang disebutkan di atas dan UU ini juga menetapkan berapa besar tunjangan yang akan diterima untuk setiap situasi yang ada. Pada bulan Mei 2008, UU ini sudah diperbaharui dan dipublikasikan melalui selebaran (leaflet).

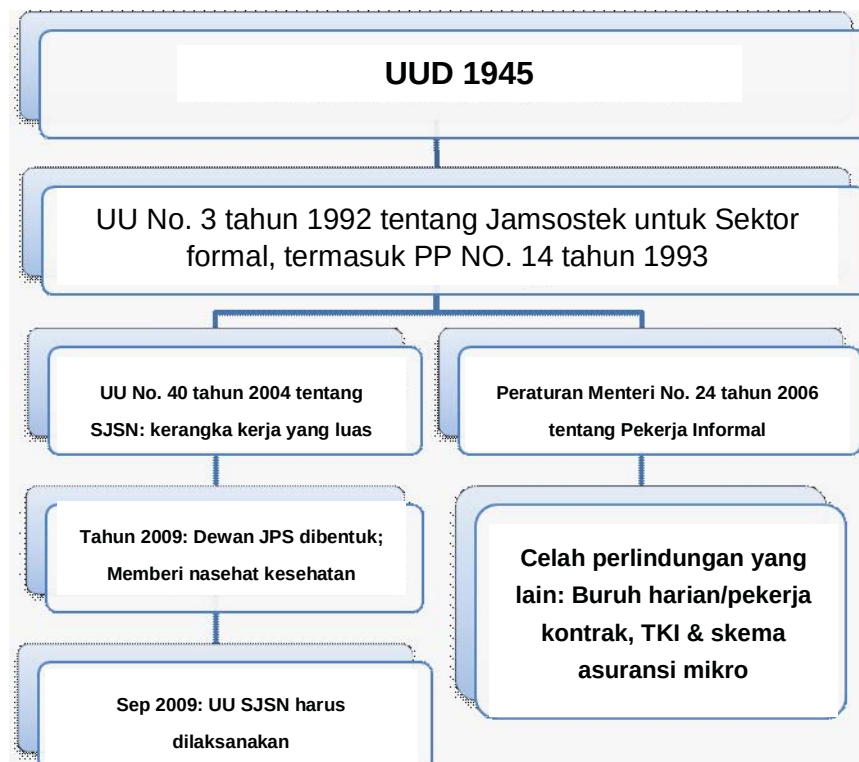
Di Indonesia, ada empat jenis jaminan sosial yang sebagian besar dimaksudkan untuk para pekerja di sektor perekonomian formal (baca Angelini dan Hirose, 2004):

- I. JAMSOSTEK: Dana untuk pengusaha sektor swasta serta karyawannya. Ada empat program: kecelakaan kerja, kematian, asuransi kesehatan, dan dan yang serupa dengan tunjangan hari tua.
- II. TASPEN: Dana untuk pegawai negeri (pensiunan).
- III. ASKES: Asuransi kesehatan untuk para pekerja di sektor publik.
- IV. ASABRI: Dana untuk anggota TNI dan Polri (pensiunan).

Sejak tahun 2005, sebuah skema baru ditambahkan yaitu yang terkait dengan kesehatan:

- V. Jamkesmas (sebelumnya Askeskin): Layanan kesehatan untuk masyarakat miskin: yang berjumlah 76 juta jiwa.

Gambar 1.1: UU dan peraturan utama terkait jaminan sosial di Indonesia



Di awal tahun 2008, skema ini belum mencakup separoh pekerja di sektor perekonomian formal (47%), dan hanya mewakili sekitar 17% total pekerja di negeri ini. Yang belum dicakup di sektor formal adalah:

- Perusahaan yang memiliki kurang dari 10 orang pekerja atau dengan upah kerja bulanan lebih dari 1 juta Rupiah.
- Pekerja kontrak
- Pekerja harian
- TKI.

Alasan di balik tingkat penetrasi asuransi sosial yang relatif rendah di sektor perekonomian formal swasta adalah (lihat ILO/Jamsostek, Juli 2008):

- 1) Secara hukum, hanya perusahaan dengan 10 orang pekerja atau lebih atau dengan upah lebih dari Rp. 1 juta per bulan yang diharuskan mendaftarkan pekerja mereka di Jamsostek.
- 2) Kurangnya pernyataan (under-declaration) tentang upah kontributor, misalnya hanya melapor gaji pokok saja.
- 3) Pasal yang hilang tentang asuransi kesehatan dari Jamsostek ke sebuah asuransi swasta yang menyediakan tunjangan lebih besar.
- 4) Jamsostek tidak punya inspektur di bawah kendalinya untuk memastikan skema ini dipatuhi.
- 5) Asuransi memiliki citra yang kurang menguntungkan di mata pekerja.

Dalam *perekonomian informal*, hanya sekitar 105.000 tenaga kerja informal (misalnya nelayan dan petani) yang dicakup skema ini, atau sekitar 0,15 % dari 71 juta pekerja tahun 2008. Target yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2008 terlalu ambisius: 2,5 juta pekerja baru di sektor formal dan 150.000 tenaga kerja informal baru harus dicakup oleh skema Jamsostek. Koperasi milik negara ini bersifat swadaya dalam arti semua dana berasal dari premi yang dibayar pekerja dan pengusaha.

Pengusaha swasta maupun publik, banyak memberikan kontribusi mereka pada premi untuk para pekerja; dalam skema Jamsostek pengusaha membayar hingga 11,2% sementara pekerja hanya 2% dari upah mereka. Namun, tenaga kerja informal harus membayar semuanya sendiri, yaitu hingga 13,2 % dari upah bulanan rata-rata mereka.

Di bidang asuransi kesehatan, cakupannya paling luas:

- 18,7 juta jiwa (Askes: 15,6 juta jiwa, sedangkan Jamsostek: 3,1 juta).
- JAMKESMAS (dahulu ASKESKIN): layanan kesehatan primer dan asuransi kesehatan untuk keluarga miskin: Target program ini untuk tahun 2007 adalah 76,4 juta jiwa.
- Secara kolektif: 95,1 juta jiwa atau 43,2 % dari 220 juta total penduduk di Indonesia.

Berikut ini adalah ringkasan beberapa masalah utama yang dihadapi Jamsostek:

- i. Anggota sukarela mengakibatkan rasio klaim yang tinggi.
- ii. Kapasitas administratif untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan non-standar tenaga kerja informal perlu ditingkatkan.
- iii. Kurangnya sumber daya di kantor cabang untuk memperluas jaminan sosial bagi tenaga kerja informal.

- iv. Perluasan hingga ke tenaga kerja informal membutuhkan adanya saluran distribusi baru dimana dibutuhkan lembaga perantara antara para anggota dengan Jamsostek. Arus pekerjaan antara ketiga pihak ini belum lancar. Untuk itu, dibutuhkan adanya evaluasi lebih lanjut.

Persoalan pemerintah daerah, desentralisasi dan devolusi akan dibahas dalam Bab 7, di samping studi kasus tentang kebijakan daerah yang inovatif di Solo untuk memformalisasikan perekonomian informal.

Dokumen ini menunjukkan bahwa ada juga beberapa jenis jaminan sosial yang informal, seperti pengaturan informal yang disediakan kontraktor tenaga kerja (yaitu Mandor), asosiasi informal dan/atau swadaya masyarakat (misalnya Arisan dan Gotong Royong), solidaritas bersama, dan lain-lain. Menurut Agelini & Hirose (2004: 14) jaring pengaman sosial informal di Indonesia disebut sebagai “kebijaksanaan lokal.” Sebagian contoh yang mereka berikan adalah:

“Inisiatif lain dari masyarakat antara lain adalah kegiatan petani dalam menyimpan sebagian hasil panen mereka di lumbung masyarakat setempat. Hasil panen ini kemudian dapat dipinjam oleh anggota masyarakat yang kekurangan bahan makanan, dan membayar kembali di saat musim panen. Hal ini dapat dianggap sebagai analog untuk membentuk asuransi mikro. Praktek serupa dalam menyisihkan sebagian hasil atau pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan para anggota menghadapi kendali terutama di antara kelompok nelayan tradisional dan bahkan tukang becak di perkotaan.”

Publikasi 2004 yang diadakan ILO (Angelini & Hirose, 2004), setelah melaksanakan beberapa penelitian tentang perekonomian informal di kota dan desa, mengusulkan adanya kombinasi di antara ketiga pilihan kebijakan berikut ini:

- 1) Memperluas kegiatan wajib jaminan sosial yang ada, terutama mengganti Peraturan Pemerintah tahun 14 tahun 1993 oleh Jamsostek yang membatasi perusahaan di sektor formal yang memiliki 10 orang pekerja atau upah bulanan Rp 1 juta.
- 2) Menciptakan skema khusus bagi tenaga kerja di sektor perekonomian informal karena peraturan dan struktur pendanaan yang ada membatasi mereka. Jamsostek dianjurkan untuk mengembangkan beberapa peraturan pemerintah seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 (2) UU No.3 tahun 1992. Ia juga dianjurkan untuk mengadakan skema percontohan swadaya berbasis wilayah secara besar-besaran.
- 3) Mendorong pengembangan beberapa skema asuransi mikro: tipe Grameen berbasis kelompok dianggap sebagai alternatif sementara yang baik untuk cakupan pemerintah berskala penuh. Sebuah skema percontohan diusulkan.

Opsi-opsi menarik ini akan dianalisa dalam penelitian sekarang dan diuji secara realita, bersama para pekerja, otoritas terkait dan ILO.

Dalam artikelnya yang berjudul “Covering the Uncovered” (Tauvik, 2008) mengidentifikasi beberapa masalah yang mungkin akan dihadapi dalam menyediakan asuransi sosial bagi tenaga kerja informal, misalnya penghasilan yang rendah dan tidak teratur dari sebagian besar tenaga kerja informal; tingkat dan jenis tunjangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan sumberdaya di sektor perekonomian informal; kurangnya kesadaran masyarakat tentang konsep asuransi sosial; serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintah.

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan menyeluruh dari survei ini adalah untuk menilai kelayakan upaya memperluas jaminan sosial bagi tenaga kerja di sektor perekonomian informal serta menganalisa keterkaitan antara jaminan sosial dengan perekonomian informal agar dapat lebih ditargetkan dan menjangkau tenaga kerja informal agar dapat mengidentifikasi secara rinci:

- 1) Permintaan (atau pasar) jaminan sosial, sehingga mengarah pada penilaian potensi upaya ini, agar dapat mentargetkan paket-paket jaminan sosial bagi tenaga kerja informal;
- 2) Menentukan mekanisme penyesuaian tenaga kerja informal *vis-a-vis* tidak adanya jaminan sosial, termasuk jenis mekanisme penyesuaian secara informal, serta jenis bantuan jaminan sosial formal (Jamsostek, CCT/UCT, NGEP).
- 3) Menilai dampak krisis keuangan global saat ini terhadap perekonomian informal, yang mengakibatkan banyaknya pekerja sektor formal yang di-PHK.

Berdasarkan analisa ini, beberapa proposal akan dirancang untuk ditindaklanjuti.

Untuk mengetahui tingkat permintaan akan jaminan sosial dan menentukan mekanisme penyesuaian yang ada (Tujuan 1 dan 2), kita perlu meneliti pendapat tenaga kerja informal itu sendiri terkait jaminan sosial seperti yang disediakan Jamsostek, untuk mengetahui antara lain:

- Minat mereka terhadap paket-paket jaminan sosial ini,
- Preferensi mereka tentang paket jaminan sosial tertentu,
- Keinginan mereka untuk membayar paket ini, dan
- Kemampuan mereka untuk membayar paket ini.

Hal ini telah dilakukan melalui survei sampel tenaga kerja informal. Tujuan 3 tentang dampak krisis global saat ini terhadap perekonomian informal, sudah dilakukan melalui dua sudut pandang: pendapat tenaga kerja informal, serta pendapat beberapa responden pekerja di sektor formal yang di-PHK yang kemudian masuk ke sektor perekonomian informal. Untuk tenaga kerja informal, hal ini telah dilakukan melalui survei tersebut di atas, sementara untuk pekerja di sektor formal yang di-PHK, beberapa studi kasus telah dilaksanakan. Bab berikut ini menyediakan informasi rinci tentang metodologi yang diterapkan.

2

Metodologi

Metodologi yang digunakan untuk penelitian ini mencakup wawancara dengan pemangku kepentingan yang utama, survei terhadap tenaga kerja informal, studi kasus tentang pekerja sektor formal yang di-PHK, dan studi kasus tentang kebijakan daerah yang inovatif di Solo untuk memformalisasi perekonomian informal.

2.1 Wawancara dengan pemangku kepentingan yang utama

Serangkaian wawancara telah diadakan oleh konsultan selama penugasan ini dengan para pemangku kepentingan yang utama, termasuk perwakilan ILO Jakarta, PT JAMSOSTEK (kantor pusat di Jakarta serta beberapa kantor cabang di Jawa Tengah dan Kupang), Depnakertrans, Biro Pusat Statistik (BPS), serikat pekerja dan LSM pekerja, CEMSED Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, dan beberapa lembaga donor di Jakarta, termasuk Bank Dunia dan GTZ. Di samping itu, beberapa link telah dilakukan dengan beberapa proyek yang ada yang beroperasi di daerah-daerah terkait, seperti Program PRT ILO, Proyek TKI ILO, dan Sekretariat ASEAN *Social Security Association* (ASSA) di Singapura. Dokumen terkait yang sudah diteliti tercantum dalam Lampiran 8.

2.2 Survei tenaga kerja informal

Konsultan telah merancang sarana survei mendasar yang terdiri dari kuesioner 5 halaman pada akhir bulan April/awal Mei 2009. Setelah membahasnya dengan para pemangku kepentingan yang utama, yaitu ILO dan Jamsostek, beberapa wawancara percobaan diadakan dan kuesioner diselesaikan. Konsultan nasional kemudian menterjemahkannya ke dalam Bahasa Indonesia. Versi bahasa Inggris dimasukkan sebagai Lampiran 1. Koordinator nasional telah menyusun sebuah buku peraturan dalam bahasa Bahasa Indonesia untuk digunakan para koordinator, pewawancara dan prosesor data.

Pemilihan Daerah Sampel dan (Sub)Sektor

Pemilihan daerah sampel dilakukan bekerjasama secara erat dengan dua pemangku kepentingan yang utama (dan sudah diuraikan dalam Kerangka Acuan penelitian ini). Keempat daerah yang dipilih adalah:

- Jawa Tengah (*hanya daerah pedesaan*)
- Jakarta (daerah pertumbuhan yang utama)
- Yogyakarta (jenis kegiatan informal tradisional)
- Kupang (kawasan Indonesia Timur).

Pemilihan ini mencakup daerah perkotaan dan pedesaan, serta daerah sampel di pulau Jawa maupun kawasan Indonesia Timur. Atas alasan praktis, tidak mungkin mencakup daerah-daerah lain (misalnya Sumatera), terutama karena faktor waktu: penelitian ini dimaksudkan sebagai *katalisator* untuk proyek dan program jangka panjang yang terkait dengan jaminan sosial, dan oleh karena itu tujuannya adalah untuk melakukan analisa data dan menyajikan hasil-hasilnya dalam sebuah lokakarya yang sudah diadakan di Jakarta pada pertengahan bulan Juni 2009. Sehingga keseluruhan penelitian berlangsung selama *kurang dari dua bulan!*

Dikarenakan beraneka ragamnya jenis kegiatan di sektor perekonomian informal, pemilihan (sub) sektor menjadi tugas yang rumit. Di sisi lain upaya untuk menetapkan tingkat perwakilan dan di sisi lain, partisipasi kegiatan-kegiatan yang paling penting, dapat dengan mudah menimbulkan banyaknya kegiatan wawancara yang tidak dapat dikelola dengan baik. Oleh karena itu, beberapa sub sektor perlu ditekan sedikit mungkin untuk masing-masing daerah percontohan. Kerangka Acuan untuk penelitian saat ini menetapkan kriteria yang akan digunakan, selain dari dimensi gender:

- 1) Keterwakilan;
- 2) Partisipasi kegiatan yang paling penting di masing-masing daerah;
- 3) Perwakilan pekerja perempuan;
- 4) Kerentanan relatif para pekerja: terhadap kecelakaan, bahaya lingkungan dan eksploitasi;
- 5) Meningkatkan kapasitas untuk melakukan penyuluhan, visibilitas dan kesadaran masyarakat tentang program ini, misalnya ‘*quick wins*’: peserta/inovator pelopor, kelompok usaha kecil, PRT, dan TKI⁴;
- 6) Perwakilan berbagai sektor ekonomi (manufaktur, jasa dan perdagangan); serta
- 7) Representasi status pekerjaan (wiraswasta, pekerja yang bekerja di rumah, karyawan, dll.).

Ia disajikan dalam bentuk tabel pada Lampiran 3. Sektor-sektor ekonomi yang utama ini dipilih menggunakan data SAKERNAS terbaru (BPS 2008); data-data ini diringkas dalam beberapa tabel pada Lampiran 4. di samping itu, SAKERNAS juga memberi indikasi tentang tingkat kepentingan

4 Terkait TKI, ILO/Jamsostek (2008) telah melakukan referensi khusus dan menghubungkannya dengan kebijakan ASEAN: “Dalam kerangka kedua proyek regional (UE dan Jepang) untuk meningkatkan Rencana Aksi ILO terkait Migrasi Pekerja di kawasan Asia dan Pasifik, beberapa langkah dapat dilakukan untuk memperluas perlindungan sosial bagi TKI bekerjasama dengan Negara-negara ASEAN dan ASEAN Social Security Association (ASSA). Proyek terkait TKI ini diharapkan mampu mengatasi masalah pengiriman uang (kontribusi jaminan sosial), reintegrasi TKI yang dipulangkan (yang terkait dengan proyek pengembangan usaha kecil).”

relatif dari berbagai status pekerjaan dan indikasi telah dipertimbangkan dalam memilih sub sektor (misalnya sektor-sektor dimana pekerja rumahan relatif penting).

Berdasarkan tabel ini, pemilihan akhir dilakukan di lapangan, bekerjasama dengan empat orang koordinator di daerah sampel yang paling banyak memiliki informasi lokal. Ketiga diskusi ini diadakan oleh kedua konsultan pada awal bulan Mei, sedangkan konsultan nasional berkunjung ke Kupang, Indonesia Timur, pada minggu kedua bulan Mei. Upaya ini menghasilkan pemilihan beberapa sub sektor dan wawancara berdasarkan sub sektor, yang perlu disesuaikan lagi di lapangan selama wawancara aktual berlangsung. Hasil akhir dari pemilihan sub sektor ini memperlihatkan perbedaan di sektor perekonomian informal dimana 22 sub sektor di 7 sektor ekonomi utama yang akan dibahas pada Bab selanjutnya. Untuk informasi lebih lanjut tentang hal ini, referensi disediakan pada Lampiran 5.

Walaupun karakteristik pekerja ditentukan melalui pemilihan ke-22 sub sektor ini, namun 2.068 wawancara dapat dianggap sebagai sampel yang cukup representatif untuk keempat daerah terkait, terutama karena representasi adalah salah satu kriteria utamanya.

Pelatihan Koordinator

Pemilihan data akan dikoordinasikan di tingkat lokal oleh empat koordinator berikut ini:

- Jakarta: Bapak Timboel Siregar, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI);
- Jawa Tengah: Bapak Bayu Wijayanto, Ketua CEMSED, *Centre for Micro and Small Enterprise Dynamics*, UKSW Salatiga;
- Yogyakarta: Ibu Paula Hartyastuti, Ketua Unit Pengembangan Masyarakat Bethesda;
- Kupang: Bapak Budi Salean, Peneliti di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Arta Wacana (UKAW).

Koordinator di keempat daerah sampel diberi informasi oleh para konsultan ini dan beberapa diskusi telah diadakan terkait dengan penetapan tujuan, sampel dan pemilihan sub sektor. Konsultan nasional kemudian mengadakan pelatihan bagi para koordinator tentang pemakaian kuesioner.

Pelaksanaan Survei

Survei diadakan di bawah pengawasan dua orang konsultan. Secara lokal, koordinator ini bertanggungjawab untuk mengontrak beberapa orang pewawancara yang berkualitas. Bekerjasama dengan konsultan nasional, beberapa wawancara diadakan di tingkat daerah.

Komputerisasi data dilakukan di CEMSED, *Centre for Micro and Small Enterprise Dynamics*, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, di bawah pengawasan langsung konsultan nasional yang didukung oleh seorang konsultan internasional.

Diskusi kelompok fokus

Beberapa diskusi kelompok fokus dipertimbangkan, namun dikarenakan keterbatasan waktu dan anggaran, upaya ini dihentikan dan dapat dilanjutkan pada fase berikutnya.

2.3 Studi kasus tentang pekerja di sektor formal yang di-PHK

Krisis global saat ini telah menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sebagian pekerja di sektor formal di Indonesia; misalnya sebuah pabrik tekstil di Salatiga memberhentikan 150 dari 200 orang karyawannya dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Untuk meneliti dampaknya terhadap perekonomian informal, 15 orang korban PHK di tujuh pabrik tekstil, garmen dan perabotan di sekitar Salatiga diwawancara, khususnya untuk memperoleh informasi tentang upaya mereka mencari pekerjaan lain selama beberapa bulan berikutnya. Beberapa studi kasus telah diadakan menggunakan sebuah daftar periksa (checklist) yang dirancang oleh para konsultan di awal bulan Mei 2009 (lihat Lampiran 2).

2.4 Solo: Kebijakan lokal yang inovatif, sebuah studi kasus

Beberapa wawancara diadakan dengan otoritas lokal di kota Solo Jawa Tengah, untuk memperoleh informasi tentang kebijakan mereka dalam menghapus perekonomian informal di daerah perkotaan.

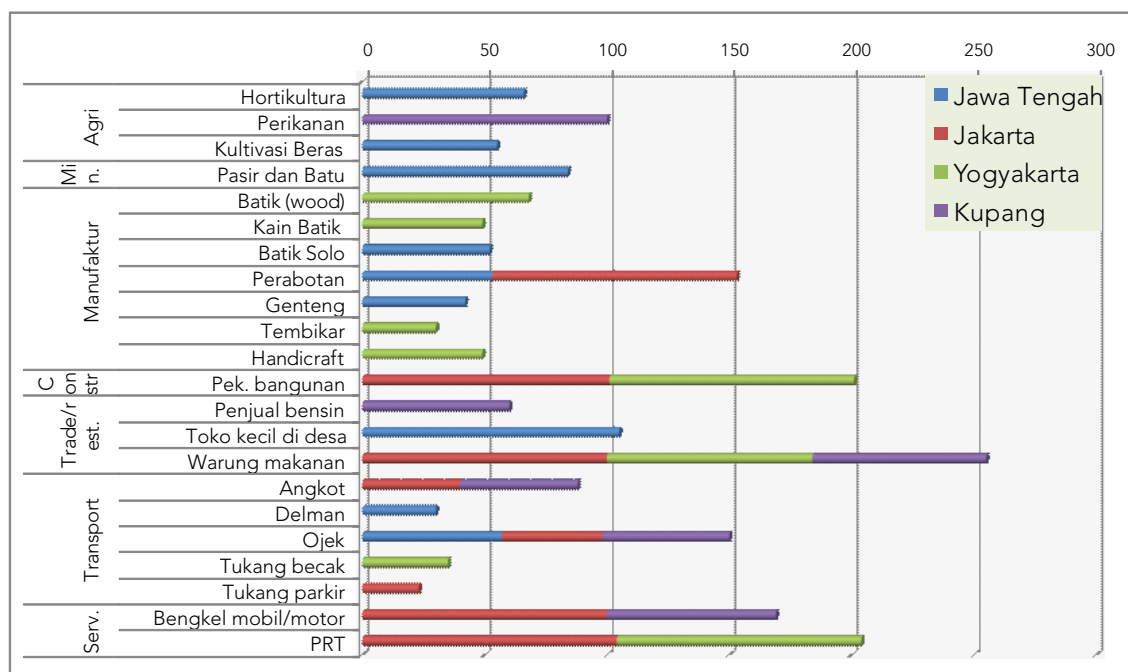
3

Jenis tenaga kerja informal

3.1 Jenis Sub sektor

Pemilihan akhir atas ke-22 sub sektor di 8 sektor ekonomi utama ini dan beberapa wawancara yang dilakukan di masing-masing ke-4 daerah sampel diperlihatkan dalam Gambar 3.1. Di bawah ini adalah keterangan singkat tentang kegiatan utama di masing-masing 22 sub sektor.

Gambar 3.1: Pemilihan Akhir Sub sektor berdasarkan sektor ekonomi yang utama dan daerah sampel



N = 2,066. Sumber: Survei 2009.

Pertanian

- 1) Hortikultura mencakup semua kegiatan kultivasi berbagai jenis sayuran dan tembakau.
- 2) Kultivasi beras mencakup semua kegiatan kultivasi beras.

- 3) Perikanan terdiri dari kegiatan penangkapan ikan lepas pantai dan di pesisir pantai. Di sektor perikanan lepas pantai, di samping perahu, nelayan juga membutuhkan beberapa alat penangkapan ikan yang mendasar seperti jaring, sementara penangkapan ikan di pantai menggunakan kail dan perangkap ikan, dan kegiatan mengumpulkan kerang.

Pertambangan

- 4) Pasir dan batu mencakup kegiatan menggali, mengangkat dan mengangkut pasir dari lapangan ke truk; dan menggali, memotong dan memecahkan, serta mengangkut batu ke truk.

Manufaktur

- 5) Kain Batik mencakup semua kegiatan produksi kain batik yang biasa dilakukan di sebuah pabrik.
- 6) Batik Solo terdiri dari kegiatan pekerja rumahan dalam proses produksi, yang mendapatkan bahan mentah untuk memproduksi batik dari perusahaan, tapi memproduksi sendiri di rumah.
- 7) Batik (wood) mencakup semua kegiatan produksi souvenir dengan menggambar motif batik pada kayu.
- 8) Handicraft mencakup semua kegiatan memproduksi berbagai jenis souvenir.
- 9) Barang Tembikar terdiri dari semua kegiatan produksi aksesoris rumah menggunakan tanah liat sebagai bahan mentahnya.
- 10) Genteng terdiri dari semua kegiatan produksi genteng yang terbuat dari campuran tanah liat, membuat adonan, mengeringkan, membakar dan mengeluarkannya dari tungku pembakaran.
- 11) Perabotan terdiri dari semua kegiatan produksi perabotan kayu mulai dari memotong kayu, membentuk, memperlicin permukaan, mengecat, mengemas dan mengangkut perabotan.

Perdagangan

- 12) Toko kecil di desa terdiri dari semua kegiatan toko di daerah pedesaan yang menjual berbagai jenis kebutuhan harian.
- 13) Warung dan penjual makanan di pinggir jalan terdiri dari semua kegiatan penjualan makanan jadi di tempat permanen atau berkeliling menggunakan gerobak.
- 14) Penjual bensin mencakup kegiatan menjual/mengecer bensin di pinggir jalan.

Transportasi

- 15) Delman mencakup semua kegiatan mengangkut penumpang menggunakan kereta yang didorong seekor kuda.
- 16) Ojek mencakup semua kegiatan mengangkut penumpang menggunakan motor.
- 17) Angkot transportasi terdiri dari semua kegiatan mengangkut penumpang menggunakan kendaraan angkot.

- 18) Tukang parkir mencakup kegiatan pengaturan berbagai jenis kendaraan mobil dan motor di areal parkir.
- 19) Tukang becak terdiri dari kegiatan mengangkut penumpang menggunakan becak roda tiga.

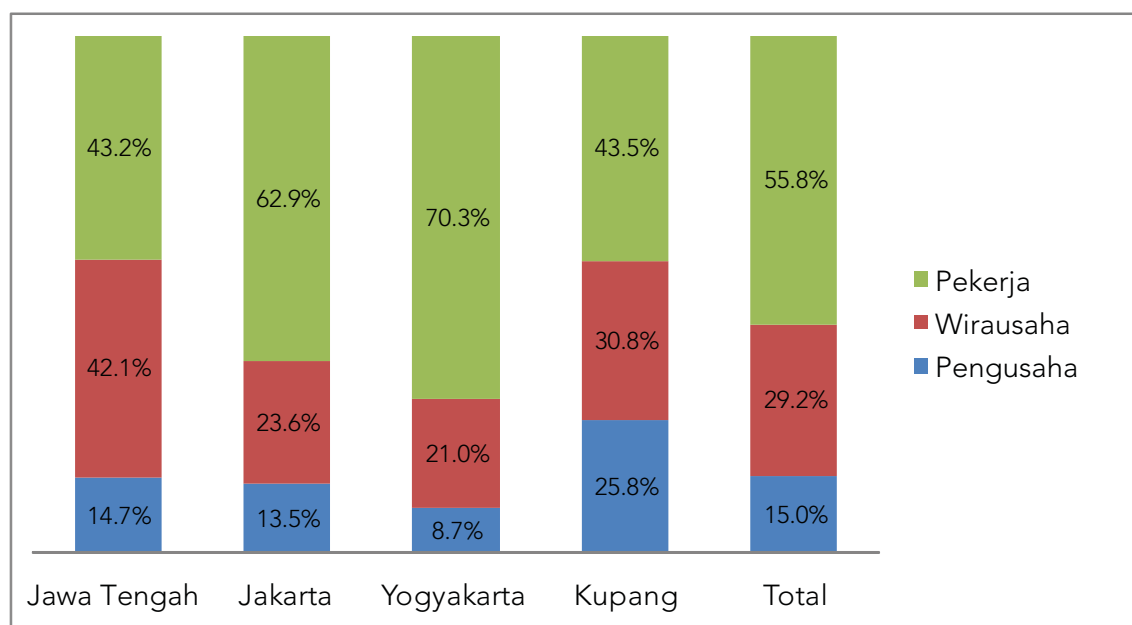
Konstruksi

- 20) Kerja pembangunan terdiri dari semua kegiatan membangun rumah, jalan, jembatan dan fasilitas lain.

Jasa

- 21) Bengkel/perbaikan kendaraan mencakup semua kegiatan memperbaiki berbagai jenis kendaraan.
- 22) PRT melakukan kegiatan berbagai jenis pekerjaan rumah seperti membersihkan, memasak, berkebun, mengasuh bayi, merawat orang tua dan lain-lain.

Gambar 3.2: Status pekerjaan responden menurut daerah sampel



N = 2,068. Sumber: Survei 2009.

3.2 Status pekerjaan

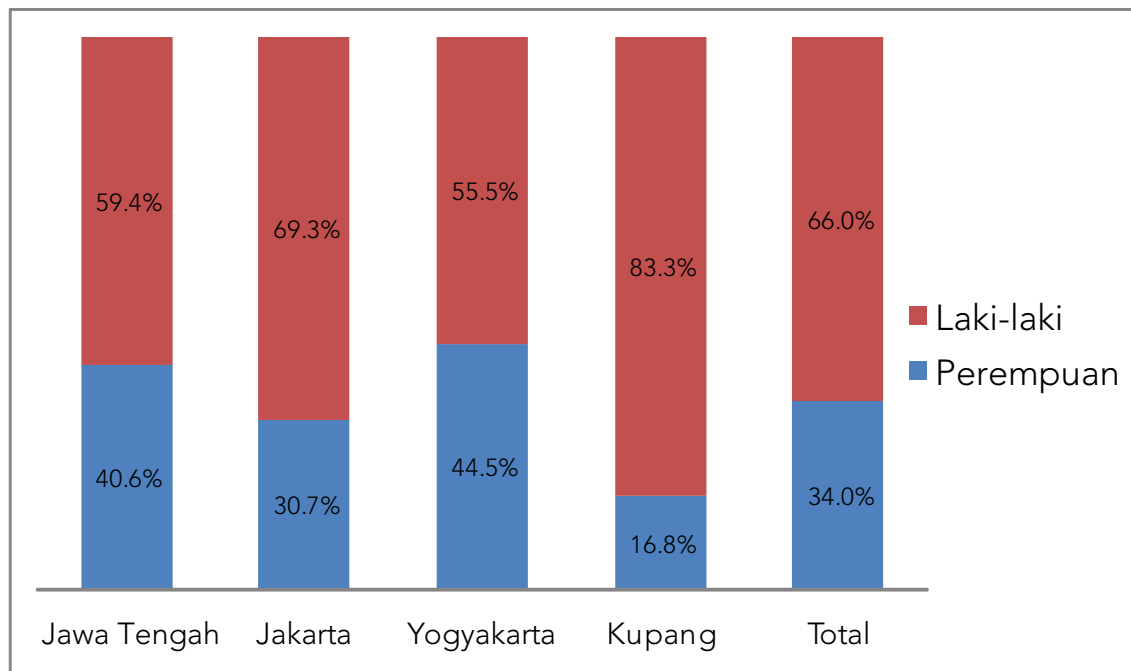
Status pekerjaan sebagian diberikan melalui pemilihan sub sektor dan responden, jadi tidak seperti yang diberikan sebagai gambaran menyeluruh yang representatif. Namun, masing-masing dari ketiga kelompok ini memberikan gambaran yang representatif tentang karakteristik mereka. Hasil akhirnya seperti yang diperlihatkan sebagai berikut: 56% responden adalah pekerja, 29% wiraswasta dan 15% pengusaha (lihat Gambar 3.2). Di Kupang, jumlah pengusaha relatif lebih tinggi karena pemilihan di sana dilakukan terhadap beberapa sub sektor tertentu yang memiliki banyak karyawan. Wiraswasta direpresentasikan dengan baik di daerah pedesaan di Jawa Tengah karena prevalensi pekerja rumahan/wiraswasta seperti di sub sektor tukang batu.

3.3 Karakteristik pilihan

Gender

Banyak responden adalah perempuan: 34%. Ada beberapa perbedaan berdasarkan daerah sampel dan khususnya di Kupang, pangsa perempuan lebih sedikit (lihat Gambar 3.3). Hal ini sebagian besar dikarenakan pemilihan sub sektor (dengan tingkat kehadiran perempuan yang lebih kecil). Di daerah pedesaan di Jawa Tengah perempuan direpresentasikan dengan baik di antara para responden yaitu sebanyak 40%.

Gambar 3.3: Jender responden menurut daerah sampel



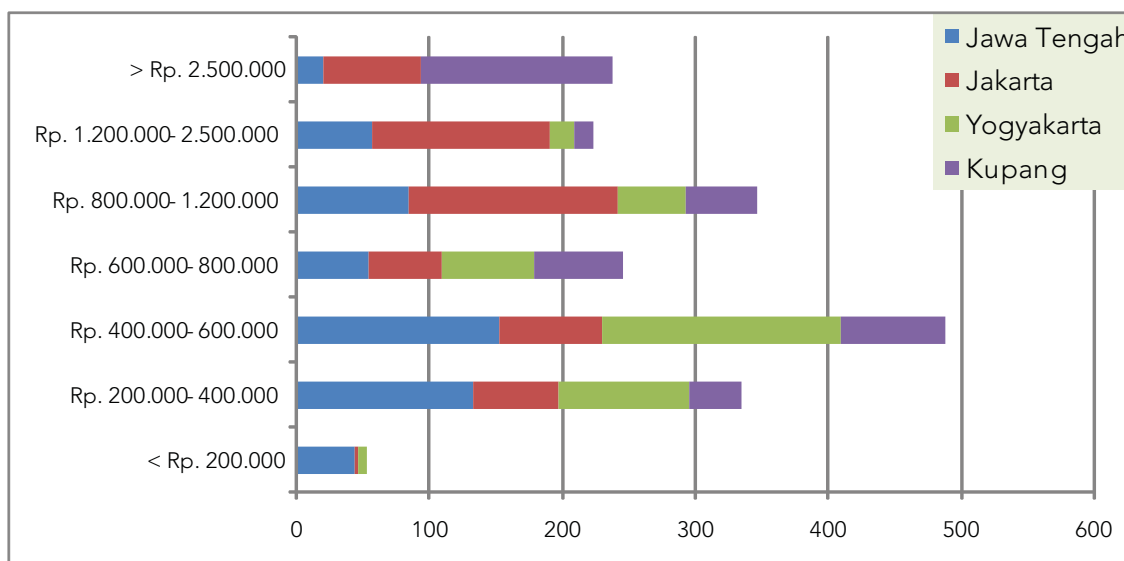
N = 2,068. Sumber: Survei 2009.

Penghasilan

Untuk kategori penghasilan, 58% tenaga kerja informal memperoleh penghasilan kurang dari Rp. 800.000 per bulan, dan 45% bahkan memperoleh kurang dari Rp. 600.000 (lihat Gambar 3.4). Pekerja di Jawa Tengah dan Yogyakarta diwakilkan secara berlebihan di kategori mereka yang berpenghasilan lebih rendah, dan mereka yang berada di Jakarta di kategori penghasilan yang lebih tinggi. Untuk Kupang, sebuah gambaran yang berbeda muncul, termasuk banyaknya responden yang memiliki penghasilan tinggi karena ada relatif banyak pengusaha di antara para responden.

Kami dapat membandingkan tingkat upah yang tinggi ini dengan tingkat upah minimum yang ditetapkan masing-masing provinsi (lihat Tabel 3.1). Ada korelasi yang nyata antara penghasilan dengan status pekerjaan, lebih banyak pengusaha dijumpai dalam kategori penghasilan yang lebih tinggi (misalnya hampir dua pertiga memperoleh penghasilan lebih dari Rp. 1.2 juta per bulan), sementara pekerja banyak mengisi kategori mereka berpenghasilan lebih rendah (lihat Gambar 3.5).

Gambar 3.4: Penghasilan responden dalam rupiah per bulan menurut daerah sampel

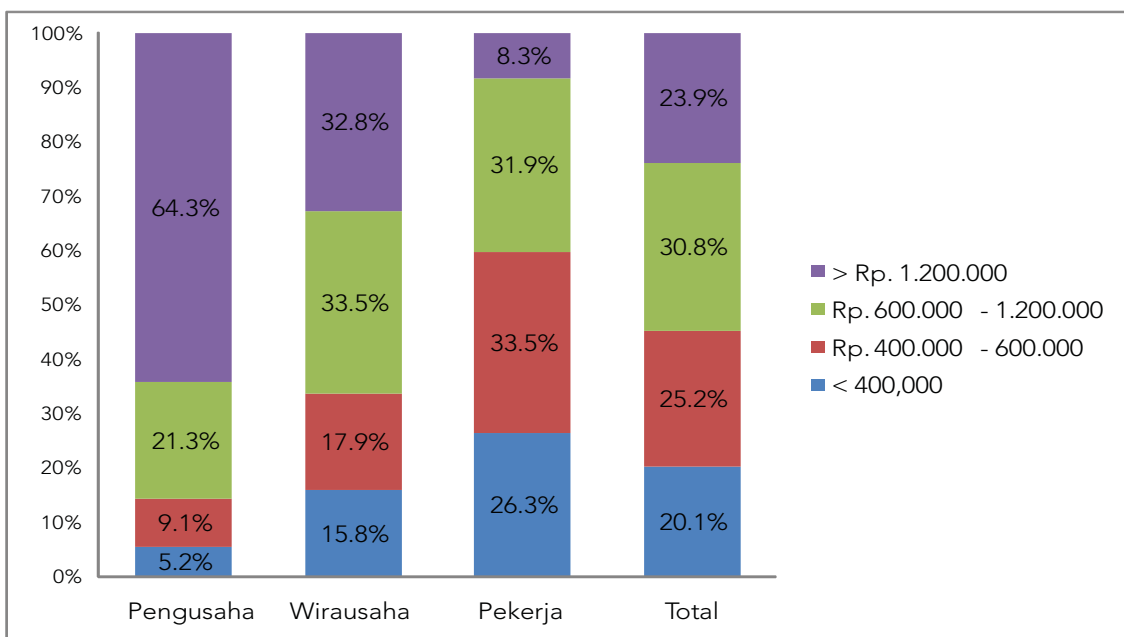


N=1929; Sumber: Survei 2009.

Tabel 3.1: Tingkat upah minimum di daerah pilihan dalam Rp. per bulan tahun 2009

Jakarta	1.039.000
Central Java (rural & urban)	833.000
Yogyakarta	700.000
NTT (incl. Kupang)	750.000

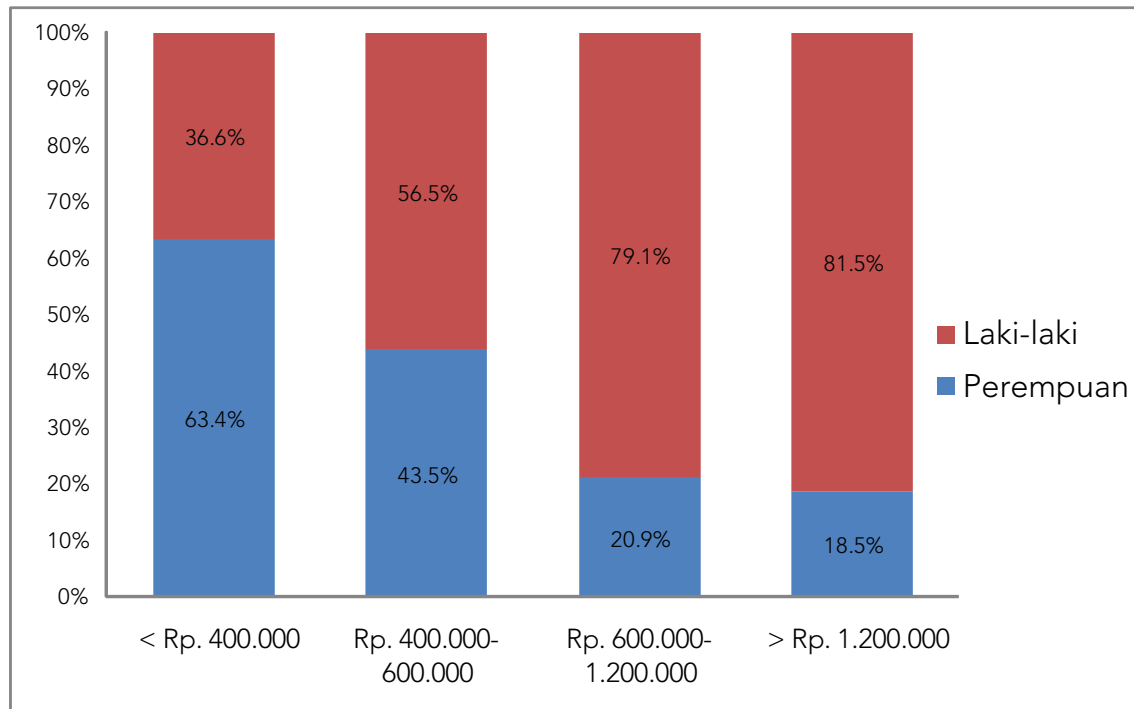
Gambar 3.5: Penghasilan responden menurut status pekerjaan



N=1923; Sumber: Survei 2009.

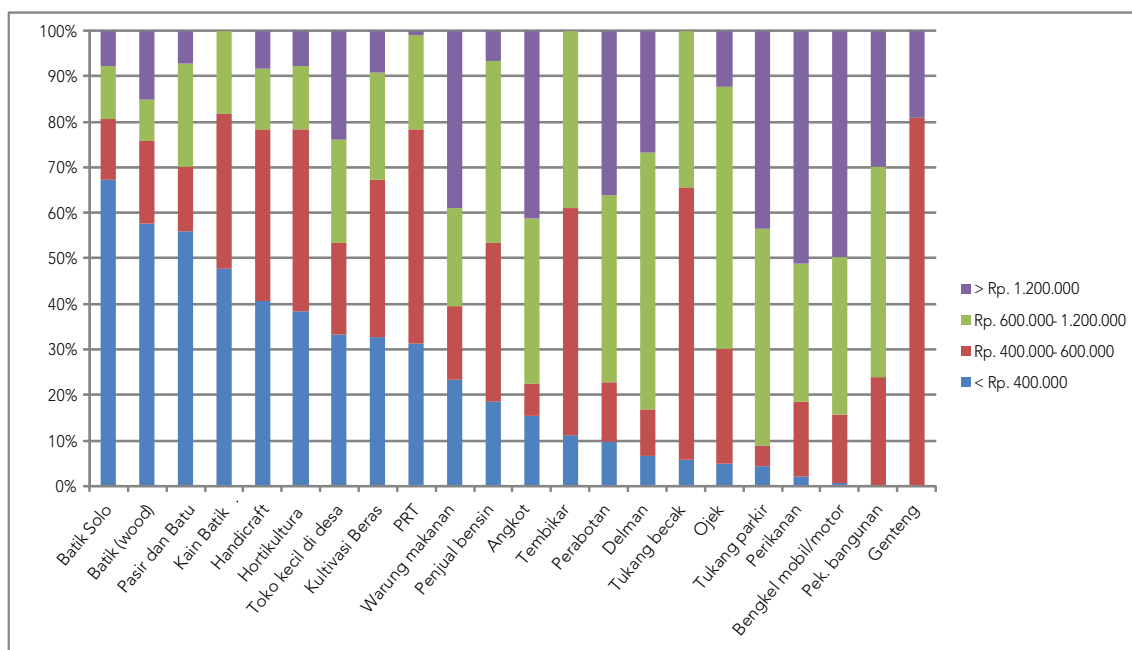
Pengakuan penghasilan ini memperlihatkan bahwa perempuan memperoleh penghasilan yang umumnya lebih rendah dari laki-laki (lihat Gambar 3.6). Untuk ke-22 sub sektor, penghasilan pekerja ini memperlihatkan adanya perbedaan besar (lihat Gambar 3.7). Tingkat penghasilan terendah dimiliki para pekerja Batik dan tukang pasir/batu (50-60% di antara memperoleh penghasilan kurang dari Rp. 400,000), sementara tingkat penghasilan tertinggi dijumpai di bengkel, warung/ restoran, sopir bemo, perikanan, perabotan dan tukang parkir.

Gambar 3.6: Jenis kelamin responden berdasarkan penghasilan



N = 1,928. Sumber: Survei 2009.

Gambar 3.7: Penghasilan responden menurut 22 sub sektor

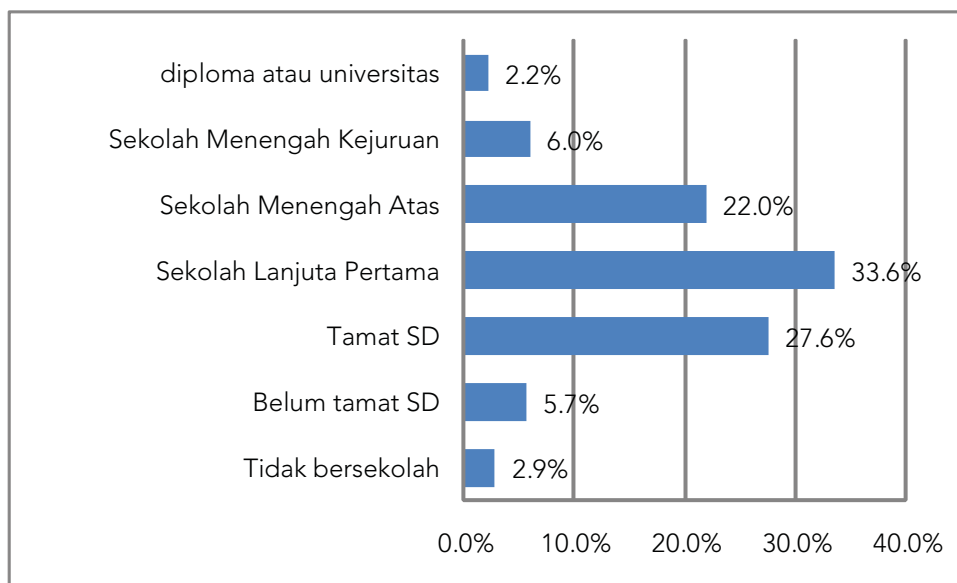


N = 1,929. Sumber: Survei 2009.

Pendidikan

Tenaga kerja informal yang diwawancarai memiliki latar belakang pendidikan yang kurang baik: dimana kurang dari 10% tidak menyelesaikan SD mereka (Gambar 3.8). Sebagian besar yaitu hampir 64% minimal lulus SLTP. Pengusaha pada umumnya memiliki latar pendidikan yang lebih tinggi dimana 50% lulus SMA, sementara persentase yang jauh lebih rendah dijumpai mereka yang berwiraswasta (33%) dan buruh (23%).

Gambar 3.8 : Pendidikan responden

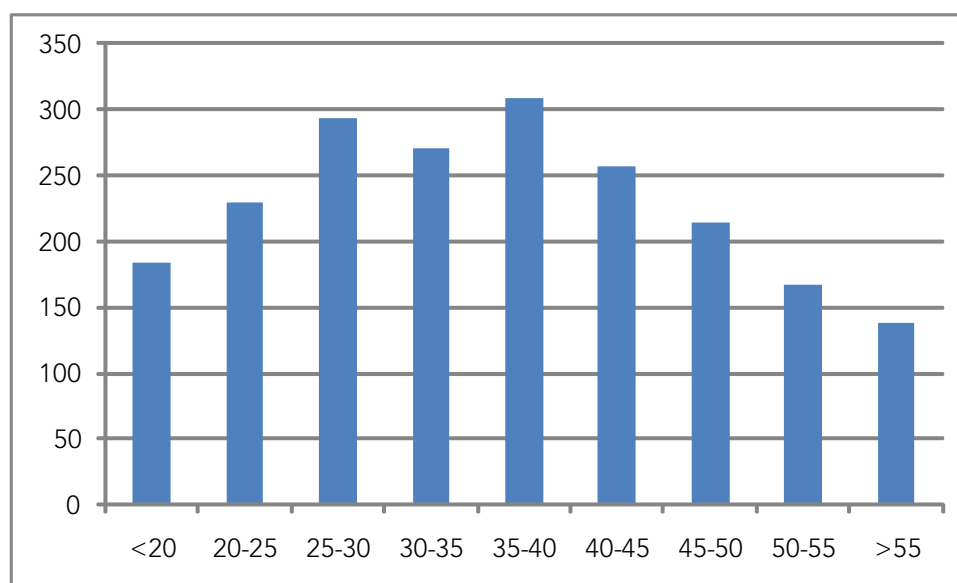


N = 2,063. Sumber: Survei 2009.

Usia dan Tanggungan

Ada distribusi kelompok umur yang nyaris seimbang di antara responden (lihat Gambar 3.9); hanya kelompok umur 30-35 tahun yang tampaknya kurang seimbang.

Gambar 3.9 : Usia responden



N = 2,062. Sumber: Survei 2009.

Dalam hal jumlah tanggungan, hampir 80% responden menyatakan bahwa ada satu atau dua orang yang menjadi tanggungan mereka (masing-masing 39,9% and 39,6%). Hal ini tentunya terkait dengan relatif besarnya responden muda (di bawah 30 tahun) dan lebih tua. Hanya 7% responden menyatakan bahwa 5 atau lebih menjadi tanggungan mereka.

Di antara responden, hanya ada 8 orang anak (6 anak perempuan dan 2 anak laki-laki). Namun, ini tidak berarti bahwa pekerja anak tidak signifikan jumlahnya karena orang dewasa ditargetkan selama wawancara ini untuk mengetahui pendapat mereka tentang jaminan sosial, dan pemilihan sub sektor juga menyebabkan tingkat partisipasi yang rendah dari anak-anak.

3.4 Ringkasan

Survei ini diadakan bulan Mei 2009 di empat daerah yaitu daerah pedesaan di Jawa Tengah dan daerah perkotaan di Jakarta, Yogyakarta dan Kupang. Sebanyak 2.068 orang pekerja, wiraswasta maupun pengusaha di sektor perekonomian informal mengikuti wawancara ini. Pemilihan sektor dan sub-sektor ekonomi yang utama di masing-masing daerah didasari pada kriteria: 1) Representasi; 2) Partispasi kegiatan paling penting di masing-masing daerah; 3) Representasi pekerja perempuan; 4) Kerentanan relatif pekerja; 5) Peningkatan kapasitas penyuluhan, visibilitas dan kesadaran masyarakat di beberapa sub sektor tertentu; 6) Representasi berbagai sektor (berdasarkan SAKERNAS 2008); 7) Representasi status pekerjaan. Beberapa hasil temuan yang utama dari survei ini diringkas sebagai berikut.

Karakteristik pekerja tentunya ditentukan oleh pemilihan ke-22 sub sektor ini tapi karena tujuannya adalah representasi maka 2.068 wawancara dapat dianggap sebagai sampel ayng cukup representatif. Di antara responden, 56% adalah pekerja, 29% wiraswasta dan 15% pengusaha. Dikarenakan pemilihan sub sektor ini, ada penyimpangan tertentu berdasarkan daerah sampel: Jakarta dan Yogyakarta punya jumlah pekerja yang tinggi (60-70%), sementara di Kupang, sekelompok pengusaha ikut berpartisipasi (26%). Sementara daerah pedesaan di Jawa Tengah punya jumlah wiraswasta yang sangat tinggi (42%).

Secara signifikan, 34% responden adalah perempuan. Tingkat penghasilan sangat bervariasi, tapi sekitar 58% adalah masyarakat miskin yang berpenghasilan kurang dari Rp. 800.000 per bulan (upah minimum bulana bervariasi tapi sekitar Rp 1 juta di Jakarta dan Rp 833.000 di Jawa Tengah); 45% responden memperoleh penghasilan kurang dari Rp. 600,000 per bulan. Pengusaha memperoleh penghasilan yang jauh lebih baik dimana dua per tiga di antaranya memperoleh penghasilan di atas Rp 1,2 juta per bulan, sementara perempuan memperoleh jauh lebih sedikit dimana dua pertiga di antara memperoleh kurang dari Rp 400.000 per bulan. Dengan kata lain, penghasilan juga sangat variatif tergantung sub sektor, dimana tingkat upah terendah dimiliki para pekerja Batik dan buruh pasir/batu (50-60% di antara memperoleh kurang dari Rp. 400.000), dan tertinggi diperoleh tukang bengkel, pekerja warung/restoran, tukang bemo, nelayan, buruh pabrik perabotan dan tukang parkir.

4

Mekanisme penyesuaian tenaga kerja informal saat ini terkait tidak adanya jaminan sosial

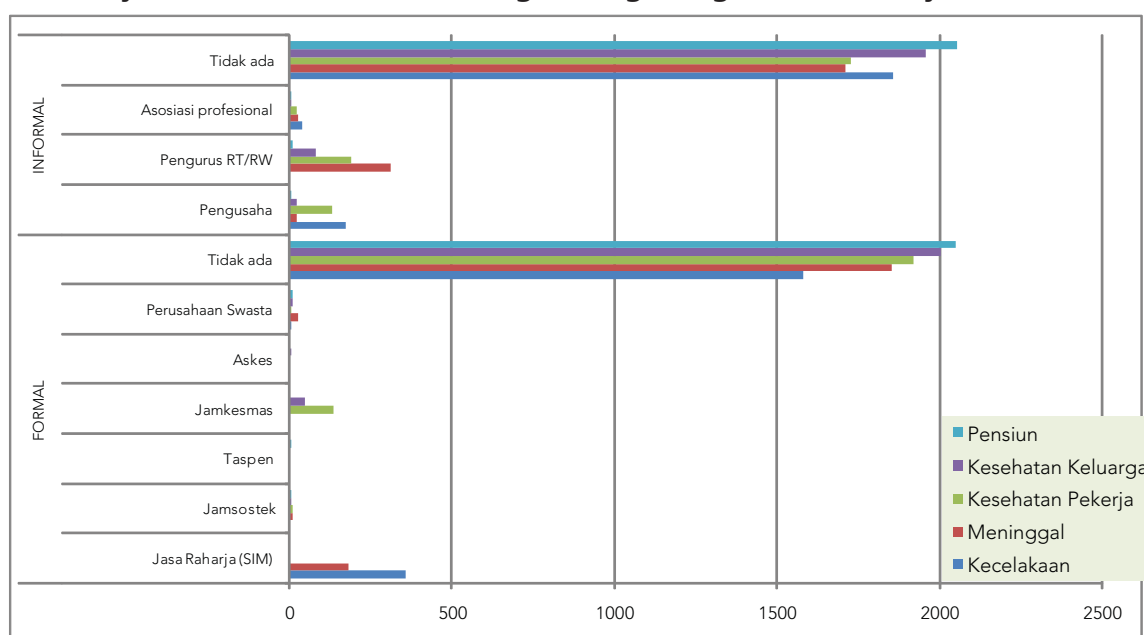
4.1 Tenaga kerja informal yang tidak memiliki jaminan sosial

Sekitar 80% tenaga kerja informal yang diwawancarai tidak punya jaminan sosial apapun:

- Tidak punya jaminan sosial formal, dan
- Tidak punya jaminan sosial informal, selain dari keluarga: 90% responden menjawab keluarga saat ditanya siapa yang akan merawat mereka jika terjadi sesuatu terhadap mereka.

Hal ini diperlihatkan dalam Gambar 4.1. Persentase pekerja yang relatif kecil menyebutkan beberapa jenis asuransi informal tertentu, seperti Musyawarah Desa dan bantuan pengusaha, atau asuransi formal, seperti asuransi pengemudi, Jamkesmas dan Jamsostek.

Gambar 4.1: Jumlah responden yang saat ini dilindungi oleh a) jaminan sosial informal, dan b) jaminan sosial formal masing-masing dibagi lima elemen jaminan sosial

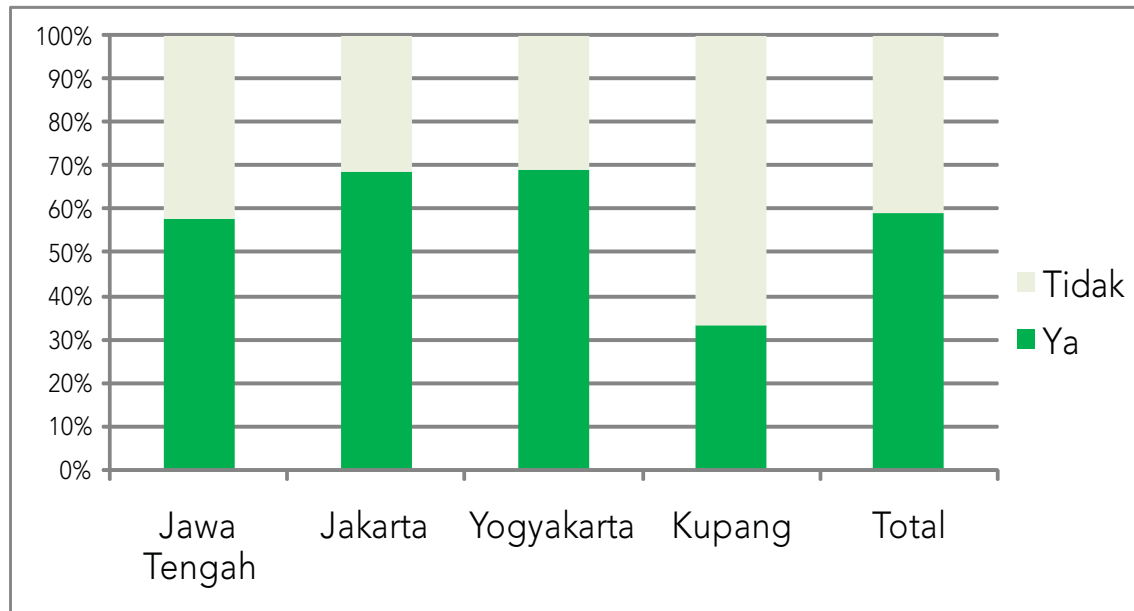


N (Kecelakaan Formal)=1938; N (9 variabel lain) = 2064; Sumber: Survei 2009.

4.2 Pengetahuan tentang jaminan sosial

Kami ajukan pertanyaan kepada tenaga kerja informal apakah mereka sudah pernah mendengar tentang skema-skema jaminan sosial yang dilaksanakan Jamsostek, dan mayoritas atau 60% di antaranya menjawab ya (lihat Gambar 4.2).

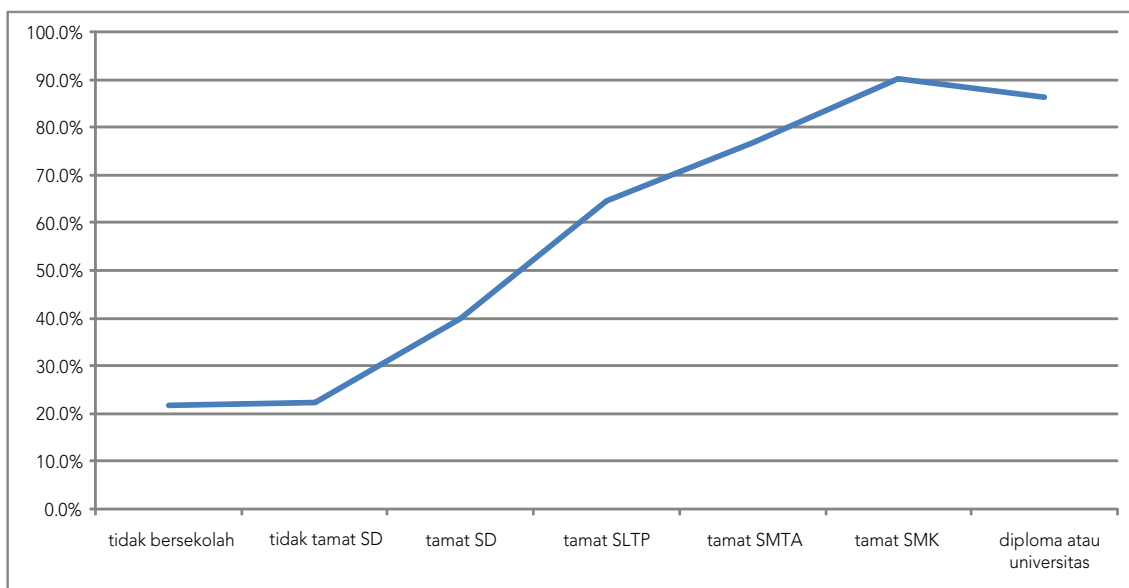
Gambar 4.2: Pengetahuan tentang Jamsostek di antara responden menurut daerah sampel



N = 2,066. Sumber: Survei 2009.

Waktu pengetahuan tentang Jamsostek ditabulasikan sesuai tingkat pendidikan, maka ia menghasilkan kurva yang cukup sempurna dimana semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin besar pengetahuan mereka tentang Jamsostek (Gambar 4.3).

Gambar 4.3: Tingkat pendidikan responden berdasarkan pengetahuan mereka tentang Jamsostek

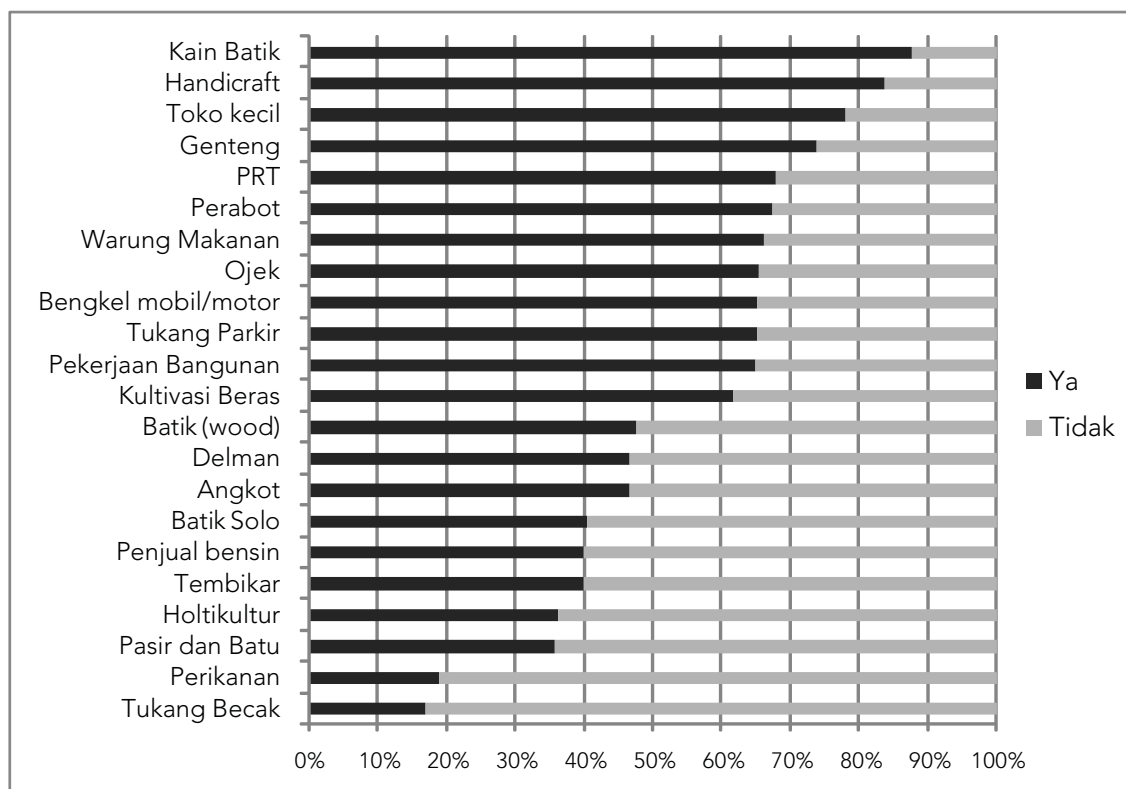


N = 2,058. Sumber: Survei 2009.

Dalam hal usia, sebagian besar kelompok berpenghasilan 60% atau lebih sudah mengetahui tentang Jamsostek kecuali responden yang sangat muda atau sangat tua (masing-masing sekitar sepertiga).

Pengetahuan tentang program ini sangat variatif di antara 22 sub sektor yaitu dari 15% responden tukang Becak dan nelayan hingga 85% di kalangan pekerja kain batik dan produsen kerajinan tangan (lihat Gambar 4.4; lihat juga tinjauannya pada Lampiran 6).

Gambar 4.4: Pengetahuan tentang Jamsostek (Ya/Tidak) menurut sub sektor



N = 2,062. Sumber: Survei 2009.

Dalam hal status pekerjaan, pengetahuan pengusaha tentang Jamsostek (71%) adalah lebih tinggi dari pengetahuan wiraswasta dan pekerja (masing-masing 60% dan 55%). Terkait gender, tidak ada perbedaan sama sekali antara laki-laki dan perempuan (dua-duanya 60%).

4.3 Sikap terhadap jaminan sosial

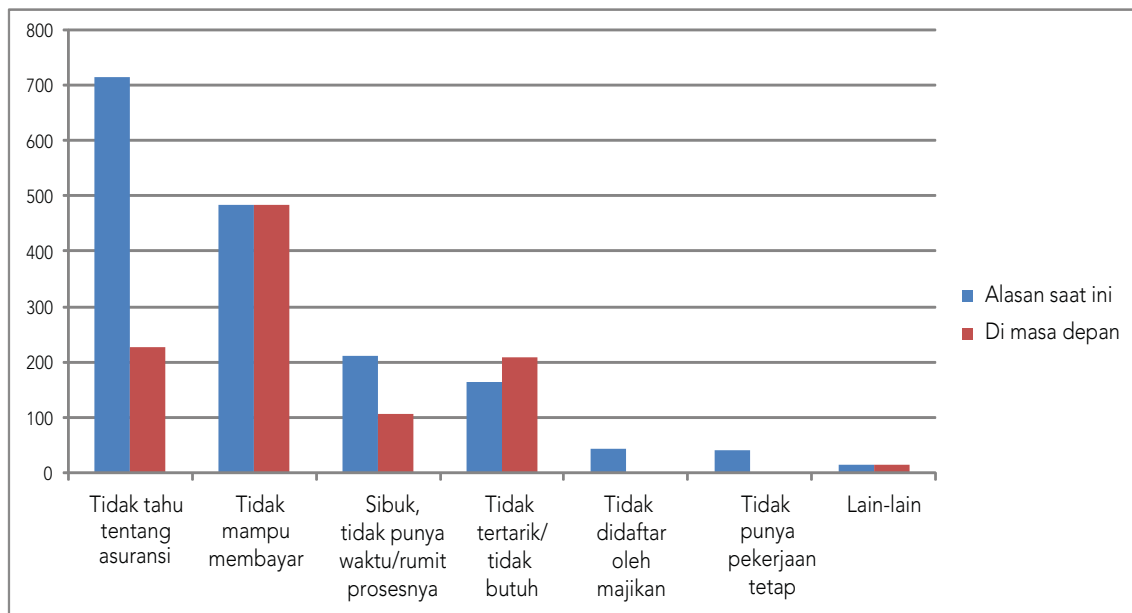
Sementara 80% tenaga kerja informal saat ini belum punya jaminan sosial formal, namun 50% menyatakan bahwa mereka belum ingin memperolehnya di masa mendatang. Sementara untuk alasan saat ini 'tidak tahu tentang asuransi' adalah paling penting, dan untuk di masa mendatang 'ketidak mampuan membayar' adalah yang paling penting (lihat Gambar 4.5 dan 4.6).

Gambar 4.5: Alasan di balik adanya jaminan sosial formal di masa sekarang dan masa mendatang

Alasan	Sekarang (%)	Masa mendatang (%)
Tidak tahu	42	22
Tidak mampu	29	46
Sibuk	13	10
Tidak minat	10	20
Lain-lain	6	2
Jumlah	100	100

N (sekarang)=1679; N(masa mendatang)=1047. Sumber: Survei 2009.

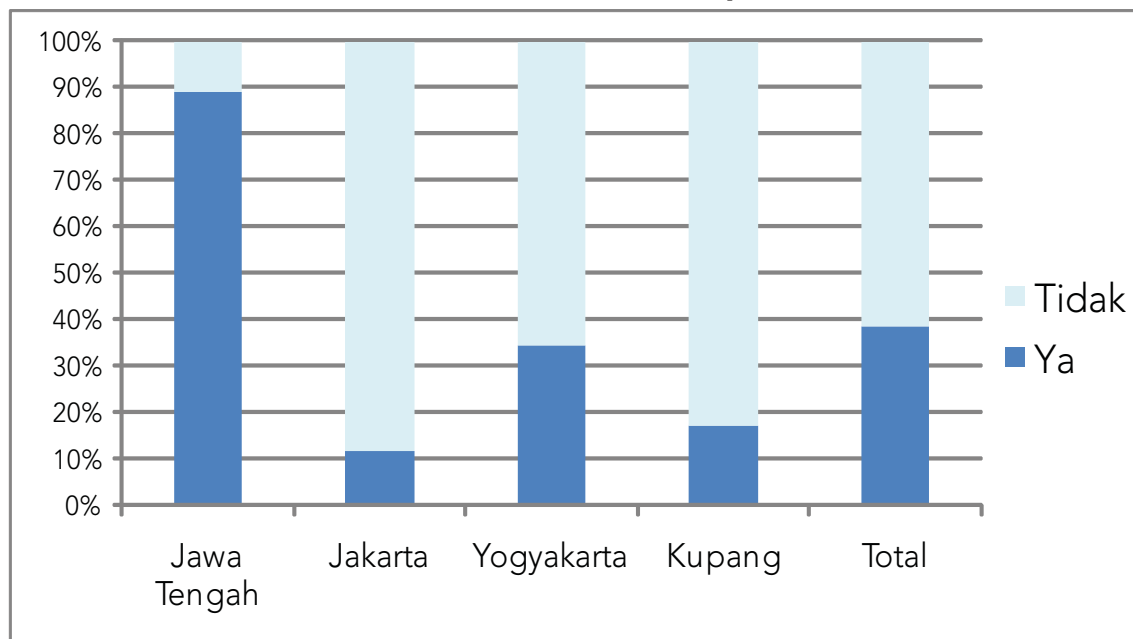
**Gambar 4.6: Alasan sekarang dan masa mendatang:
(1) Alasan tidak punya asuransi formal saat ini.
(2) Alasan tidak minat memperoleh asuransi di masa mendatang**



N (sekarang)=1679; N(masa mendatang)=1047. Sumber: Survei 2009.

Dalam hal gender, jumlah perempuan yang menyatakan mereka tidak tahu tentang asuransi adalah lebih banyak dari laki-laki (50% : 37%). Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hal status pekerjaan kecuali bahwa pengusaha biasanya lebih sibuk dan kurang minat ketimbang yang lain. Seperti yang diperlihatkan Gambar 4.7 di bawah ini, kegiatan sosial merupakan kegiatan yang penting terutama di daerah pedesaan di Jawa Tengah dimana hampir 90% menjadi anggotanya (misalnya anggota PKK).

Gambar 4.7: Kegiatan sosial dimana responden menjadi anggotanya berdasarkan daerah sampel



N = 2,066. Sumber: Survei 2009.

4.4 Kesimpulan: Bentuk-bentuk jaminan sosial saat ini

Survei ini menjumpai bahwa ada sekitar 80% dari 2.068 tenaga kerja informal yang tidak mempunyai jaminan sosial apapun: tidak punya jaminan sosial formal dan tidak punya jaminan sosial informal tertulis selain dari mengandalkan keluarga. Secara signifikan, 90% responden menjawab keluarga saat ditanya siapa yang akan merawat mereka jika sesuatu terjadi pada mereka. Hanya sedikit pilihan lain yang disebutkan seperti Musyawarah Desa, asuransi pengemudi dan bantuan pengusaha. Walaupun kurangnya asuransi aktual ini, namun ini tidak menunjukkan adanya ketidakpedulian mereka, karena hampir 60% tenaga kerja informal mengetahui tentang program Jamsostek! Korelasi menarik yang sangat positif dijumpai antar tingkat pendidikan dan pengetahuan mereka tentang Jamsostek. Beberapa tingkat pengetahuan yang berbeda di sub sektor ini dapat membantu mentargetkan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Jamsostek; dan kawasan Indonesia Timur perlu diberi informasi yang lebih baik tentang program ini.

Sementara 80% responden menyatakan bahwa saat ini mereka belum memiliki asuransi formal, tapi separuh dari keseluruhan responden menyatakan bahwa mereka tidak ingin memiliki asuransi formal di masa mendatang. Alasannya mereka belum memiliki asuransi formal adalah karena mereka tidak punya pengetahuan tentang asuransi, tidak mampu membayar, terlalu sibuk, atau tidak tertarik/tidak merasa perlu. Sedangkan alasan untuk tidak memiliki asuransi di masa mendatang adalah karena mereka tidak mampu membayar asuransi. Upaya perlu dilakukan untuk mendidik perempuan karena biasanya mereka menjawab tidak tahu tentang asuransi ketimbang laki-laki (50 : 37%). Kegiatan sosial (seperti PKK) dijumpai penting hanya di daerah pedesaan di Jawa Tengah dimana hampir 90% tenaga kerja informal menjadi anggotanya.

5

Permintaan akan jaminan sosial di antara tenaga kerja informal

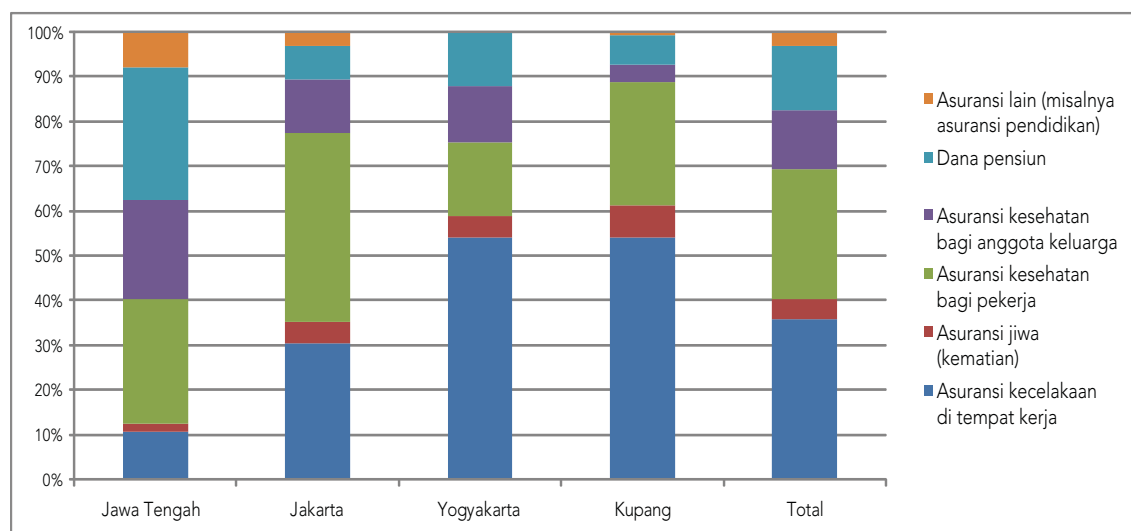
5.1 Jenis jaminan sosial yang diprioritaskan

Prioritas tenaga kerja informal di antara beberapa jenis jaminan sosial sama variatifnya dengan perekonomian informal itu sendiri. Untuk memastikannya, jumlah keseluruhan prioritas mereka memberikan hasil sebagai berikut:

- Prioritas pertama adalah asuransi kecelakaan kerja (disebutkan oleh 36% responden).
- Prioritas kedua adalah asuransi kesehatan pekerja (29%).

Sementara pilihan jaminan yang lain jarang disebutkan yaitu: prioritas ketiga adalah dana pensiun dimana hanya 14% yang menyatakannya (lihat Gambar 5.1). Hal menarik lainnya adalah bahwa hanya sedikit sekali yang khawatir tentang asuransi jiwa. Preferensi asuransi kecelakaan terkait dengan persepsi responden tentang jenis pekerjaan yang mereka lakukan dan bahaya yang dihadapinya: 63% responden menegaskan bahwa pekerjaan mereka berbahaya dan rentan kecelakaan. Bahaya kedua yang terbesar yang mereka sebutkan adalah jam kerja yang lama atau kerja malam (disebutkan 22 % responden).

Gambar 5.1: Prioritas jaminan sosial berdasarkan daerah sampel

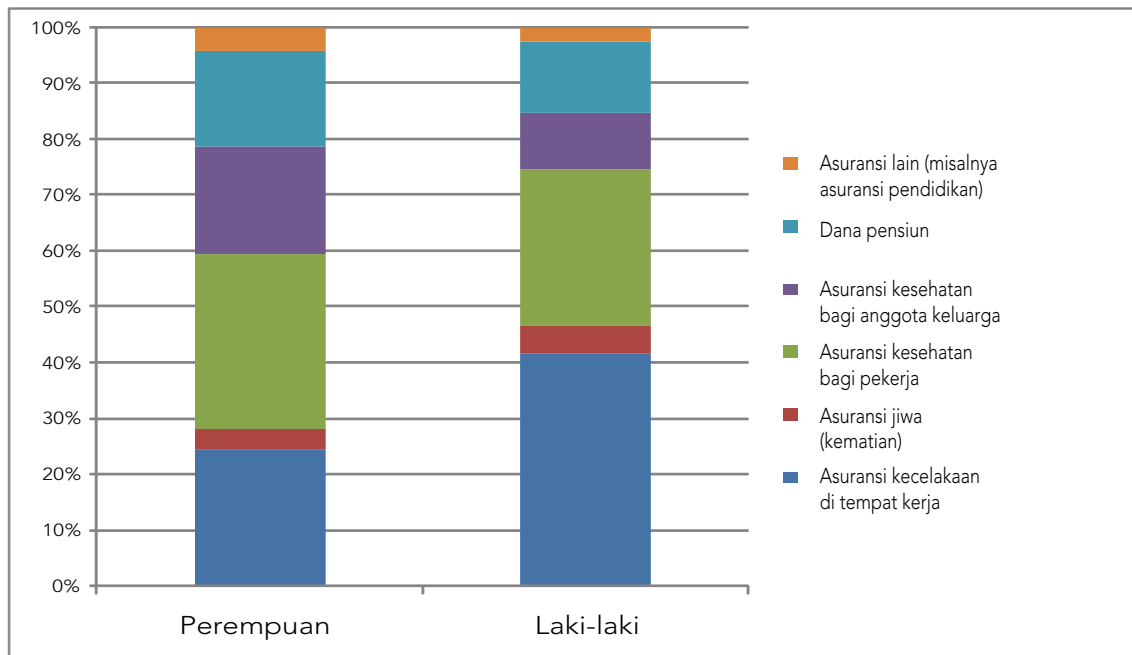


N = 2,061. Sumber: Survei 2009.

Di samping itu, kami perlu tegaskan bahwa diversifikasi diperlukan sesuai beberapa variabel berikut ini:

- Kota Yogyakarta dan Kupang memperlihatkan prioritas yang lebih tinggi untuk asuransi kecelakaan (lebih separoh responden). Namun, di kota metropolitan Jakarta, kesehatan pekerja adalah prioritas nomor satu (42%).
- Prioritas tertinggi bagi pekerja di daerah pedesaan di Jawa Tengah adalah dana pensiun (30%), lalu diikuti kesehatan pekerja (28%) dan kesehatan keluarga (22%). Kecelakaan kerja tampaknya jarang terjadi disini, tidak sesering di daerah perkotaan!

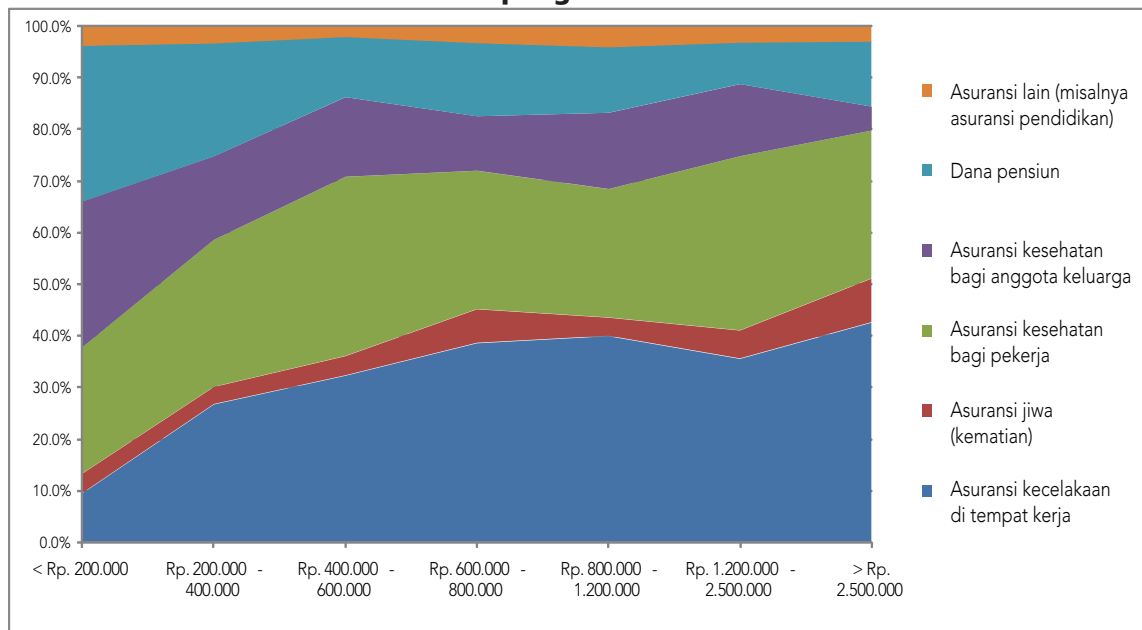
Gambar 5.2: Prioritas pertama jaminan sosial menurut gender



N = 2,059. Sumber: Survei 2009.

- Untuk tenaga kerja informal perempuan, urutan dua prioritas perama adalah sebaliknya yaitu nomor satu dalah kesehatan pekerja dengan 31%, lalu diikuti asuransi kecelakaan 25% (lihat Gambar 5.2). Di samping itu, kesehatan keluarga dan dana pensiun lebih sering disebutkan perempuan daripada laki-laki.
- Tidak ada perbedaan besar dalam hal status pekerjaan.
- Dalam hal usia, satu-satunya pola yang ada adalah bahwa responden yang lebih tua (di atas 45 tahun) lebih sering memilih pensiun daripada asuransi kecelakaan.

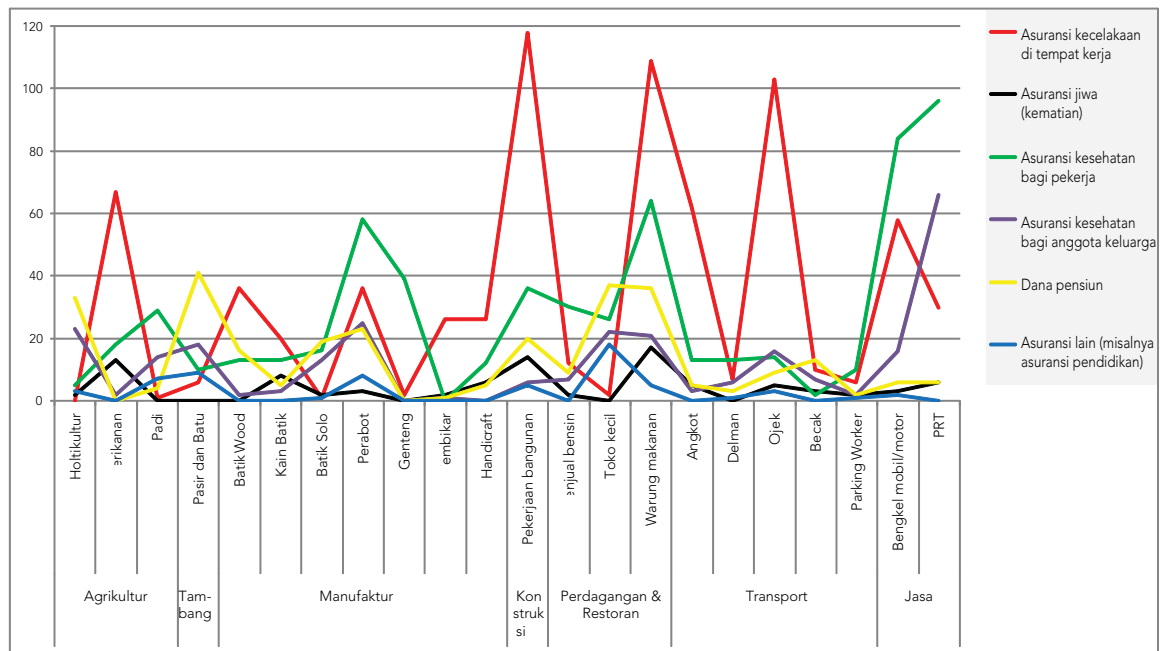
Gambar 5.3: Prioritas pertama jaminan sosial menurut penghasilan



N = 1,922. Sumber: Survei 2009.

- Berdasarkan upah per bulan, Gambar 5.3 memperlihatkan bahwa responden dalam kategori upah terendah (di bawah Rp 200.000 per bulan) sebenarnya menginginkan dana pensiun sebagai prioritas pertama mereka (30%) lalu diikuti kesehatan keluarga (28%). Dana pensiun juga merupakan prioritas yang tak kalah pentingnya bagi mereka yang memiliki upah terendah kedua (22%), walaupun disini kesehatan pekerja dan asuransi kecelakaan juga sering disebutkan. Gambar ini memperlihatkan secara grafis bahwa 'semakin kaya' responden maka semakin penting pula asuransi kecelakaan bagi mereka dan tidak semakin berkurang pula tingkat kepentingan dana pensiun dan kesehatan keluarga.
- Seperti yang diperlihatkan dalam Gambar 5.4 ada banyak perbedaan di antara ke 22 sub sektor yang ada. Gambar ini dan keterangan tentang karakteristik pilihan dari sub sektor tersebut sebagaimana yang diperlihatkan dalam Lampiran 6 memungkinkan kita mengidentifikasi secara mudah sub sektor tersebut terkait masing-masing asuransi yang mereka pilih. Misalnya:
 - Asuransi kecelakaan dianggap penting terutama oleh tukang bangunan, pekerja warung/restoran dan tukang ojek (100 responden atau lebih), dan oleh nelayan, tukang becak dan pekerja bengkel kendaraan (masing-masing sekitar 60 responden).
 - Asuransi kesehatan pekerja dianggap penting oleh PRT dan pekerja bengkel, dan juga oleh pekerja warung/restoran, perabotan dan tukang genteng.
 - Asuransi kesehatan keluarga dianggap penting oleh sebagian besar PRT.
 - Hal yang mengejutkan adalah bahwa salah satu sub sektor yaitu tukang pasir/batu yang tidak memiliki jaminan kerja dan/atau penghasilan yang memadai menyatakan bahwa pensiun adalah hal yang paling penting bagi mereka.
 - Asuransi kematian serta jenis-jenis asuransi (pendidikan) lain disebutkan tidak lebih dari 20 orang responden di setiap sub sektor.

Gambar 5.4: jaminan sosial prioritas utama menurut sub sektor (jumlah responden)



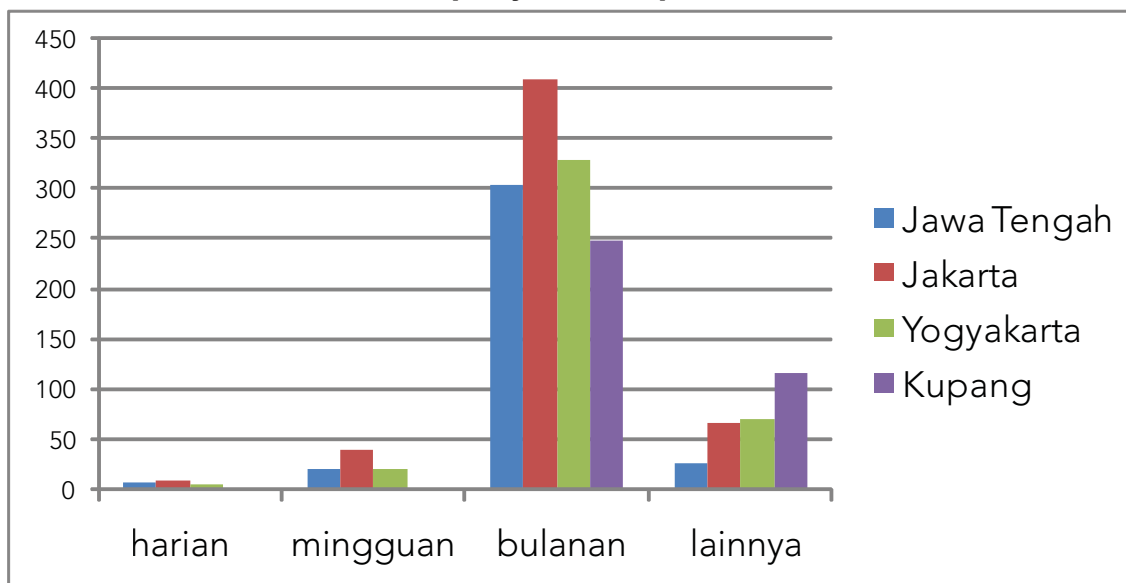
N = 2,061. Sumber: Own Survey 2009.

5.2 Kemauan untuk membayar asuransi

Kami telah menanyakan responden apakah mereka mau membayar asuransi jaminan sosial. Dan 80% di antaranya menyatakan bahwa mereka mau memberikan kontribusi finansial secara teratur. Di samping itu, 77% lebih suka pembayaran premi bulanan (lihat Gambar 5.5).

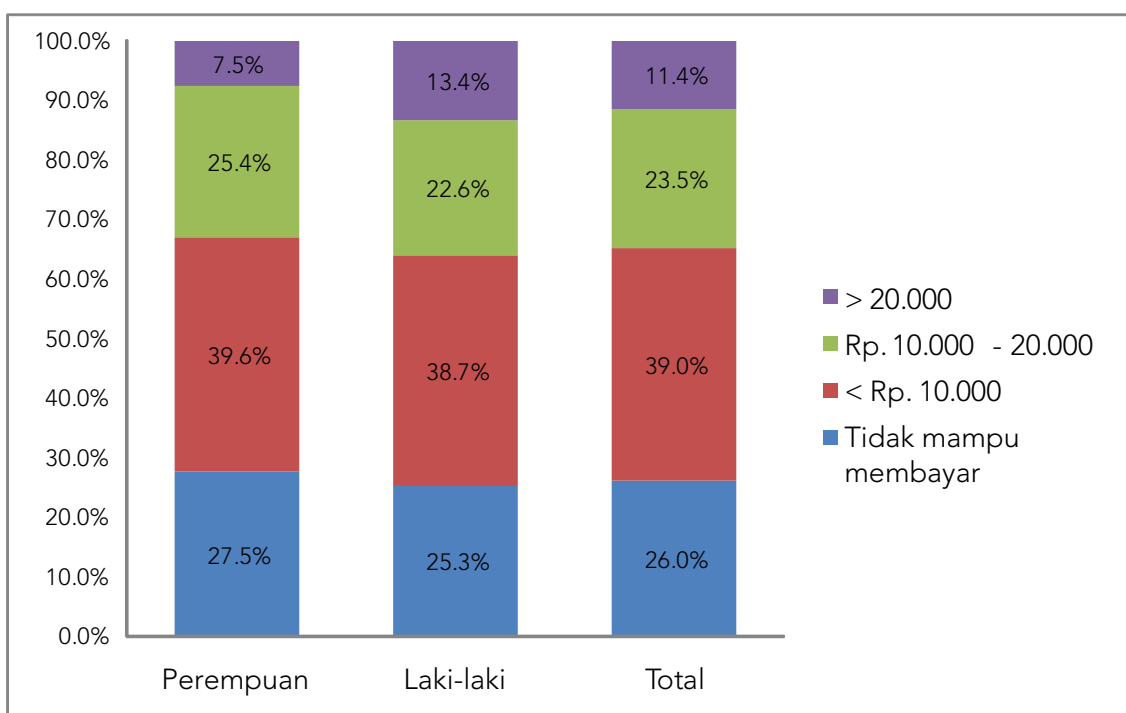
Kami juga sudah menanyakan berapa besar yang mampu mereka bayarkan per bulan untuk premi asuransi, dengan memberi pilihan 'Tidak mampu bayar' dan kisaran nilai premi mulai dari kurang Rp 10.000 sampai di atas Rp 100.000 (lihat Lampiran 1). Seperempat dari mereka menyatakan bahwa mereka tidak mampu bayar, sementara 40% lebih suka jika nilai premi mereka kurang dari Rp 10.000 (lihat Gambar 5.6). Jadi, secara total hampir dua pertiga responden ingin memberikan kontribusi mereka antara Rp 1 sampai Rp 20.000 per bulan. Di samping itu, 11% responden mau membayar lebih dari Rp. 20.000 per bulan: separoh di antaranya adalah pengusaha; di Kupang hampir 30% responden mau membayar > Rp 20.000 sementara di daerah-daerah lain, kurang dari 10%. Gambar 5.6 memperlihatkan bahwa berdasarkan gender, hanya ada sedikit perbedaan "di kategori atas" dimana jumlah laki-laki yang mau membayar lebih dari Rp 20.000 adalah dua kali dari jumlah perempuan.

Gambar 5.5: Cara pembayaran yang lebih disukai menurut daerah sampel (jumlah responden)



N = 1,680. Sumber: Survei 2009.

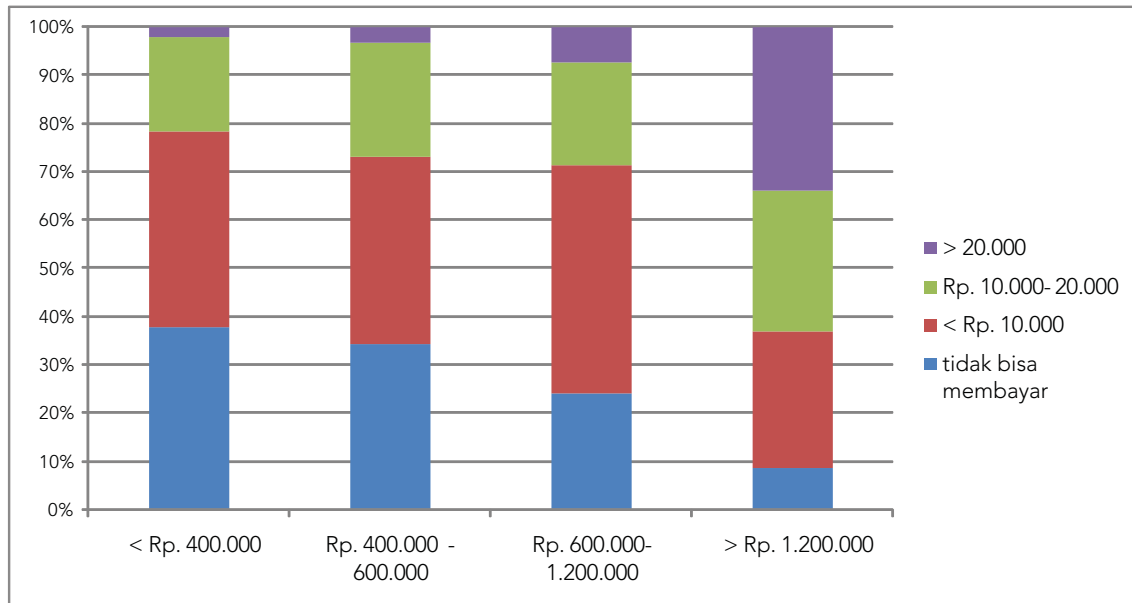
Gambar 5.6: Kemampuan membayar premi menurut gender (%responden)



N = 2,066. Sumber: Survei 2009.

Dalam hal penghasilan, ada korelasi yang positif: semakin tinggi penghasilan seseorang, maka semakin besar premi yang ingin dibayarkan (lihat Gambar 5.7).

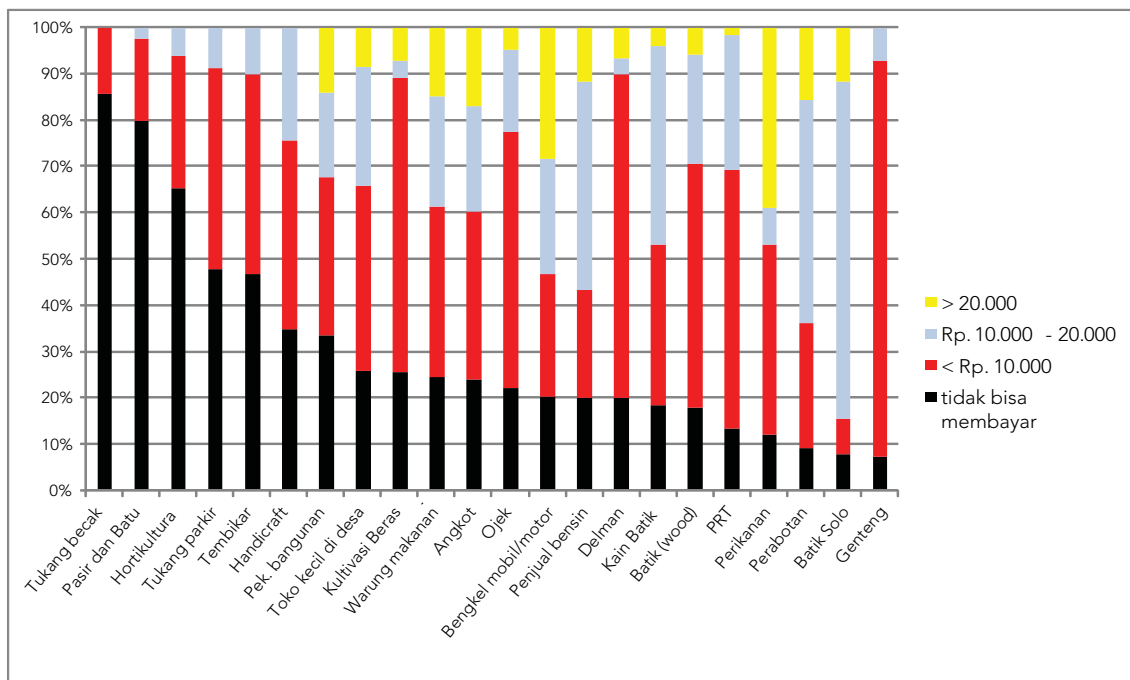
Gambar 5.7: Kemampuan membayar premi menurut kategori penghasilan (%responden)



N = 1,929. Sumber: Survei 2009.

Untuk ke-22 sub sektor ini, Gambar 5.8 dan Lampiran 6 memperlihatkan perbedaan kemampuan dan kemauan responden untuk membayar premi. Di beberapa sektor, yaitu tukang becak, pasir & batu, dan buruh hortikultura, sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka tidak mampu membayar premi, sementara di sub sektor lain, pangsa responden yang menyatakan tidak mampu membayar premi adalah sekitar 10% atau kurang, yaitu PRT, nelayan, tukang perabotan, batik (Solo) dan genteng.

Gambar 5.8: Kemampuan membayar premi menurut sub sektor (%responden)



N = 2,068. Sumber: Survei 2009.

5.3 Kesimpulan: Permintaan akan jaminan sosial

Di antara berbagai elemen jaminan sosial, prioritas utama tenaga kerja informal adalah asuransi kecelakaan kerja (36%). Hal ini terkait dengan persepsi sebagian besar responden tentang pekerjaan mereka yang berbahaya dan/atau rentan kecelakaan. Prioritas kedua adalah asuransi kesehatan kerja (29%). Ia bervariasi tergantung sub sektor dan daerah sampel; misalnya, di Kupang dan Yogyakarta asuransi kecelakaan adalah lebih penting (dinyatakan lebih dari separoh responden), sementara di Jakarta, asuransi kesehatan relatif lebih penting. Namun, bagi tenaga kerja informal perempuan, kesehatan adalah prioritas nomor satu (31%) sedangkan asuransi kecelakaan nomor dua (25%). Perbedaan prioritas yang disampaikan responden di 22 sub sektor ini dapat membantu menetapkan target paket khusus untuk kegiatan tertentu. Di samping hasil temuan menarik bahwa asuransi kecelakaan memiliki prioritas yang lebih rendah bagi mereka yang memiliki tingkat penghasilan lebih rendah, namun mereka lebih mengharapkan adanya pensiun dan asuransi kesehatan untuk anggota keluarga mereka.

Yang mengejutkan adalah bahwa 80% responden mau memberikan kontribusi finansial mereka secara teratur. Metoda pembayaran yang lebih disukai adalah pembayaran bulanan. Jumlah yang disebutkan responden relatif rendah: 64% siap memberikan kontribusi antara Rp 1 sampai Rp 20.000 per bulan. Namun, perlu diingat bahwa ini hanya merupakan penawaran awal dan kedua, 11% responden mau membayar lebih dari Rp. 20.000 per bulan yaitu jumlah yang hampir setara dengan apa yang diharuskan program Jamsostek, terpisah dari porsi pengusaha. Separoh dari 11% responden ini adalah pengusaha, dan banyak di antaranya tinggal di Kupang (dimana 30% mau membayar > Rp 20.000). Menurut gender, hanya sedikit perbedaan di kategori atas dimana perempuan mau membayar lebih dari Rp. 20.000 per bulan. Secara umum, semakin tinggi penghasilan seseorang maka semakin besar premi yang ingin mereka bayarkan. Informasi tentang sub sektor dapat digunakan untuk menyusun paket asuransi yang ditargetkan.

6

Dampak krisis keuangan global saat ini terhadap perekonomian informal

Dalam penelitian ini, dampak krisis global dapat diuraikan menjadi dua yaitu:

- 1) Dampak yang dirasakan 2.068 tenaga kerja informal yang diwawancarai, dan
- 2) Dampak yang dirasakan dan dialami oleh 15 orang pekerja sektor formal yang di-PHK.

6.1 Dampak krisis terhadap Tenaga kerja informal

Dampak krisis global dirasakan 2.068 tenaga kerja informal yang diwawancarai melalui empat pertanyaan yang tercantum dalam Tabel 6.1.

Table 6.1: Empat pertanyaan tentang dampak krisis global

Nr.	Akronim	Pertanyaan
1	Dampak	Apakah Anda merasakan dampak krisis global terhadap situasi pekerjaan Anda sejak krisis melanda Indonesia bulan November 2008 yang lalu?
2	Pekerjaan	Apakah lebih sulit mencari pekerjaan untuk jenis usaha Anda akibat Krisis global?
3	Order	(Hanya untuk pengusaha:) Apakah lebih sulit memperoleh order akibat krisis global?
4	Partisipasi	Apakah Anda mengetahui masuknya pekerja formal yang di-PHK selama beberapa bulan belakangan ini?

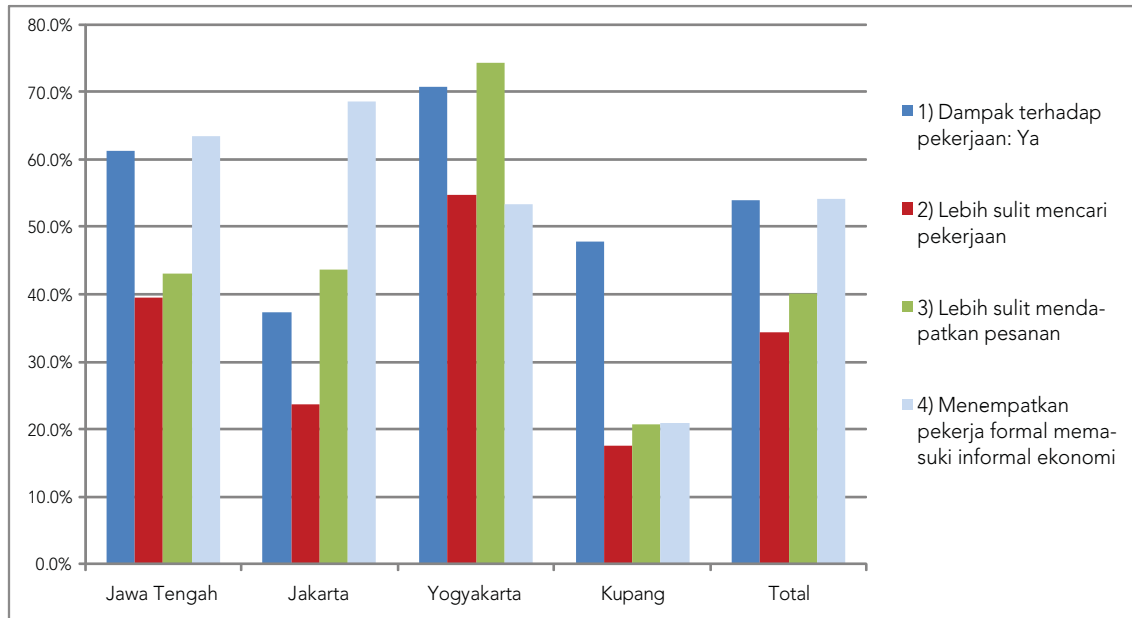
Sebagian besar tenaga kerja informal (54%) merasakan dampak krisis global terhadap pekerjaan mereka serta mengetahui masuknya pekerja sektor formal yang di-PHK dalam pekerjaan mereka. Tidak ada perbedaan besar dalam status pekerjaan (+/- 5%). Di samping itu, hanya 40% pengusaha informal menyatakan lebih sulit memperoleh order sejak awal krisis (lihat Gambar 6.1).

Perempuan secara konsisten merasakan dampak krisis lebih rendah dari laki-laki (sekitar 10% basis poin, kecuali masuknya mantan pekerja formal (sekitar 55%). Walaupun diperkirakan kota Jakarta yang lebih terbuka secara global akan menerima dampak yang paling parah, namun perkiraan ini

ternyata salah, kecuali dalam hal melonjaknya pekerja yang di-PHK (lihat Gambar 6.1). Tampaknya para pekerja ini mencari peluang kerja alternatif di ibukota.

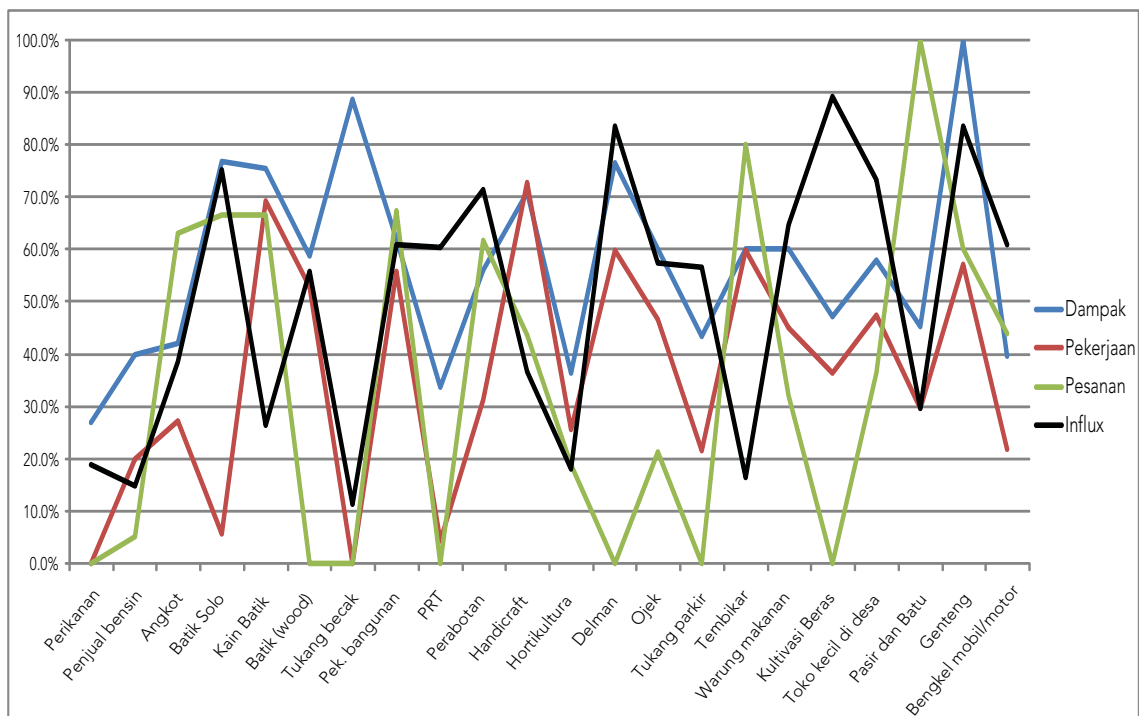
Jawaban yang diberikan berdasarkan sub sektor memberikan informasi menarik tentang 10 sub sektor dimana lebih dari 70% of responden menyatakan dampak nyata krisis ini (lihat Gambar 6.2); hal ini perlu dianalisa secara lebih mendalam.

Gambar 6.1: Krisis global: 4 Pertanyaan singkat (untuk keterangan, lihat Tabel 6.1)



Pertanyaan 1: N=2066; Pertanyaan 2: N=2062; Pertanyaan 3: N=447; Pertanyaan 4: N=2067. Sumber: Survei 2009.

Gambar 6.2: Krisis global berdasarkan Sub sektor (untuk penjelasan lihat Tabel 6.1)



N=2066, 2062, 447 & 2067. Sumber: Own Survey 2009.

6.2 Dampak krisis terhadap Tenaga kerja formal: Studi kasus tentang pekerja di sektor formal yang di-PHK

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui situasi sekelompok tenaga kerja formal yang di-PHK perusahaan mereka akibat krisis global. Jumlah responden adalah 15 pekerja dari 7 perusahaan yang ada di Salatiga dan daerah sekitarnya. Wawancara ini dilakukan bulan Mei 2009, menggunakan sebuah kuesioner yang teratur rapi.

Karakteristik responden sebelum di-PHK

Sebagian besar responden (10 dari 15) adalah perempuan muda; separoh dari mereka belum menikah, rata-rata usia mereka 32 tahun yaitu dari 20 sampai 49 tahun, dengan jumlah tanggungan rata-rata 2. sekitar dua pertiga dari mereka memiliki latar belakang pendidikan yang relatif baik yaitu lulus SMA. Sebagian besar dari mereka tidak punya pendidikan non formil.

Responden sudah bekerja di perusahaan yang sama selama 1-5 tahun, dan mayoritas (60%) berstatus karyawan tetap. Sebelum mereka di-PHK sebagian besar dari mereka bekerja di bagian produksi dan hanya 2 yang menangani pekerjaan administratif. Biasanya mereka bekerja 6 hari seminggu dan 8 jam sehari. Untuk memperoleh pekerjaan, sekitar 60% mengajukan lamaran mereka melalui aplikasi tertulis ke perusahaan. Rata-rata penghasilan yang mereka terima adalah sekitar Rp 880.000 yaitu berkisar antara Rp 500 ribu sampai Rp 2,25 juta. Sekitar 60% dari pekerja ini dilindungi oleh Jamsostek, dan salah seorang pekerja bahkan sudah memiliki asuransi swasta. Satu pabrik terpaksa memberhentikan 10 sampai 360 orang karyawan. Alasan pemberhentian ini umumnya terkait dengan jumlah order yang berkurang akibat krisis keuangan global, dan pertimbangan efisiensi pabrik agar lebih bersaing. Sewaktu mereka di-PHK, sepertiga di antaranya tidak memperoleh kompensasi apapun, dan kelompok ini termasuk semua pekerja kontrak. Sementara mereka yang punya status permanen menerima beberapa bentuk kompensasi: 5 orang pekerja memperoleh 50 sampai 100% gaji bulanan mereka, dan sebagian dari mereka jumlah yang cukup besar (2 juta rupiah, dan salah seorang responden bahkan mengaku menerima Rp 15 juta). Perbedaan kompensasi ini tentunya sebagai akibat dari berbagai faktor, misalnya kondisi keuangan pabrik dan jabatan pekerja di perusahaan tersebut.

Situasi sekarang

Perasaan para pekerja saat di-PHK padanya umumnya hampir sama yaitu kecewa, bingung dan stres. Namun, sebagian besar dari mereka berharap bisa segera kembali bekerja di perusahaan mereka, bahkan sebagian di antaranya berharap dapat kembali bekerja dalam waktu dua atau tiga bulan mendatang dan mengisi jabatan yang sama. Di antara responden, 3 orang sudah memperoleh pekerjaan di perusahaan formal yang lain tapi separoh di antaranya (8 pekerja) beralih ke perekonomian informal untuk memperoleh pekerjaan; empat orang sebagai pengusaha dan 4 orang bekerja sebagai buruh. 4 pekerja tetap menganggur. Penghasilan rata-rata mereka adalah Rp 745.000, yaitu berkisar antara Rp 0 sampai Rp 3 juta (termasuk 4 orang pekerja yang masih menganggur).

Di pekerjaan mereka yang baru, hanya 2 pekerja yang dilindungi jaminan sosial (1 Jamsostek dan yang 1 lagi dilindungi jaminan sosial perusahaan swasta). Alasan mengapa yang lain tidak dilindungi jaminan sosial adalah: penghasilan rendah, bukan prioritas, atau tidak disediakan perusahaan tempat mereka bekerja sekarang. Sebagian besar pekerja ini dilibatkan dalam kegiatan sosial, seperti PKK atau kegiatan lingkungan seperti RT. Hanya 2 di antaranya tidak dilibatkan dalam kegiatan sosial apapun.

Permintaan akan jaminan sosial

Sebagian besar responden menyatakan bahwa dana pensiun sebagai prioritas pertama mereka. Hal ini mungkin terkait dengan pengalaman pernah di-PHK dari perusahaan formal mereka. Prioritas kedua adalah asuransi kesehatan untuk keluarga, lalu diikuti jaminan sosial untuk pendidikan. Walaupun sekarang pendidikan digratiskan melalui undang-undang, namun pada faktanya banyak orang harus membayar dalam jumlah yang besar bahkan sewaktu mereka ingin memasukkan anak mereka ke sekolah umum. Dalam hal keinginan mereka membayar jaminan sosial, dijumpai bahwa sebagian besar responden (53%) menyatakan bahwa mereka mampu membayar antara Rp. 10.000 – Rp 20.000, dan sebagian besar dari mereka lebih suka membayar setiap bulan.

6.3 Kesimpulan: Dampak krisis global

54% tenaga kerja informal merasakan dampak krisis terhadap pekerjaan mereka, serta mengetahui masuknya pekerja sektor formal yang di-PHK dalam pekerjaan mereka. Tidak ada perbedaan besar dalam hal status pekerjaan mereka (+/- 5%). Di samping itu, hanya 40% pengusaha informal yang kesulitan mendapatkan order sejak awal krisis global. Perempuan secara konsisten kurang merasakan dampak krisis ketimbang laki-laki yaitu dengan perbedaan sekitar 10%-point, kecuali tentang masuknya pekerja sektor eks-formal (sekitar 55%). Walaupun diperkirakan kota Jakarta yang lebih terbuka secara global akan menerima dampak yang paling parah, namun perkiraan ini ternyata salah, kecuali dalam hal melonjaknya pekerja yang di-PHK. Tampaknya para pekerja ini mencari peluang kerja alternatif di ibukota. Jawaban yang diberikan berdasarkan sub sektor menyediakan informasi yang menarik tentang adanya 10 sub sektor dimana lebih dari 70% responden menyatakan dampak nyata dari krisis ini; dan hal ini perlu dianalisa lebih jauh.

Beberapa wawancara telah diadakan terhadap 15 orang pekerja sektor formal yang di-PHK dari beberapa pabrik tekstil, garmen dan perabotan di Jawa Tengah untuk mengetahui dampak krisis global. Dari ke 15 orang pekerja ini di awal tahun 2009, empat di antaranya masih tetap menganggur, sementara lebih dari separohnya (delapan orang) sudah bekerja di sektor informal. Walaupun upah rata-rata ke- 15 pekerja tidak berubah jauh, namun tidak adanya jaminan sosial sangat mempengaruhinya: 80% di antaranya kini berupaya kembali ke pabrik asal mereka, dengan harapan dapat kembali mengisi jabatan mereka sebelumnya.

7

Peran pemerintah daerah

Dirasakan bahwa peran pemerintah daerah di bidang jaminan sosial semakin penting sejak kebijakan desentralisasi dilaksanakan. Bahkan beberapa pemerintah daerah tertentu merancang sistem jaminan sosial mereka sendiri secara paralel dengan sistem-sistem jaminan sosial yang dimiliki pemerintah pusat dan Jamsostek. Oleh karena itu, satu bab lain akan menerangkan tentang peran pemerintah daerah, meneliti kebijakan desentralisasi, kebijakan inovatif di Solo serta kegiatan tindak lanjutnya.

7.1 Kebijakan desentralisasi

“Diluncurkan secara resmi pada tahun 2001, desentralisasi wewenang pemerintahan merupakan salah hal program reformasi yang paling penting di Indonesia. Baik pendukung maupun pengeritik program ini mengakui bahwa desentralisasi telah mengubah peta hubungan politik antara pusat dan daerah. Namun, sebuah penelitian yang mendalam tentang dampak desentralisasi menunjukkan adanya perbedaan besar di negeri ini. Penelitian terbaru menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang pemerintah daerah dan korupsi merajalela di beberapa daerah, tapi juga meningkatkan demokrasi dan munculnya pemerintahan yang efektif di daerah-daerah lain.” (Erawan 2007: 55).”

Otonomi daerah atau desentralisasi, sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, mulai diperlakukan pada tanggal 1 Januari 2001, dan lebih dipercepat melalui revisi undang-undang ini pada bulan September 2004. Otonomi daerah memberi devolusi Kementerian dan Departemen pusat ke pemerintahan daerah. Otonomi daerah juga memperkuat demokrasi melalui apa yang disebut Pilkada, yaitu pemilihan langsung kepala daerah seperti gubernur, walikota dan camat (lihat Erb & Sulistiyanto 2009).

Utilitas dan perusahaan publik seperti Jamsostek dan lima kementerian pusat (yaitu Depkeu, Dephan, Deplu, Depag) dikecualikan dari proses devolusi ini. Pemerintah daerah diberi tanggung-jawab atas kegiatan sektor publik di bidang kesehatan, pendidikan, dan prasarana desa dan kota, di samping otoritas atas lebih dari 2,3 juta mantan pegawai pemerintah pusat. Proses ini diterapkan untuk memberi wewenang tanggung-jawab lokal atas permasalahan lokal, dan mendorong partisipasi dan relevansi daerah atas layanan dan inisiatif sektor publik

Pendaftaran pekerja oleh perusahaan diwajibkan sejak tahun 1981 (UU No. 7), dan perlu dilakukan di Depnaker, Direktorat Pengawasan Tenaga Kerja. Sejak UU Desentralisasi tahun 1999, pekerja harus didaftarkan di DISNAKER yang dikendalikan otoritas daerah.

Angelini & Hirose (2004) menegaskan bahwa masalah administrasi program-program perlindungan sosial dalam situasi terdesentralisir adalah karena adanya berbagai tingkat administratif di Indonesia, khususnya administrasi pusat, provinsi (33), Kabupaten (302), kotamadya (89) dan Kecamatan (4.918).

7.2 Kebijakan pemerintah daerah yang inovatif in Solo

Pada dasarnya, pemerintah daerah memainkan peran strategis dalam mengembangkan perekonomian informal, sehingga menunjukkan bahwa pertumbuhan dan kontribusi positif terhadap perekonomian daerah tergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Salah satu sub sektor informal penting adalah pedagang kaki lima yang biasanya merupakan salah satu kegiatan informal yang sulit ditangani pemerintah daerah. Pemerintah daerah Solo saat ini memberi perhatian serius terhadap penyusunan peraturan tentang pedagang kaki lima (PKL). Pada tahun 2005, ada 5.817 PKL di Solo, tapi angka ini berkurang menjadi 3.883 sejak tahun 2007.

Tidak seperti kota-kota lain di Indonesia, kebijakan kota Solo tidak dimaksudkan untuk menghapus usaha PKL, tapi menawarkan asuranci dengan memformalisasikan PKL. Pemerintah Solo berpendapat bahwa PKL adalah sektor potensial penting yang membantu pertumbuhan ekonomi lokal. Berdasarkan pandangan ini, kebijakan pemerintah tentang PKL diarahkan untuk memberdayakan dan memanfaatkan PKL. Saat ini, PKL diminta untuk menjaga beberapa prinsip dasar, seperti kebersihan dan kerapian, dan mereka tidak boleh mengganggu tata ruang publik.

Di kota Solo, pengelolaan PKL diintegrasikan dalam tata kelola kota dimana PKL harus tetap berjualan di beberapa daerah tertentu, sehingga dapat memformalkan keberadaan mereka serta mempertahankan pertumbuhan PKL. Pertumbuhan nol atau *zero growth* berarti bahwa pemerintah mempertahankan keberadaan PKL yang ada tapi tidak membuka peluang bagi PKL baru. Konsep dasar pengelolaan PKL adalah sebagai berikut:

- Menyediakan lingkungan yang eksklusif bagi PKL
- Menyediakan jalan-jalan khusus PKL

Kedua konsep ini dilaksanakan melalui:

- Relokasi
- Penyediaan tempat oleh pemerintah daerah
- PKL diharuskan menggunakan tenda
- PKL diharuskan menggunakan gerobag.

Untuk relokasi dalam rangka mengelola PKL, pemerintah daerah menerapkan 2 pendekatan yaitu dialog dan pendekatan budaya. Sebagai tahun, di tahun 2006, pemerintah daerah merelokasi 989 PKL secara damai dari Monjari (lokasi sebelumnya) ke Notoharjo Semanggi (lokasi baru). Proses negosiasi untuk relokasi ini memakan waktu 6 bulan dan 52 pertemuan antara pemerintah dengan PKL. Untuk pertemuan dengan PKL ini, negosiasi dilakukan di rumah dinas walikota yang biasa dibuka untuk pejabat tinggi pemerintahan. Di lokasi yang baru ini, pemerintah menyediakan sebuah toko gratis untuk setiap PKL. Sebaliknya, PKL diwajibkan membayar retribusi sebesar

Rp 3.000 per toko setiap hari. Setelah mereka pindah ke lokasi baru ini, pemerintah memberi mereka SIUP (surat izin usaha perdagangan) dan TDP (tanda daftar perusahaan) secara gratis. Dengan adanya perijinan ini, status PKL menjadi resmi. Keuntungan PKL menjadi pedagang resmi adalah bahwa mereka dapat mengakses pinjaman bank. Untuk membantu kebijakan *zero growth*, pemerintah mengadakan konsensus secara teratur (bekerjasama dengan universitas setempat), untuk menyediakan database terbaru tentang PKL. Sementara pemantauan PKL dilakukan oleh pegawai kecamatan dan kelurahan.

Seperti yang disebutkan di atas, di samping relokasi, strategi pemerintah daerah Solo adalah membangun tempat tinggal, dan mewajibkan PKL menggunakan tenda dan gerobag. Walaupun PKL harus mematuhi berbagai peraturan yang ditetapkan pemerintah daerah namun mereka sudah bukan pedagang liar di lokasi-lokasi tersebut. Pengaturan seperti ini tentunya memberi keamanan yang lebih bagi PKL dalam melaksanakan usaha mereka karena mereka tidak dipaksa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain.

Terkait pengembangan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja informal, pemerintah daerah juga memainkan peran penting dengan memperkenalkan para pekerja dengan organisasi-organisasi jaminan sosial serta menciptakan mekanisme pengumpulan dana bagi para pekerja. Di Solo, pemerintah daerah memfasilitasi akses ke Jamsostek. Para pekerja ini menerima subsidi premi selama 5 bulan pertama. Di samping itu, untuk mempermudah pengambilan premi, pemerintah juga membantu pendirian beberapa organisasi tenaga kerja informal.

7.3 Rekomendasi

Rekomendasi yang dihasilkan dari informasi di atas adalah bahwa analisa lebih lanjut diperlukan pemerintah daerah terkait jaminan sosial dengan meneliti beberapa kabupaten dan/atau kotamadya tertentu. Terkait kebijakan inovatif di Solo, dapat disimpulkan bahwa sejauh ini belum ada informasi tentang reaksi dan respon PKL terhadap program ini, atau tentang efektivitas lembaga dalam membantu pengumpulan dana. Oleh karena itu, penelitian mendalam diperlukan untuk menguraikan aspek-aspek ini.

8

Rekomendasi: Tindak lanjut melalui pendekatan multi- disiplin

Penelitian dan presentasi hasil penelitian dalam sebuah lokakarya yang diselenggarakan di Hotel Sultan Jakarta hari Rabu tanggal 17 Juni 2009 telah menciptakan sinergi antar organisasi seperti ILO, Jamsostek, Depnaker dan Bappenas, untuk menangani jaminan sosial bagi tenaga kerja informal. Momentum yang diciptakan ini kini perlu dipertahankan dan digunakan untuk menetapkan beberapa proyek percontohan skala kecil sebagai persiapan serta tahap transisi menuju sebuah proyek skala besar yang melibatkan donor selama bertahun-tahun. Proyek yang lebih besar ini diharapkan memiliki cakupan yang lebih besar daripada jaminan sosial yang ada sekarang, ini menunjukkan betapa pentingnya persoalan ini. Jaminan sosial diperkirakan akan lebih mudah memberikan layanan apabila dimasukkan dalam sebuah proyek multi-disiplin yang memiliki empat pilar berikut ini:

- 1) "Melindungi masyarakat yang belum dilindungi": Perluasan cakupan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja informal.
- 2) "Mengelola kelompok masyarakat yang belum dikelola": Pengaturan pekerja sendiri melalui mediasi serikat pekerja dan LSM tenaga kerja.
- 3) "Meningkatkan bisnis informal": Meningkatkan produktivitas dan basis penghasilan tenaga kerja informal supaya kemampuan mereka membayar premi jaminan sosial dapat ditingkatkan.
- 4) "Melibatkan partisipasi Pemerintah daerah": Pada satu sisi, melibatkan otoritas pemerintah daerah dalam pendekatan terpadu di tingkat daerah melalui Pembangunan Ekonomi Lokal (LED) dan melalui Kemitraan Swasta Publik (PPP), dan di sisi lain, dengan lembaga nasional termasuk Depnaker dan Jamsostek.

Pada bagian berikut ini, kita akan membahas beberapa prinsip yang muncul dari penelitian sekarang yang penting dalam memperluas jaminan sosial bagi tenaga kerja informal. Kemudian kita akan menguraikan beberapa proyek persiapan dan transisi berskala kecil serta proyek terpadu jangka panjang. Pada akhirnya, kami akan mengajukan suatu peta jalan untuk ditindak-lanjuti.

8.1 Prinsip

ILO telah menyusun Panduan Penyusunan Kebijakan untuk Memperluas Perlindungan jaminan sosial (Hiroshi, 2008). Panduan ini mengusulkan agar setiap skema jaminan sosial mencakup tujuh elemen pragmatis berikut ini:

- 1) Skema ini harus menjangkau semua orang;
- 2) Harus efektif dalam membantu masyarakat keluar dari kemiskinan;
- 3) Harus menyediakan manfaat yang memadai, terpercaya dan berkelanjutan;
- 4) Harus dapat dipertahankan secara finansial dan administratif untuk jangka panjang;
- 5) Harus mendukung penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak dan pencapaian kinerja ekonomi yang baik;
- 6) Harus memanfaatkan secara efisien pajak dan kontribusi pekerja dan pengusaha;
- 7) Harus dirancang, dikelola dan diatur melalui partisipasi yang memadai dan adil dari Pemerintah, Pekerja dan Pengusaha, berdasarkan dialog sosial dan konsensus nasional.

Berdasarkan analisa kami dalam laporan ini, kami dapat menegaskan prinsip-prinsip berikut ini untuk ditindak-lanjuti:

- Jumlah tenaga kerja informal semakin meningkat dan akibat krisis global, pangsa relatifnya mungkin juga mengalami peningkatan.
- Secara umum, lebih sulit menjangkau tenaga kerja informal daripada tenaga kerja formal, yang dapat dijangkau melalui pengusaha terdaftar.
- Oleh karena itu, eksplorasi diperlukan tentang partisipasi lembaga penengah:
 - ♦ Kantor cabang Jamsostek di daerah;
 - ♦ Organisasi pemerintah daerah (Dapatkah pemerintah daerah berfungsi sebagai pengusaha?): Bekerjasama dengan pemerintah pusat daripada mengembangkan sistem mereka sendiri;
 - ♦ Organisasi kegiatan sosial di tingkat masyarakat bahwa di beberapa daerah pilihan, seperti PKK di Jawa Tengah;
 - ♦ Serikat pekerja 'formal';
 - ♦ Pemimpin skema asuransi mikro berbasis kelompok;
 - ♦ Fasilitator eksternal;
 - ♦ Pemimpin / Agen (dapat diberi komisi: misalnya untuk mengumpulkan premi, misalnya 12,5 %); dan
 - ♦ Mencari kemitraan inovatif, misalnya perusahaan asuransi komersial, LMS dan koperasi, sebagaimana yang disimulasikan ILO melalui skema bantuan asuransi mikronya.
- Untuk meyakinkan tenaga kerja informal tentang pentingnya paket asuransi ini bagi mereka, dibutuhkan proses bertahap yang lama seperti yang diperlihatkan melalui penelitian tahun 2008 tentang perekonomian informal dan pengalaman serikat pekerja.
- Untuk mencakup porsi pengusaha dari premi jaminan sosial bagi tenaga kerja informal, kita dapat mempertimbangkan hubungan antara Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dengan kedua program Bantuan Tunai Bersyarat (CCT) (yang satu bersifat individual

sementara yang satu lagi berbasis masyarakat) yang sedang dilaksanakan Pemerintah Indonesia (dianggap ILO sebagai Praktek Terbaik untuk memperluas jaminan sosial).

- Perluasan cakupan tenaga kerja informal harus dilakukan secara bertahap dan melalui beberapa paket yang ditargetkan untuk tenaga kerja informal: misalnya pelaksanaan bertahap, dan mencakup asuransi kecelakaan dan kesehatan.
- Fleksibilitas diperlukan (berbeda dengan UU SJSN yang mewajibkan pekerja mengambil semua komponen jaminan sosial sekaligus sehingga mengurangi fleksibilitas).

Persoalan paralel:

- Apa yang terjadi dengan UU SJSN, dan apa yang akan dilakukan dewan yang baru ditunjuk? Bagaimana hasilnya dapat mempengaruhi tenaga kerja informal?
- Jamsostek akan dikonversikan dari PT (perusahaan yang menghasilkan laba) menjadi Trust Fund (nirlaba), walaupun perusahaan nirlaba sudah diupayakan sejak UU SJSN diberlakukan tahun 2004.

8.2 Proposal proyek persiapan dan transisi

Sebelum kami ajukan proyek-proyek aktual, perkenan kami untuk terlebih dahulu melihat pelajaran yang kami peroleh dari penelitian saat ini untuk Jamsostek dan ILO.

Pelajaran untuk JAMSOSTEK:

- Mencari program-program yang fleksibel dan sangat ditargetkan untuk memperluas perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja informal
- Meneliti kemungkinan hubungan dengan program-program nasional seperti seperti PNPM dan CCT
- Difokuskan pada kelompok-kelompok sasaran; misalnya paket yang berbeda untuk provinsi tertentu:
 - ♦ Asuransi kecelakaan: Yogyakarta dan Kupang (daerah perkotaan)
 - ♦ Kesehatan: Jakarta
 - ♦ Pensiun: daerah pedesaan (Jawa Tengah)
- Program peningkatan kesadaran masyarakat/pendidikan
 - ♦ Kawasan Indonesia Timur
 - ♦ Perempuan
 - ♦ Pemakaian beberapa stasiun radio masyarakat, seperti media VHR (yang punya jaringan luas sebanyak 350 stasiun radio masyarakat yang tersebar di negeri ini)
 - ♦ Dikombinasikan dengan musik yang dirancang khusus untuk mempromosikan pemakaian jaminan sosial, ini dapat menjadi instrumen yang efektif.
- Hubungan dengan Depnaker: misalnya inspektur tenaga kerja di Jamsostek.

Pelajaran untuk ILO:

- Analisa lebih lanjut tentang data 22 sub sektor (lihat Lampiran 6)
- Penelitian lebih mendalam tentang beberapa sub sektor pilihan
- Penelitian mendalam tentang kebijakan baru di Solo: khususnya survei tenaga kerja informal untuk mengetahui respon mereka
- Proposal Proyek Kerjasama Teknis: Proyek percontohan selama 2 sampai 3 tahun: Pelajaran perlu diambil dari tahap percontohan dan pengaturan kemudiah dapat ditingkatkan dan ditiru.
- Mendorong pengembangan skema-skema asuransi mikro, misalnya melalui skema percontohan (lihat Angelini & Hoirose, 2004): Berbasis kelompok (tipe Grameen) dianggap sebagai alternatif sementara yang baik untuk cakupan pemerintah berskala penuh.

Proposal nyata untuk proyek persiapan dan transisi mencakup:

- I. Penelitian beberapa jenis pemerintah daerah:
 - a. Pemerintah daerah yang bekerjasama dengan pemerintah nasional di bidang jaminan sosial
 - b. Pemerintah daerah yang mengembangkan sistem jaminan sosialnya sendiri
 - c. Pemerintah daerah yang tidak terlibat dalam jaminan sosial.Memilih satu kotamadya dan satu kabupaten untuk setiap jenis ini dan meneliti ke empat daerah.
- II. Penelitian mendalam tentang beberapa sub sektor percontohan bekerjasama dengan Jamsostek untuk menetapkan beberapa cara nyata untuk memperluas jaminan sosial di lapangan serta meneliti peran beberapa jenis organisasi perantara.
- III. Penelitian tentang kebijakan daerah yang inovatif di Solo untuk memformalisasikan perekonomian informal
- IV. Penelitian kualitatif tentang pertanyaan "Siapa yang perlu mengumpulkan dana?" Beberapa alternatif yang ada adalah koperasi daerah, koordinator sektor, dan/atau melalui tagihan listrik. Mencari mekanisme yang paling aman untuk mengirim uang ke 'pengelola' dana. Dianjurkan adanya penyediaan informasi secara online untuk mempermudah akses dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Peran pemerintah daerah adalah menciptakan program-program 'efektif' dan ikut melakukan pembayaran.

Kerangka Acuan (TOR) umum telah dipersiapkan untuk keempat proyek kecil ini, dimana pada tahap berikutnya, jika disetujui pemangku kepentingan terkait (khususnya ILO dan Jamsostek), dapat dipisahkan dari keempat TOR ini. Secara umum, TOR dilampirkan pada Lampiran 7.

8.3 Proposal proyek terpadu selama beberapa tahun

Proposal proyek terpadu selama beberapa tahun akan diuraikan di sini secara terperinci sebagai proyek persiapan yang akan memberikan masukan lebih lanjut. Di bawah ini kami akan membahas keempat pilar proyek yang diusulkan ini.

I. “Melindungi Masyarakat yang Belum Dilindungi”

Perluasan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja informal. Dasarnya adalah penelitian saat ini.

II. “Mengelola Masyarakat yang Belum Dikelola”

Pengelolaan secara mandiri para pekerja melalui serikat pekerja dan LSM buruh.

Sebagai dasarnya, kita dapat menggunakan antara lain penelitian yang dilakukan terkait organisasi tenaga kerja informal oleh serikat pekerja (lihat VanderLoop dan Andadari 2008).

III. “Meningkatkan Bisnis informal”

Meningkatkan produktivitas dan basis penghasilan tenaga kerja informal agar kemampuan mereka membayar premi jaminan sosial dapat ditingkatkan.

Elemen-elemannya adalah peningkatan kapasitas, memperluas Layanan Pengembangan Bisnis (BDS) dan keuangan (kredit mikro).

IV. “Melibatkan Partisipasi Pemerintah Daerah”

Melibatkan partisipasi pejabat pemerintah daerah dalam pendekatan terpadu di tingkat lokal pada satu sisi melalui Pengembangan Ekonomi Lokal (LED) dan melalui Kemitraan Swasta Publik (PPP), dan di sisi lain, dengan lembaga-lembaga nasional termasuk Depnaker dan Jamsostek.

8.4 Peta Jalan

Peta Jalan mencakup:

- Studi kelayakan
- Proyek percontohan
- Urutan langkah yang diperlukan untuk Cakupan Universal (UC) jaminan sosial sebagaimana yang ditetapkan konstitusi yang menjadi tanggung-jawab pemerintah
- Pilihan transisi
- Peningkatan kapasitas dari lembaga pelaksana
- Peningkatan kesadaran masyarakat dan visibilitas
- Berbagai persoalan terperinci yang perlu diputuskan adalah:
 - ♦ Desain paket tunjangan yang mendasar;
 - ♦ Pemilihan kelompok masyarakat yang berhak atas subsidi umum;
 - ♦ Identifikasi dan pengumpulan dana bagi tenaga kerja informal;
 - ♦ Mekanisme upah bagi penyedia layanan kesehatan;
 - ♦ Siapa yang akan mengurus program ini.

Pendanaan

Proyek persiapan yang relatif kecil perlu didanai dalam waktu relatif singkat; oleh karena itu, idealnya pendanaannya datang ILO, JAMSOSTEK, atau dana fleksibel lainnya. Proyek beberapa tahun perlu didanai donor dan membutuhkan waktu persiapan yang cukup lama.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner survei

Kuesioner tentang Perlindungan jaminan sosial untuk Pekerja di Sektor Perekonomian
Informal di Indonesia; ILO / PT JAMSOSTEK, Jakarta

Daerah sampel: ☐ Jawa Tengah ☐ Jakarta ☐ Yogyakarta ☐ Kupang

RT / RW / Desa:

Lokasi (jalan):

Tanggal: , Mei / Juni 2009. Nomor:

A – Pendahuluan

- 1) Jenis usaha informal:

☐	Pertanian	☐	Perdagangan & restoran
☐	Pertambangan	☐	Transportasi
☐	Manufaktur	☐	Jasa
☐	Konstruksi	☐	Lain-lain, sebutkan:
- 2) Sebutkan kegiatan Anda:
- 3) Responden adalah: ☐ Perempuan ☐ Laki-laki ☐ Anak-anak (< 15 tahun)
- 4) Berapa usia Anda? tahun.
- 5) Di provinsi apa Anda lahir?
- 6) Status pernikahan? ☐ Menikah ☐ Belum menikah ☐ Lain-lain:
- 7) Berapa banyak orang yang menjadi tanggungan Anda? orang.
- 8) Bagaimana latar pendidikan Anda?

☐	Tidak pernah sekolah
☐	Tidak lulus SD
☐	Lulus SD
☐	Lulus SLTP/SMP
☐	Lulus SLTA/SMA/SMU
☐	Lulus SMK
☐	Diploma atau Universitas
☐	Lain-lain, sebutkan:.....
- 9) Pernahkah Anda mengikuti pendidikan non-formal? Sebutkan:
- 10) Rata-rata berapa jam Anda bekerja setiap hari? jam
- 11) Berapa hari seminggu? 1 2 3 4 5 6 7
- 12) Sudah berapa lama Anda bekerja?

☐	Kurang dari 1 bulan
☐	Kurang dari 1 tahun (> 1 bulan)
☐	1 s/d 5 tahun
☐	5 s/d 10 tahun
☐	10 tahun atau lebih

13) Bagaimana Anda melakukan pekerjaan Anda?

- ☐ Saya pimpinan (pengusaha)
☐ Saya bekerja sendiri (wiraswasta)
☐ Saya bekerja untuk orang lain (buruh)
☐ Saya bekerja di perusahaan formal (pekerja harian)
☐ Lain-lain, sebutkan:.....

14) (*Khusus pengusaha*):

Berapa banyak laki-laki, perempuan dan anak-anak yang bekerja untuk Anda? (isi di dalam tabel)

Kode	Tipe pekerja	Laki-laki	Perempuan	Anak-anak (<15 tahun)
a	Pekerja tetap			
b	Pekerja harian			
c	Anggota keluarga			
d	Pekerja tanpa upah			
e	Lain-lain:			

15) Apakah Anda punya kontrak kerja tertulis?

☐ Ya ☐ Tidak

a. Bisakah Anda berikan indikasi jumlah uang yang Anda peroleh setiap bulan untuk pekerjaan Anda saat ini? Rp.

16) Bagaimana metoda pembayaran untuk pekerjaan Anda sekarang?

- ☐ Harian
☐ Mingguan
☐ Bulanan
☐ Borongan
☐ Lain-lain:

17) Apakah Anda punya penghasilan tambahan?

☐ Ya ☐ Tidak

Jika YA: a) Apa sumber penghasilan tambahan Anda?

b) Berapa upah Anda per bulan? Rp.

18) Apakah ada aspek yang berpotensi menimbulkan bahaya dalam pekerjaan Anda?

- ☐ Berbahaya atau rentan kecelakaan:
☐ Jam kerja lama / kerja malam:
☐ Berbahaya terhadap lingkungan:
☐ Resiko eksploitasi:
☐ Lain-lain, sebutkan:

19) Apakah Anda menggunakan peralatan dalam melaksanakan tugas Anda saat ini (alat, mesin, kendaraan, dll.)?

☐ Ya ☐ Tidak (lanjutkan ke pertanyaan berikutnya)

Jika YA: 20.1 Jelaskan tentang peralatan tersebut:

Alat:
 Ponsel:
 Mesin:
 Kendaraan:
 Lain-lain:

20.2 Apakah Anda pemilik peralatan utama tersebut di atas?

☐ Ya: Bagaimana Anda memperoleh uang untuk membeli peralatan utama tersebut?

- ☐ Tabungan sendiri
☐ Pinjam dari saudara atau teman
☐ Dari Arisan atau kelompok tabungan informal lain:
☐ Dari lembaga pemerintah:
☐ Dari Bank: Nama Bank:

☐ Tidak: Bagaimana pengaturannya antara Anda dengan pemilik:

- ☐ Saya pinjam (uang) dari pemilik
☐ Pemilik meminjamkannya secara gratis
☐ Lain-lain:

B - Mekanisme penyesuaian tenaga kerja informal saat ini terkait tidak adanya jaminan sosial:

20) Secara umum, ada LIMA jenis jaminan sosial. Misalnya perusahaan milik negara JAMSOSTEK saat ini berminat untuk memperluas cakupannya bagi tenaga kerja informal. Apakah Anda pernah mendengar JAMSOSTEK?

☐ Sudah ☐ Belum

21) Apakah Anda suka dengan jenis jaminan sosial informal atau format saat ini sebagaimana yang tercantum dalam tabel di bawah ini?

ELEMEN JAMINAN SOSIAL	JENIS JAMINAN SOSIAL APA YANG ANDA MILIKI SEKARANG? <i>Sebutkan jenis dan nama organisasi/perseorangan</i>	
	FORMAL*)	INFORMAL **)
1) Asuransi kecelakaan kerja		
2) Asuransi kematian		
3) Asuransi kesehatan pekerja		
4) Asuransi kesehatan untuk anggota keluarga		
5) Dana pensiun		

*) *Jenis formal* misalnya JAMSOSTEK, SIM, Kontrak kerja tertulis, organisasi pemerintah, Bank, dll.

**) *Jenis Informal* misalnya: janji pengusaha, kelompok swadaya/asuransi mikro, bantuan masyarakat, Arisan, dll.

22) Apabila tunjangan-tunjangan ini tidak memadai, apakah ada cara lain dimana Anda dapat mengatasi situasi yang tak terduga (kecelakaan, kematian, biaya kecelakaan yang mahal, dll.)?

☐ Ya ☐ Tidak (lanjutkan ke pertanyaan berikutnya).

Jika YA:

Tolong jelaskan:

.....

23) Jika Anda belum punya perlindungan jaminan sosial sama sekali, apa alasannya?

.....

.....

24) Apakah Anda anggota organisasi sosial?

☐ Ya ☐ Tidak (lanjutkan ke pertanyaan berikutnya).

Jika YA: Sebutkan jenis dua organisasi dimana Anda paling sering terlibat di dalamnya:

1)

2)

Jika TIDAK: Mengapa?

C - Permintaan akan jaminan sosial:

- 25) Kami ingin mengetahui pendapat Anda tentang relevansi jaminan sosial dengan situasi Anda. Jawaban Anda akan membantu kami dalam menyusun paket yang sesuai dengan Anda maupun situasi yang Anda hadapi. Oleh karena itu, kami ingin mengetahui bagaimana pendapat Anda tentang jenis jaminan sosial sesuai prioritasnya. Anda juga dapat menambahkan jenis jaminan sosial yang lain.

ELEMEN JAMINAN SOSIAL	<u>Sebutkan 3 Prioritas Utama</u> <u>Dari 1 sampai 3</u>
1) Asuransi kecelakaan kerja	
2) Asuransi kematian	
3) Asuransi kesehatan pekerja	
4) Asuransi kesehatan untuk anggota keluarga	
5) Dana pensiun	
6) Lain-lain, sebutkan:	

- 26) Pembayaran premi dibutuhkan untuk asuransi jaminan sosial ini. Seberapa besar yang mampu bayar setiap bulan?

☐	Tidak mampu bayar.	
☐	Rp. < 10,000	
☐	Rp. 10,000	- 20,000
☐	Rp. 20,000	- 30,000
☐	Rp. 30,000	- 40,000
☐	Rp. 40,000	- 50,000
☐	Rp. 50,000	- 100,000
☐	Rp. > 100,000	

- 27) Metoda pembayaran apa yang Anda sukai?

☐	Harian
☐	Mingguan
☐	Bulanan
☐	Lain-lain:

- 28) Apakah anda bisa membayar jumlah tersebut secara teratur?
☐ Ya ☐ Tidak.

Jika Tidak:

Sebutkan alasannya:

- 29) **JIKA** Anda tidak berminat mendapatkan perlindungan asuransi di masa mendatang, sebutkan alasannya?

.....

- 30) **JIKA** Anda tidak punya asuransi, siapa yang akan merawat Anda jika Anda menganggur, mengalami kecelakaan, sakit atau sudah tua?

.....

D – Dampak krisis keuangan global saat ini terhadap perekonomian informal:

- 31) Apakah Anda merasakan dampak krisis global terhadap situasi pekerjaan Anda sejak krisis melanda Indonesia mulai bulan November 2008 yang lalu?

☐ Ya ☐ Tidak.

Jika Ya:

Tolong jelaskan:

.....

- 32) Apakah lebih sulit mencari pekerjaan sesuai jenis bisnis Anda akibat Krisis global?

☐ Ya ☐ Tidak.

Jika ya:

Tolong jelaskan:

33) (khusus pengusaha) Apakah lebih sulit mendapatkan order akibat Krisis global?

☐ Ya ☐ Tidak.

Jika ya:

Tolong jelaskan:

.....

34) Apakah Anda mengetahui masuknya pekerja sektor formal yang di-PHK selama beberapa bulan terakhir ini?

☐ Ya ☐ Tidak.

Jika ya:

Tolong jelaskan:

.....

Terima kasih atas kerjasama Anda!

Lampiran 2. Kuesioner studi kasus sektor formal

STUDI KASUS

Kuesioner tentang Perlindungan Jaminan Sosial untuk Pekerja di sektor Perekonomian Informal di Indonesia; ILO / PT JAMSOSTEK, Jakarta

Nama :
 Alamat:
 Tanggal wawancara:

A – Pendahuluan

- 1) Jenis Kelamin Responden: ☐ Perempuan ☐ Laki-laki
- 2) Berapa usia Anda? tahun.
- 3) Status pernikahan? ☐ Menikah ☐ Belum menikah ☐ Lain-lain:
- 4) Berapa orang yang menjadi tanggungan Anda? orang.
- 5) Dimana Anda bersekolah? Sebutkan:
- 6) Apakah Anda pernah mengikuti pendidikan non-formal? Sebutkan:

B. Kondisi kerja sebelumnya (di pabrik dimana Anda di-PHK).

- 7) Di perusahaan apa Anda bekerja sebelumnya: Sebutkan:
- 8) Sebutkan kegiatan khusus Anda:
- 9) Apakah Anda bekerja secara tetap atau berdasarkan kontrak?
☐ Tetap ☐ Kontrak ☐ Lain-lain:
- 10) Berapa hari seminggu Anda bekerja di pabrik tersebut? 1 2 3 4 5 6 7
- 11) Berapa lama Anda bekerja di sana?
☐ Kurang dari 1 bulan
☐ Kurang dari satu tahun (> 1 bulan)
☐ 1 s/d 5 tahun
☐ 5 s/d 10 tahun
☐ 10 tahun atau lebih
- 12) Bagaimana Anda dapat menemukan pekerjaan itu?
☐ Saya ajukan lamaran melalui iklan pabrik tersebut
☐ Saya diminta seorang karyawan SDM
☐ Saya diminta kontraktor lain
☐ Saya diminta saudara/teman
☐ Saya menunggu di pintu gerbang pabrik
☐ Lain-lain, sebutkan:
- 13) Dapatkah Anda sebutkan berapa besar upah Anda per bulan untuk pekerjaan tersebut? Rp.

14) Berapa banyak pekerja yang di-PHK setelah terjadi krisis keuangan global, termasuk Anda? (...orang pekerja yang di-PHK)

15) Mengapa pekerja di-PHK?

Sebutkan:

16) Kompensasi apa yang Anda peroleh dari perusahaan saat Anda di-PHK dan dari siapa?

a) Yang diterima:

b) Diterima dari:

17) Apakah Anda punya asuransi pengangguran?

☐ Ya ☐ Tidak

Jika ya: a) Asuransi jenis apa?.....

b) Tunjangan apa yang Anda terima dari asuransi?

.....

18) Sewaktu bekerja di pabrik, apakah Anda dilindungi oleh JAMSOSTEK atau organisasi jaminan sosial yang lain?

Ya ☐ Tidak

Jika ya: a) Nama: ☐ Jamsostek ☐ Lain-lain:

b) Tunjangan apa yang Anda peroleh dari organisasi tersebut?

.....

C. Situasi Sekarang

19) Kapan Anda di-PHK dari pabrik tersebut dan bagaimana perasaan Anda?

.....

20) Apakah Anda berharap bisa kembali ke pekerjaan Anda sebelumnya?

☐ Ya ☐ Tidak

Jika ya: a) Kapan Anda harapkan bisa kembali bekerja di sana?

b) Apakah Anda berharap bisa mengisi posisi dan upah yang sama?

.....

21) Apakah Anda dapat menemukan pekerjaan baru?

☐ Tidak: Mengapa?

Ke Pertanyaan 31.

☐ Ya: Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

22) Apa pekerjaan Anda sekarang?

23) Sebutkan kegiatan khusus Anda dalam pekerjaan sekarang:

24) Mengapa Anda memutuskan untuk melakukan pekerjaan sekarang?

.....

25) How do you operate in your work?

☐ Saya pimpinan (pengusaha)

☐ Saya bekerja sendiri (wiraswasta)

☐ Saya bekerja untuk orang lain (buruh)

☐ Saya bekerja di perusahaan formal (pekerja harian)

☐ Lain-lain, sebutkan:

- 26) JIKA PENGUSAHA: Berapa banyak laki-laki, perempuan dan anak-anak yang bekerja untuk Anda?
 pekerja laki-laki; pekerja laki-laki; pekerja anak.
- 27) Sudah berapa lama Anda melakukan pekerjaan sekarang? Sebutkan:
- 28) Apakah Anda punya kontrak tertulis untuk pekerjaan ini? ☐ Ya ☐ Tidak
- 29) Dapatkah Anda sebutkan berapa upah Anda per bulan dari pekerjaan Anda saat ini? Rp.
- 30) Bagaimana metoda pembayaran pekerjaan Anda saat ini?
☐ Harian
☐ Mingguan
☐ Bulanan
☐ Borongan
☐ Lain-lain:
- 31) Apakah Anda punya penghasilan tambahan?
☐ Ya ☐ Tidak
Jika ya: a) Apa sumber penghasilan tambahan Anda?
 b) Berapa banyak yang Anda peroleh per bulan? Rp.
- 32) Apakah Anda saat ini dilindungi Jamsostek atau organisasi jaminan sosial lain?
☐ Tidak ☐ Ya: a) Nama organisasi:
 b) Pembayaran:
 c) Tunjangan aktual atau yang diharapkan:
- 33) Jika Anda belum punya perlindungan jaminan sosial formal sama sekali, mengapa?

- 34) Apakah Anda anggota organisasi sosial?
☐ Ya ☐ Tidak
Jika ya: Sebutkan jenis dua organisasi dimana Anda paling aktif terlibat di dalamnya:
 1)
 2)
Jika tidak: Mengapa?

C - Permintaan akan jaminan sosial measures:

- 35) Kami ingin mengetahui pendapat Anda tentang relevansi jaminan sosial dengan situasi Anda. Jawaban Anda akan membantu kami dalam menyusun paket yang sesuai dengan Anda maupun situasi yang Anda hadapi. Oleh karena itu, kami ingin mengetahui bagaimana pendapat Anda tentang jenis jaminan sosial sesuai prioritasnya. Anda juga dapat menambahkan jenis jaminan sosial yang lain.

ELEMEN JAMINAN SOSIAL	Sebutkan 3 Prioritas Utama <i>Dari 1 sampai 3</i>
1) Asuransi kecelakaan kerja	
2) Asuransi kematian	
3) Asuransi kesehatan pekerja	
4) Asuransi kesehatan untuk anggota keluarga	
5) Dana pensiun	

6) Lain-lain, sebutkan:	
--	--

36) Pembayaran premi dibutuhkan untuk asuransi jaminan sosial ini. Seberapa besar yang mampu bayar setiap bulan?

	Tidak mampu bayar.
	Rp. < 10,000
	Rp. 10,000 - 20,000
	Rp. 20,000 - 30,000
	Rp. 30,000 - 40,000
	Rp. 40,000 - 50,000
	Rp. 50,000 - 100,000
	Rp. > 100,000

37) Metoda pembayaran apa yang Anda sukai?

	Harian
	Mingguan
	Bulanan
	Lain-lain:

38) Apakah anda bisa membayar jumlah tersebut secara teratur?

☐ Ya ☐ Tidak.

Jika Tidak:

Sebutkan alasannya:.....

39) **JIKA** Anda tidak berminat mendapatkan perlindungan asuransi di masa mendatang, sebutkan alasannya?

40) **JIKA** Anda tidak punya asuransi, siapa yang akan merawat Anda jika Anda menganggur, mengalami kecelakaan, sakit atau sudah tua?

.....

Terima kasih atas kerjasama Anda!

Lampiran 3 Pemilihan sub sektor berdasarkan kriteria pemilihan

	KRITERIA PEMILIHAN	Jumlah pekerja terbanyak	Rentan kecelakaan	Bahaya lingkungan	Rentan eksploitasi	Visibilitas & penyuluhan	Sektor ekonomi	Status pekerjaan *)	Laki-laki/ Perempuan	Sampel
	SUBSEKTOR									
	JAWA TENGAH									500
1	Pertanian	XX					Pertanian	W & E	M & F	
2	Pembuatan genteng & Perabotan/Tekstil	X				X	Manufaktur	W & E	M & F	
3	Perdagangan: toko kecil						Perdagangan	W & E & SE	M & F	
4	Industri rumah (dekat Solo)						Manufaktur	SE (Homew.)	M & F	
5	Pertambangan			X	X		Pertambangan	W & E & SE	M & F	
	JAKARTA									600
1	Transportasi: Tukang Ojek & Bajaj & tukang parkir	X				XX	Transportasi	SE	M	
2	Bengkel			XX			Jasa	W & E & SE	M	
3	Perdagangan: Restoran	XX					Perdagangan	W & E	M & F	
4	Kelompok Perabotan						Manufaktur	W & E	M (& F)	
5	Pekerja konstruksi	X	X				Konstruksi	W & E	M (& F)	
6	PRT	X			XX	X	Jasa	W	F (& M)	
	Yogyakarta									500
1	Perdagangan: Toko kerajinan tangan & Restoran	X					Perdagangan	W & E	M & F	
2	PRT				XX	X	Jasa	W	F	
3	Pekerja konstruksi		X				Konstruksi	W & E	M (& F)	
4	Manufaktur: batik, barang tembikar, garmen			(X)			Manufaktur	W & E & SE	M & F	
5	Transportasi, misalnya tukang becak	X					Transportasi	W & SE	M	
	KUPANG									400
1	Perikanan	X				X	Pertanian	W & E & SE	M	
2	Perdagangan : Kaki Lima & Restoran	X					Perdagangan	W & E & SE	M & F	
3	Transportasi: Berbagai jenis transportasi						Transportasi	(W)	(M & F)	
4	Jasa: Berbagai jenis jasa	X					Jasa	(W & E)	(M & F)	

*) Hal-hal berikut ini dibedakan sebagai kategori utama (yang akan dibagi lagi selama analisa ini): SE=Wiraswasta & Pekerja Rumah; W= Pekerja; E= Pengusaha.

Lampiran 4 Sektor-sektor ekonomi yang utama dan status pekerjaan yang utama di daerah sampel

Penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja selama minggu lalu dalam kegiatan informal

Berdasarkan industri utama dan provinsi pilihan (sampel).

Aktivitas informal (in %)					
	Daerah contoh				
	Jateng Desa	Jakarta Kota	Yogya Kota	NTT Kota	Indonesia Total
Industri Utama					
1-Agrikultur	66.4	1.6	27.3	21.6	60.2
2-Pertambangan *)					
3-Manufaktur	7.3	6.8	12.8	6.9	5.8
4-Listrik., gas, air *)					
5-Konstruksi *)					
6-Perdag, rest. & hotel	12.7	55.0	32.2	43.1	18.1
7-Transportasi *)					
8-Keu & asuransi *)					
9- Jasa	2.5	13.5	5.8	6.9	3.9
Lainnya *)	11.1	23.1	21.9	21.6	11.9
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
TOTAL x 1,000 pekerja	7,003	1,146	429	102	62,823

*) Beberapa kegiatan utama tidak dibedakan dalam SAKERNAS dan diberi tanda 'Lain-lain'.

Penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja selama minggu lalu berdasarkan Industri Utama dan provinsi pilihan (sampel).

Semua aktivitas (formal + informal) - (in %)					
	Daerah contoh				
	Jateng Desa	Jakarta Kota	Yogya Kota	NTT Kota	Indonesia Total
Industri Utama					
1-Agrikultur	52.3	0.5	11.8	9.3	40.3
2-Pertambangan *)	1.1	0.3	0.9	0.4	1.0
3-Manufaktur	13.5	16.1	15.7	5.2	12.2
4-Listrik., gas, air *)	0.1	0.3	0.1	0.4	0.2
5-Konstruksi *)	7.0	4.2	8.1	5.9	5.3
6-Perdag, rest. & hotel	15.3	37.1	31.2	29.0	20.7
7-Transportasi *)	3.2	9.9	6.3	13.4	6.0
8-Keu & Asuransi *)	0.5	7.2	3.1	2.6	1.4
9- Jasa	7.0	24.3	22.9	33.8	12.8
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
TOTAL x 1,000 pekerja	9,337	4,190	1,067	269	102,552

Penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja selama minggu lalu berdasarkan Status Pekerjaan dan provinsi pilihan (sampel).

Semua aktivitas (formal + informal) - (in %)					
	Daerah contoh				
	Jateng Desa	Jakarta Kota	Yogya Kota	NTT Kota	Indonesia Total
Status kepegawaian					
1-Mempunyai usaha	16.4	22.7	19.9	24.2	20.4
2-Usaha dibantu oleh t.w./u.w.*)	27.3	9.0	16.0	15.6	21.2
3-Usaha dibantu oleh p.w. **)	1.7	4.2	5.2	4.5	2.9
4-Pekerja	15.9	57.1	41.4	44.6	27.5
5-Pekerja lepas di agrikultur	9.6	0.1	2.0	0.4	5.8
6-Pekerja lepas bukan bidang agrikultur	8.1	1.8	5.2	1.5	5.2
7-Pekerja keluarga	21.0	5.1	10.2	9.7	16.9
TOTAL	100.0	100.0	99.9	100.4	100.0
TOTAL x 1,000 pekerja	9,335	4,191	1,066	270	102,551

*) Pengusaha dibantu oleh pekerja sementara/pekerja tanpa upah

**) Pengusaha dibantu pekerja tetap

Sumber: BPS: Situasi Angkatan Kerja di Indonesia (Agustus 2008). Berdasarkan SAKERNAS 2008 (Semester kedua).

Lampiran 5 Jumlah wawancara per sektor dan daerah sampel

Pemilihan sub sektor untuk keempat daerah sampel diperlihatkan dalam tabel di bawah ini. Untuk setiap daerah sampel satu tabel menunjukkan target pilihan dibandingkan jumlah aktual wawancara yang dapat diselesaikan.

JAKARTA: Jumlah aktual wawancara berdasarkan sektor, dibandingkan target.

JAKARTA	Pekerja informal		Pengusaha informal		Bekerja sendiri/rumah		Total Aktual	Target	Selisih
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan			
1 Manufaktur									
a Furnitur	53	20	15	10	2		100	100	0
2 Konstruksi									
a Bangunan	5	1	19		67	9	101	100	1
3 Perdagangan									
a Restoran	22	36	10	10	18	4	100	100	0
4 Jasa									
a PRT	21	83					104	100	4
b Bengkel	39	1	18	1	41		100	100	0
5 Transportasi									
a Ojek	2				39		41	40	1
b Bajaj	25				15		40	40	0
c Tukang parkir	3				7	13	23	20	3
TOTAL Aktual	170	141	62	21	189	26	609		9
TOTAL Target	215	160	65	20	130	10		600	
Selisih	-45	-19	-3	1	59	16			9

JAWA TENGAH: Jumlah aktual wawancara berdasarkan sektor, dibandingkan target.

Jawa Tengah	Pekerja informal		Pengusaha informal		Bekerja sendiri/rumah		Total Aktual	Target	Selisih
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan			
1 Agrikultur									
a Padi/Beras	22	21	12				55	50	5
b Hortikultur	30	20	16				66	50	16
2 Manufaktur									
a Lantai	12	20	10				42	40	2
b Batik (Solo)					10	42	52	50	2
c Perabotan	33	10	10				53	50	3
3 Perdagangan									
a Warung di desa	21	22	11	11		40	105	100	5
4 Pertambangan									
a Batu dan pasir	10	13	10		31	20	84	80	4
5 Transportasi									
a Ojek					57		57	60	-3
b Delman					30		30	20	10
TOTAL Aktual	128	106	69	11	128	102	544		44
TOTAL Target	130	90	60	10	110	100		500	

YOGYAKARTA: Jumlah aktual wawancara berdasarkan sektor, dibandingkan target.

YOGYAKARTA		Pekerja informal		Pengusaha informal		Bekerja sendiri/rumah		Total Aktual	Target	Selisih
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan			
1	Manufaktur									
a	Kain batik	16	20			7	5	48	50	-2
b	Kerajinan batik	35	19	8	1	2	3	68	60	8
c	Tembikar	6	8	1	1	11	3	30	30	0
2	Konstruksi									
a	Pek. Bangunan	64	20	11	1	4		100	100	0
3	Perdagangan									
a	Toko suvenir	18	18	3	4	4	2	49	50	-1
b	Restoran	7	12	7	8	28	21	83	50	33
4	Jasa									
a	PRT	19	80				1	100	100	0
5	Transportasi									
a	Becak	10		24	1			35	60	-25
	TOTAL Aktual	175	177	54	16	56	35	513		13
	TOTAL Target	229	161	60	0	20	30		500	
	Selisih	-54	16	-6	16	36	5			13

KUPANG: Jumlah aktual wawancara berdasarkan sektor, dibandingkan target.

KUPANG		Pekerja informal		Pengusaha informal		Bekerja sendiri/rumah		Total Aktual	Target	Selisih
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan			
1	Agrikultur									
a	Perikanan	40		19	6	25	10	100	100	0
2	Perdagangan									
a	Pengecer bensin	17	9	13	7	11	3	60	70	-10
b	Restoran	16	12	14	8	15	6	71	70	1
3	Transport									
a	Angkot/Bemo	24	0	10	4	10	0	48	50	-2
b	Ojek	20	0	10	2	20		52	50	2
4	Jasa									
a	Bengkel	36	0	10	0	23	0	69	60	9
	TOTAL Aktual	153	21	76	27	104	19	400		0
	TOTAL Target	160	40	70	40	70	20		400	
	Selisih	-7	-19	6	-13	34	-1			0

Lampiran 6 Karakteristik pilihan di 22 Sub sektor

Pada tabel di halaman berikut ini ada beberapa karakteristik pilihan dari ke-22 sub sektor yang disajikan dalam format ringkasan. Selain beberapa wawancara di setiap sub sektor dan daerah sampel, semua variabel adalah dalam format yang sama, yaitu ia menunjukkan persentasi responden di setiap sub sektor yang punya karakteristik sebagaimana yang ditunjukkan dalam tabel tersebut.

Sektor	No.	Sub sektors	jml interv.	Daerah contoh*)	% Desa	% Perem- puan	% resp. with income < Rp. 600.000	% Tahu Jamsostek	% Prioritas asuransi kecelakaan	% Prioritas asuransi kesehatan	% Tidak bs membayar premi
Agrikultur	1	Hortikultur	66	Cu	100	30.3	78.5	36.4	0.0	7.6	65.2
	2	Perikanan	100	Ku	-	16.0	18.4	19.0	67.0	18.0	12.0
	3	Beras/padi	55	Cu	100	38.2	67.3	61.8	1.8	52.7	25.5
Tambang	4	Pasir dan Batu	84	Cu	100	40.5	70.2	35.7	7.1	11.9	79.8
Manufaktur	5	Batik (wood)	68	Yo	-	33.8	75.8	47.8	53.7	19.4	17.6
	6	Kain batik	49	Yo	-	52.1	81.8	87.8	40.8	26.5	18.4
	7	Batik Solo	52	Cu	100	80.8	80.8	40.4	1.9	30.8	7.7
	8	Perabotan	153	CJ & Ja	35	26.1	22.8	67.3	23.5	37.9	9.2
	9	Genteng	42	Cu	100	50.0	81.0	73.8	4.9	95.1	7.1
Konstruksi	10	Tembikar	30	Yo	-	36.7	61.1	40.0	86.7	0.0	46.7
	11	Handicraft	49	Yo	-	49.0	78.4	83.7	53.1	24.5	34.7
	12	Pekerjaan bangunan	201	Ja & Yo	-	15.4	23.8	65.0	59.3	18.1	33.3
	13	Penjual bensin	60	Ku	-	31.7	53.3	40.0	20.0	50.0	20.0
	14	Toko di desa	105	Cu	100	69.5	53.3	78.1	1.9	24.8	25.7
Dagang/ restoran	15	Warung makanan	255	Ja, Yo, Ku	-	46.1	39.4	66.1	43.3	25.4	24.3
	16	Angkot	88	Ja & Ku	-	4.5	22.4	46.6	70.5	14.8	23.9
	17	Delman	30	Cu	100	0.0	16.7	46.7	23.3	43.3	20.0
Transport	18	Ojek	150	CJ, Ja, Ku	38	1.3	30.2	65.3	68.7	9.3	22.0
	19	Tukang becak	35	Yo	-	2.9	65.7	17.1	28.6	5.7	85.7
	20	Tukang parkir	23	Ja	-	56.5	8.7	65.2	26.1	43.5	47.8
Jasa	21	Bengkel	169	Ja & Ku	-	0.6	15.7	65.3	34.3	49.7	20.1
	22	PRT	204	Ja & Yo	-	79.8	78.4	68.0	14.7	47.1	13.2
TOTAL		TOTAL	2068		26.3%	33.8	45.4	58.9	35.8	29.2	26.1

*) Daerah sampel: CJ=Jawa Tengah; Yo=Yogyakarta; Ja=Jakarta; Ku=Kupang (Indonesia Timur)

Lampiran 7 Kerangka Acuan (TOR) untuk proyek persiapan

1. Konteks

Penelitian dan presentasi hasil penelitian dalam sebuah lokakarya yang diselenggarakan di Hotel Sultan Jakarta hari Rabu tanggal 17 Juni 2009 telah menciptakan sinergi antar organisasi seperti ILO, Jamsostek, Depnaker dan Bappenas, untuk menangani jaminan sosial bagi tenaga kerja informal. Momentum yang diciptakan ini kini perlu dipertahankan dan digunakan untuk menetapkan beberapa proyek percontohan skala kecil sebagai persiapan serta tahap transisi menuju sebuah proyek skala besar yang melibatkan donor selama bertahun-tahun. Proyek yang lebih besar ini diharapkan memiliki cakupan yang lebih besar daripada jaminan sosial yang ada sekarang, ini menunjukkan betapa pentingnya persoalan ini. Jaminan sosial diperkirakan akan lebih mudah memberikan layanan apabila dimasukkan dalam sebuah proyek multi-disiplin yang memiliki empat pilar berikut ini:

- 1) "Melindungi masyarakat yang belum dilindungi": Perluasan cakupan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja informal.
- 2) "Mengelola kelompok masyarakat yang belum dikelola": Pengaturan pekerja sendiri melalui mediasi serikat pekerja dan LSM tenaga kerja.
- 3) "Meningkatkan bisnis informal": Meningkatkan produktivitas dan basis penghasilan tenaga kerja informal supaya kemampuan mereka membayar premi jaminan sosial dapat ditingkatkan.
- 4) "Melibatkan partisipasi Pemerintah daerah": Pada satu sisi, melibatkan otoritas pemerintah daerah dalam pendekatan terpadu di tingkat daerah melalui Pembangunan Ekonomi Lokal (LED) dan melalui Kemitraan Swasta Publik (PPP), dan di sisi lain, dengan lembaga nasional termasuk Depnaker dan Jamsostek.

Dalam publikasi yang disebutkan di atas, telah dibahas beberapa prinsip yang muncul dari penelitian sekarang yang diperlukan untuk memperluas jaminan sosial bagi tenaga kerja informal, yaitu sebagaimana yang diringkaskan di bawah ini:

- Jumlah dan pangsa tenaga kerja informal semakin meningkat.
- Lebih sulit menjangkau tenaga kerja informal daripada tenaga kerja formal.
- Eksplorasi diperlukan terkait partisipasi berbagai jenis lembaga perantara.
- Perluasan cakupan tenaga kerja informal harus dilakukan secara bertahap dan dalam kemasan yang ditargetkan.
- Fleksibilitas diperlukan.

Kerangka acuan yang diusulkan saat ini terdiri dari proyek persiapan dan transisi yang dimaksudkan untuk melengkapi dan meningkatkan persiapan proyek terpadu jangka panjang. Kerangka acuan saat ini nanti dapat dijadikan basis untuk menyusun empat kerangka acuan untuk keempat proyek yang diusulkan.

2. Latar belakang dan rasional

UU tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial (SJSN) perlu dilaksanakan melalui himbauan perlindungan jaminan sosial universal tahun 2009 baik di sektor perekonomian formal maupun informal di Indonesia. Dari total penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 220 juta jiwa, hanya sebagian kecil yang dilindungi sistem jaminan sosial formal, yang mencakup beberapa kontinjensi sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi ILO.

Hingga saat ini, 47% pekerja di sektor formal, dan 17% dari total masyarakat pekerja sudah memiliki sistem asuransi sosial kontributif yang terkait dengan pekerjaan mereka. Sementara masyarakat lain belum dilindungi sistem perlindungan sosial formal di negeri ini apabila mereka menghadapi masalah yang mempengaruhi matapencarian mereka, khususnya di sektor perekonomian informal. Pada tahun 2008, hampir 70% tenaga kerja produktif di Indonesia bekerja di sektor perekonomian informal (71 dari 102 juta pekerja). Sebagian besar tenaga kerja informal ada di desa (65% bekerja di ladang pertanian), namun hal ini menjadi fenomena di perkotaan. Ini menunjukkan pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja informal, dan ILO telah memberi perhatian pada masalah ini.

3. Tujuan

Tujuan menyeluruh dari keempat subproyek ini adalah untuk dimasukkan dalam penyusunan proyek multi-disiplin dan jangka panjang yang didanai lembaga donor. Keempat proyek persiapan diusulkan dengan tujuan sebagai berikut:

- I. Penelitian beberapa jenis pemerintah daerah:
 - a. Pemerintah daerah yang bekerjasama dengan pemerintah nasional di bidang jaminan sosial
 - b. Pemerintah daerah yang mengembangkan sistem jaminan sosialnya sendiri
 - c. Pemerintah daerah yang tidak terlibat dalam jaminan sosial.Memilih satu kotamadya dan satu kabupaten untuk setiap jenis ini dan meneliti 6 daerah. Tujuannya adalah untuk mengetahui salah satu dari tiga model ini yang paling efisien.
- II. Penelitian mendalam tentang beberapa sub sektor percontohan bekerjasama dengan Jamsostek untuk menetapkan beberapa cara nyata untuk memperluas jaminan sosial di lapangan serta meneliti peran beberapa jenis organisasi perantara. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi tentang beberapa cara mengacur tenaga kerja informal secara efektif dan organisasi perantara mana yang paling efisien
- III. Penelitian tentang kebijakan daerah yang inovatif di Solo untuk memformalisasikan perekonomian informal. Tujuannya adalah untuk mengetahui kebijakan dan pendapat tenaga kerja informal yang dilibatkan melalui survei.
- IV. Penelitian kualitatif tentang pertanyaan "Siapa yang perlu mengumpulkan dana?" Beberapa alternatif yang ada adalah koperasi daerah, koordinator sektor, dan/atau melalui tagihan listrik. Mencari mekanisme yang paling aman untuk mengirim uang ke 'pengelola' dana. Dianjurkan adanya penyediaan informasi secara online untuk mempermudah akses dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Peran pemerintah daerah adalah menciptakan program-program 'efektif' dan ikut melakukan pembayaran.

4. Tugas Khusus

Untuk masing-masing dari keempat sub-proyek, tugas-tugas khusus dapat diuraikan sebagai berikut:

- I. Tugas:
 - a. Meneliti tiga jenis hubungan antara pemerintah daerah dengan pusat dari kedua perspektif (pusat dan daerah);
 - b. Memilih salah satu dari ketiga jenis pemerintah kota (kotamadya) dan desa (Kabupaten);
 - c. Melaksanakan survei tentang penduduk untuk mengetahui pendapat tenaga kerja informal tentang kemajuan jaminan sosial.
- II. Tugas:
 - a. Memilih beberapa sub sektor percontohan yang memilih visibilitas tinggi dan potensi keuntungan cepat (quick-win) (misalnya tukang ojek, kelompok usaha manufaktur, dan/ atau PRT);
 - b. Berdasarkan penelitian tentang serikat pekerja (Van der Loop & Andadari, 2008) menetapkan cara-cara nyata untuk mengatur tenaga kerja informal dengan cara yang paling efektif;
 - c. Meneliti peran berbagai jenis lembaga perantara:
 - Kantor cabang Jamsostek;
 - Organisasi pemerintah daerah (bersamaan dengan subproyek II);
 - Organisasi kegiatan sosial di tingkat bawah di beberapa daerah pilihan;
 - Serikat pekerja 'formal';
 - Skema asuransi mikro; dan
 - Mencari kemitraan yang inovatif.
- III. Tugas:
 - a. Menetapkan kebijakan daerah yang tepat Solo terkait formalisasi perekonomian informal;
 - b. Memilih sub sektor tertentu yang dilibatkan, serta sub sektor yang tidak atau kurang dilibatkan;
 - c. Melaksanakan survei tenaga kerja informal yang dilibatkan dan kelompok pekerja yang tidak dilibatkan secara langsung.
- IV. Tugas:
 - a. Investasi kualitatif tentang pertanyaan "Siapa yang seharusnya mengumpulkan dana?"
 - b. Beberapa alternatifnya adalah koperasi daerah, koordinator sektor, dan/atau melalui tagihan listrik.
 - c. Mencari mekansime yang paling aman untuk mengirim uang ke 'pengelola' dana.
 - d. Penciptaan sarana informasi online untuk mempermudah akses dan meningkatkan kepercayaan masyarakat adalah dianjurkan.
 - e. Peran pemerintah daerah adalah menciptakan program-program 'yang kondusif' dan ikut

membayar (bersama-sama dengan subproyek II).

5. Metodologi

Metodologi akan ditetapkan secara lebih terperinci apabila tujuan dan tugas sudah disetujui oleh pemangku kepentingan terkait.

6. Hasil yang Diharapkan

Akan diisi nanti.

7. Batas Waktu

Akan diisi.

Lampiran 8 Daftar Referensi

- Angelini, John and Kenichi Hirose (2004): Extension of Perlindungan jaminan sosial for the Perekonomian informal in Indonesia; Surveys in the Urban and Rural Perekonomian informal. Kertas Kerja 11, Desember 2004. ILO, Manila.
- BPS (2008): SAKERNAS: Labour Force Situation in Indonesia (August 2008). Berdasarkan SAKERNAS 2008 (Semester II).
- Erb, Maribeth & Priyambudi Sulistiyanto (Eds.; 2009): Deepening Democracy in Indonesia? Direct Elections for Local Leaders (Pilkada). Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), Singapura.
- Fiszbein A., N. Schady and F. Ferreira (2009): Conditional Cash Transfers; Reducing Present and Future Poverty. Policy Research reports, Bank Dunia.
- Ginneken, W. Van (2008): Extending Social Security Coverage: Concepts, Approaches And Knowledge Gaps. Preliminary paper for the ISSA project on "Examining the existing knowledge on coverage extension". Geneva, 13 Oktober 2008.
- Grosh M., C. del Ninno, E. Tesliuc and A. Ouerghi (2008): For Protection and Promotion: The Design and Implementation of Effective Safety Nets. Bank Dunia: Washington.
- Hiroshi Yamabana (2008): Strategies to Extend Social Security Coverage. In: ILO AP ISSUES, Desember 2008; Sub-regional Office for East Asia, ILO Bangkok.
- Hotbonar, Sinaga H. (2009): Membangun Asuransi Membangun Indonesia: Upaya Menciptakan Kesejahteraan Sosial Untuk Rakyat, Institute for Transformation Studies: Jakarta.
- Erawan, I Ketut Putra (2007): Tracing the progress of local governments since decentralisation. In: McLeod and MacIntyre (eds., 2007) op. Cit.; pp. 55-69.
- ILO (2001): Definition of social security. www.ilo.org.
- ILO (2003): Social security and Coverage for All; Restructuring the social security Scheme in Indonesia – Issues & Options, 2003 (Jakarta, 2003, xxii, 394 p.) ISBN 92-2-113568-3.
- ILO (2008): Labour and Social Trends in Indonesia 2008; Progress and pathways to job-rich development. Jakarta: 2008.
- ILO/JAMSOSTEK (2008): Social Security in Indonesia; Advancing the Development Agenda. Jakarta: Juli 2008.
- ILO (2008a): Can low-income countries afford basic social security? Social Security Policy briefings. Global Campaign on Social Security and Coverage for All. Social Security Department, ILO: Geneva.
- McLeod, R.H. and A. MacIntyre (eds., 2007): Indonesia: Democracy and the promise of good governance. ISEAS, Institute of Southeast Asian Studies, Singapura.

- Rokx C., G. Schieber, P. Harimurti, A. Tandon and A. Somanathan (2009): Health Financing In Indonesia; A Reform Road Map. Bank Dunia: Juli 2009.
- Tauvik Muhamad (2008): Covering the Uncovered: Making Indonesian Social Security Work for Informal Workers. The Jakarta Post, 18 Agustus 2008, Jakarta.
- Van der Loop, T. & R.K. Andadari (2008): Targeting the Workers in the Informal Economy; Report of the Country Study Indonesia. CNV, Utrecht/BMB and Mott MacDonald/Arnhem: April 2008.